

EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY* (CSR) PT. RAPP KECAMATAN PANGKALAN KERINCI KABUPATEN PELALAWAN

TESIS

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Magister Sains (M.Si)
Pada Program Magister Ilmu Administrasi**



OLEH :

NAMA : YOGI SETIAWAN
NPM : 197122134
BIDANG KAJIAN UTAMA : ADMINISTRASI PUBLIK

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU ADMINISTRASI
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU
2021**

**EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY* (CSR) PT. RAPP KECAMATAN
PANGKALAN KERINCI KABUPATEN
PELALAWAN**

TESIS

Oleh

YOGI SETIAWAN
NPM : 197122134

TIM PENGUJI

Ketua

Sekretaris


Prof. Dr. Hj. Sri Indrastuti S, MM


Dr. Rendi Prayuda, S.IP., M.Si

Anggota I

Anggota II


Dr. H. Panca Setyo Prihatin, S.IP., M.Si


Dr. Annisa Mardatillah, S.Sos., M.Si

Mengetahui,
Direktur Program Pascasarjana
Universitas Islam Riau


Prof. Dr. H. Yusri Munaf, S.H., M.Hum

**EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY* (CSR) PT. RAPP KECAMATAN
PANGKALAN KERINCI KABUPATEN
PELALAWAN**

TESIS

Nama : Yogi Setiawan
NPM : 197122134
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik

Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing.

Pembimbing I
Pekanbaru, 06/11/2021

Prof. Dr. Hj. Sri Indrastuti S, MM

Pembimbing II
Pekanbaru, 02/12-2021

Dr. Rendi Prayuda, S.IP., M.Si

Mengetahui,
Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Publik
Pasca Sarjana Universitas Islam Riau

Dr. Moris Adidi Yogia, S.Sos., M.Si

SURAT PERNYATAAN

Saya Mahasiswa Program Pascasarjana Universitas Islam Riau, peserta ujian komprehensif tesis yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Yogi Setiawan
NPM : 197122134
Prodi : Ilmu Administrasi Publik
Jenjang Pendidikan : Strata Dua (S.2)
Judul Tesis : Evaluasi Pelaksanaan Program *Corporate Social Responsibility* (CSR) PT. RAPP Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan

Atas naskah yang didaftarkan pada ujian komprehensif ini beserta seluruh dokumen persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan :

1. Bahwa naskah tesis ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri (tidak karya plagiat) yang saya tulis sesuai dan mengacu kepada kaidah-kaidah metode penelitian ilmiah dan penulisan karya ilmiah.
2. Bahwa keseluruhan persyaratan administratif, akademik dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh pihak Fakultas dan Universitas.
3. Bahwa apabila kemudian hari ditemukan dan terbukti secara sah bahwa saya ternyata melanggar dan atau belum memenuhi sebagian atau keseluruhan atas, pernyataan butir 1 dan 2 tersebut di atas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi pembatalan hasil ujian komprehensif yang telah saya ikuti serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan Fakultas dan Universitas serta hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 01 Desember 2021
Penulis,



Yogi Setiawan
NPM. 197122134



PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM RIAU

Jalan KH. Nasution No. 113 Gedung B Pascasarjana Universitas Islam Riau
Marpoyan Damai, Pekanbaru, Riau

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

Nomor: 224/A-UIR/5-PPS/2021

Program Pascasarjana Universitas Islam Riau menerangkan:

Nama : **YOGI SETIAWAN**
NPM : **197122134**
Program Studi : **Ilmu Administrasi**

Telah melalui proses pemeriksaan kemiripan karya ilmiah (tesis) menggunakan aplikasi *Turnitin* pada tanggal 22 November 2021 dan dinyatakan memenuhi syarat batas maksimal tingkat kemiripan tidak melebihi 30 % (tiga puluh persen).

Demikian surat keterangan bebas plagiat ini dibuat sesuai dengan keadaan sebenarnya, agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui
Ketua Prodi. Magister Ilmu Administrasi

Pekanbaru, 22 November 2021
Staf Pemeriksa

Dr. H. ~~Moris Adidi~~ Yogia, S.Sos., M.Si.

Meini Giva Putri, S.Pd.

Lampiran :

- Turnitin Originality Report
- Arsip *meinigiva*

Turnitin Originality Report

Processed on: 22-Nov-2021 10:44 WIB
ID: 1709703126
Word Count: 20137
Submitted: 1

Similarity Index	Similarity by Source	
24%	Internet Sources:	25%
	Publications:	6%
	Student Papers:	8%

EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) PT. RAPP KECAMATAN PANGKALAN KERINCI KABUPATEN PELALAWAN By **Yogi Setiawan**

5% match (Internet from 02-Jul-2020)
<http://repository.uin-suska.ac.id/25238/2/SKRIPSI%20GABUNGAN.pdf>

3% match (Internet from 25-Jul-2018)
<https://media.neliti.com/media/publications/200228-none.pdf>

3% match (Internet from 18-Apr-2021)
<https://ojs.umrah.ac.id/index.php/selat/article/download/373/362/>

3% match (Internet from 06-Feb-2020)
<https://www.scribd.com/document/368645770/BAB-I-1-docx>

2% match ()
Ramadhan, R. (Rayun), Anwar, K. (Khairul). "Corporate Social Responsibility PT. Riau Andalan Pulp and Paper Di Kelurahan Teluk Meranti Kecamatan Teluk Meranti Kabupaten Pelalawan Tahun 2015-2016", Riau University, 2018

1% match (Internet from 28-Oct-2017)
<https://media.neliti.com/media/publications/32181-ID-strategi-pelaksanaan-program-corporate-social-responsibility-csr-pada-pt-riau-an.pdf>

1% match (Internet from 26-May-2019)
<https://adoc.tips/bab-ii-profil-kabupaten-pelalawan.html>

1% match (Internet from 26-May-2016)
http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/123456789/9102/NURUL_INAYAH_SHABIR_%28A31109291%29.PDF?sequence=1

1% match (Internet from 29-Oct-2020)
<https://studentsvaganza25.blogspot.com/2014/05/program-csr-di-perusahaan-pt-rapp.html>

1% match (Internet from 23-Jan-2020)
<https://docplayer.info/154335-Peraturan-daerah-provinsi-riau-nomor-6-tahun-2012-tentang-tanggung-jawab-sosial-perusahaan-di-provinsi-riau-dengan-rahmat-tuhan-yang-maha-esa.html>

1% match (Internet from 19-Sep-2021)
<http://etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/detail/50849>

1% match (Internet from 30-Mar-2019)
<https://akademikita.blogspot.com/2016/09/akuntansi-pertanggungjawaban.html>

1% match (Internet from 27-Mar-2019)
<https://ojs.selodangmayang.com/index.php/bappeda/article/download/46/37/>

1% match (Internet from 10-Oct-2015)
http://pelalawankab.bps.go.id/backend/pdf_publicasi/Pelalawan-dalam-Angka-2014.pdf

1% match (Internet from 01-Dec-2020)
<https://ninggors.blogspot.com/2015/01/keadilan-dalam-perusahaan.html>

1% match (Internet from 29-Nov-2020)
<https://serikatnews.com/csr-di-indonesia-sudah-tepat-atau-salah-kaprah/>

EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) PT. RAPP KECAMATAN PANGKALAN KERINCI KABUPATEN PELALAWAN TESIS Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Magister Sains (M.Si) Pada Program Magister Ilmu Administrasi OLEH : NAMA : YOGI SETIAWAN NPM : 197122134 BIDANG KAJIAN UTAMA : ADMINISTRASI PUBLIK PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU ADMINISTRASI PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM RIAU PEKANBARU 2021 EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) PT. RAPP KECAMATAN PANGKALAN KERINCI KABUPATEN PELALAWAN Oleh : YOGI SETIAWAN NPM : 197122134 ABSTRAK PT RAPP saat ini sedang mengalami permasalahan dalam pembukaan lahan, serta pandemi covid-19 menyebabkan banyak kegiatan CSR terhambat. Selain itu dari forum TJSP yang dilakukan pemerintah menunjukkan minimnya dukungan atas pelaksanaan kegiatan CSR karena regulasi daerah yang dianggap tidak berjalan. Pelaksanaan CSR menggunakan teori Pearce dan Robinson (2013:55) yang mengukur tanggung jawab ekonomi, tanggung jawab hukum, tanggung jawab etis, dan tanggung jawab diskresi. Metode penelitian ini adalah kualitatif, dengan teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi serta hasilnya dianalisis dengan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menyimpulkan: 1) Evaluasi pelaksanaan program Corporate Social Responsibility (CSR) PT. RAPP Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan pada dasarnya sudah berjalan dengan baik dalam membangun sinergitas Program CSR atau TJSP dalam mendukung pembangunan

SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM RIAU

NOMOR : 865/KPTS/PPs-UIR/2021

TENTANG

**PERUBAHAN JUDUL PENULISAN TESIS MAHASISWA
PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU ADMINISTRASI**

DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang :
1. Bahwa penulisan tesis merupakan tugas akhir dan salah satu syarat mahasiswa dalam menyelesaikan studinya pada Program Magister (S2) Ilmu Administrasi PPS – UIR, maka perlu ditunjuk pembimbing yang akan memberikan bimbingan kepada mahasiswa tersebut.
 2. Bahwa berdasarkan dari hasil ujian seminar proposal yang telah dilaksanakan, Tim penguji ujian seminar proposal menyarankan perlu adanya perubahan dari judul tesis.
 3. Bahwa nama - nama dosen yang ditetapkan sebagai pembimbing dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan mempunyai kewenangan akademik dalam melakukan pembimbingan yang ditetapkan dengan Surat keputusan Direktur Program Pascasarjana Universitas Islam Riau.

- Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor : 12 Tahun 2012 Tentang : Pendidikan Tinggi
 2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 37 Tahun 2009 Tentang Dosen
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 66 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
 5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 63 Tahun 2009 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan.
 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 49 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
 7. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2018
 8. Peraturan Universitas Islam Riau Nomor : 001 Tahun 2018 Tentang Ketentuan Akademik Bidang Pendidikan Universitas Islam Riau
 9. Surat Permohonan Perubahan Judul Sdr/i Yogi Setiawan tanggal 23 November 2021 yang berdasarkan dari usulan tim penguji seminar proposal tanggal 14 Juli 2021
 10. Mencabut SK Direktur sebelumnya Nomor : 179/KPTS/PPs-UIR/2021 tanggal 16 Maret 2021 tentang Penunjukan Pembimbing Penulisan Tesis Mahasiswa Program Studi Magister (S2) Ilmu Administrasi dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

MEMUTUSKAN


- Menetapkan :
1. Menunjuk :

No	Nama	Jabatan Fungsional	Bertugas Sebagai
1	Prof. Dr. Hj. Sri Indrastuti S, MM	Guru Besar	Pembimbing I
2	Dr. Rendi Prayuda, S.IP., M.Si	Lektor	Pembimbing II

Untuk Penulisan Tesis Mahasiswa :

Nama : **YOGI SETIAWAN**
N P M : **197122134**
Program Studi : **Ilmu Administrasi**
Judul Tesis Baru : **"EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) PT. RAPP KECAMATAN PANGKALAN KERINCI KABUPATEN PELALAWAN".**

2. Tugas – tugas pembimbing adalah memberikan bimbingan kepada mahasiswa Program Magister (S2) Ilmu Administrasi dalam penulisan tesis.
 3. Dalam pelaksanaan bimbingan supaya diperhatikan usul dan saran dari forum seminar proposal dan ketentuan penulisan tesis sesuai dengan Buku Pedoman Program Magister (S2) Ilmu Administrasi.
 4. Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Islam Riau.
 5. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.
- KUTIPAN** : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat diketahui dan diindahkan.

DITETAPKAN DI : PEKANBARU
PADA TANGGAL : 25 November 2021
Ditunjuk

Prof. Dr. H. Yusri Munaf, SH., M.Hum
NIP. 195408081987011002

Tembusan disampaikan Kepada :

1. Rektor Universitas Islam Riau di Pekanbaru
2. Ketua Program Studi Magister (S2) Ilmu Administrasi PPS UIR di Pekanbaru

EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY* (CSR) PT. RAPP KECAMATAN PANGKALAN KERINCI KABUPATEN PELALAWAN

Oleh :

YOGI SETIAWAN
NPM : 197122134

ABSTRAK

PT RAPP saat ini sedang mengalami permasalahan dalam pembukaan lahan, serta pandemi covid-19 menyebabkan banyak kegiatan CSR terhambat. Selain itu dari forum TJSP yang dilakukan pemerintah menunjukkan minimnya dukungan atas pelaksanaan kegiatan CSR karena regulasi daerah yang dianggap tidak berjalan. Pelaksanaan CSR menggunakan teori Pearce dan Robinson (2013:55) yang mengukur tanggung jawab ekonomi, tanggung jawab hukum, tanggung jawab etis, dan tanggung jawab diskresi. Metode penelitian ini adalah kualitatif, dengan teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi serta hasilnya dianalisis dengan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menyimpulkan: 1) Evaluasi pelaksanaan program *Corporate Social Responsibility* (CSR) PT. RAPP Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan pada dasarnya sudah berjalan dengan baik dalam membangun sinergitas Program CSR atau TJSP dalam mendukung pembangunan daerah di Kabupaten Pelalawan. Dari indikator tanggungjawab ekonomi sudah menyerap tenaga kerja setempat dan memberikan bantuan ekonomi secara langsung dan tidak langsung. Dari indikator tanggungjawab hukum sudah sangat patuh dalam membayar pajak, mematuhi undang-undang dan peraturan daerah serta pelaporan kegiatan CSR secara periodik. Dari indikator tanggungjawab diskresi, sudah turut berpartisipasi dengan mendukung kegiatan masyarakat dan menjaga hubungan timbal balik dengan masyarakat. Akan tetapi, satu hal yang perlu dioptimalkan khususnya pada indikator tanggungjawab etis karena meskipun dinilai sudah mendukung program-program pemerintah, tetapi belum menjunjung tinggi kearifan dan adat masyarakat setempat karena kurangnya partisipasi pada sub indikator tersebut. 2) Faktor penghambat pelaksanaan CSR terdiri dari kurangnya respon positif dari masyarakat, masalah internal perusahaan, minimnya dukungan pemerintah, dan penerapan sanksi perusahaan berdasarkan regulasi yang belum jelas.

Kata Kunci : Evaluasi, CSR, PT RAPP

**AN EVALUATION OF IMPLEMENTATION CORPORATE SOCIAL
RESPONSIBILITY (CSR) PROGRAM AT PT. RAPP
PANGKALAN KERINCI SUBDISTRICT
PELALAWAN DISTRICT**

By :

YOGI SETIAWAN
NPM : 197122134

ABSTRACT

PT RAPP is currently experiencing problems in land establishment, as well as the covid-19 pandemic caused many CSR activities have to be hampered. In addition, the CSR forum conducted by the government shown the lack of supporting implementation of CSR activities because local regulations are considered not working. The implementation of CSR used Pearce and Robinson (2013:55) theory measures economic responsibilities, legal responsibilities, ethical responsibilities, and discretionary responsibilities. This research method is qualitative, with data collection techniques using observation, interviews and documentation and the results are analyzed with descriptive qualitative. The results showed that: 1) Evaluation of the implementation of the Corporate Social Responsibility (CSR) program of PT. The RAPP of Pangkalan Kerinci Subdistrict, Pelalawan Regency has basically been going well in building the synergy of CSR or CSR Programs in supporting regional development in Pelalawan Regency. From the indicators of economic responsibility, it has absorbed local workers and provided direct and indirect economic assistance. From the indicators of legal responsibility, they are very obedient in paying taxes, complying with local laws and regulations and reporting CSR activities periodically. From the indicators of discretionary responsibility, it has participated by supporting community activities and maintaining reciprocal relationships with the community. However, there is one thing that needs to be optimized, especially on the ethical responsibility indicator because although it is considered to have supported government programs, it has not yet respected the wisdom and customs of the local community due to the lack of participation in these sub-indicators. 2) The inhibiting factors for the implementation of CSR consist of a lack of positive response from the community, internal company problems, lack of government support, and the application of corporate sanctions based on unclear regulations.

Keywords: Evaluation, CSR, PT RAPP

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Alhamdulillah, sujud syukur kehadirat Allah SWT, penulis akhirnya dapat menyelesaikan tesis yang berjudul “Evaluasi Pelaksanaan Program *Corporate Social Responsibility* (CSR) PT. RAPP Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan”. Penulisan tesis ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Magister Sains Program Magister (S2) Ilmu Administrasi Program Pascasarjana Universitas Islam Riau.

Untuk itu pada kesempatan ini penulis mengaturkan dengan setulus-tulusnya terima kasih dan penghargaan kepada pihak yang membantu dan memberikan motivasi, untuk itu penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, SH., MCL, selaku Rektor Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu pada Universitas yang beliau pimpin.
2. Bapak Prof. Dr. H. Yusri Munaf, S.H., M.Hum selaku Direktur Program Pasca Sarjana Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas kepada penulis untuk menjalani proses perkuliahan dari awal hingga selesai.
3. Bapak Dr. Moris Adidi Yogya, S.Sos., M.Si selaku Ketua Program Studi Administrasi Publik Pascasarjana Universitas Islam Riau yang telah banyak membantu dan memberikan kemudahan kepada penulis dalam menyusun rancangan dan konsep judul penelitian ini.

4. Ibu Prof. Dr. Hj. Sri Indrastuti S, MM selaku Dosen Pembimbing I, yang telah memberikan banyak arahan, bimbingan dan saran demi membangun konsep penyusunan tesis ini.
5. Bapak Dr. Rendi Prayuda, S.IP., M.Si selaku Dosen Pembimbing II, yang telah memberikan banyak arahan, dan perbaikan sehingga seluruh konsep tesis ini menjadi jauh lebih baik lagi.
6. Bapak Dr. H. Panca Setyo Prihatin, S.IP., M.Si dan Ibu Dr. Annisa Mardatillah, S.Sos., M.Si selaku Anggota Penguji atas segala perbaikan dan saran yang sangat membangun dalam penyempurnaan isi tesis ini.
7. Bapak dan Ibu seluruh Dosen di lingkungan Pascasarjana Universitas Islam Riau atas segala pembelajaran, wawasan serta ilmu yang telah diberikan selama masa perkuliahan.
8. Bapak dan Ibu seluruh staf dan pegawai Tata Usaha Pascasarjana Universitas Islam Riau atas segala bantuan yang diberikan dalam pengurusan dokumen administrasi akademik perkuliahan.
9. Para informan di PT. RAPP Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan, beserta seluruh masyarakat dan pihak yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu yang telah membantu penulis dalam penyelesaian tesis ini.
10. Teristimewa untuk kedua orangtua, dan seluruh keluarga besar yang senantiasa memberikan do'a, dan mendukung penulis dari awal hingga tesis ini selesai.

11. Seluruh rekan-rekan, sahabat seperjuangan, seluruh mahasiswa Program Pascasarjana Universitas Islam Riau atas segala dukungan, bantuan, dan rasa persahabatan dari awal hingga akhir masa perkuliahan selesai.
12. Seluruh pihak lain yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang secara tidak langsung ikut terlibat dalam mendukung penulis dalam proses penyelesaian tesis ini.

Penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan baik materi yang tercakup didalamnya maupun tata cara penyajiannya. Dengan kerendahan hati, penulis menerima kritik dan saran demi perbaikan dan kesempurnaan penelitian selanjutnya. Akhirnya, semoga tesis ini dapat menjadi masukan yang berharga bagi kita semua dalam memperkaya wawasan dan pengetahuan bersama.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Pekanbaru, 01 Desember 2021
Penulis

YOGI SETIAWAN
NPM. 197122134

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN PERSETUJUAN TESIS	i
HALAMAN PENGESAHAN TESIS	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
ABSTRAK	iv
ABSTRACT	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah	14
1.3. Tujuan Penelitian	15
1.4. Manfaat Penelitian	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN	16
2.1. Tinjauan Pustaka	16
2.1.1. Konsep dan Teori Administrasi Publik	16
2.1.2. Konsep dan Teori Organisasi Publik	17
2.1.3. Konsep dan Teori Kebijakan Publik	18
2.1.4. Konsep Evaluasi	19
2.1.5. Konsep <i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR)	23
2.1.6. Konsep Pemberdayaan Masyarakat	48
2.2. Penelitian Terdahulu	50
2.3. Kerangka Pemikiran	56
2.4. Konsep Operasional	56
2.5. Operasional Variabel	59
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	60
3.1. Tipe/ Jenis Penelitian	60
3.2. Lokasi Penelitian	60
3.3. Jenis dan Sumber Data	61
3.4. Teknik Pengumpulan Data	61
3.5. Informan Penelitian	62
3.6. Teknik Analisis Data	63
BAB IV GAMBARAN UMUM PENELITIAN	64
4.1. Gambaran Umum Kabupaten Pelalawan	64
4.1.1. Sejarah Kabupaten Pelalawan	64

4.1.2. Geografis Kabupaten Pelalawan	66
4.1.3. Pemerintahan Kabupaten Pelalawan	67
4.1.4. Kependudukan Kabupaten Pelalawan.....	68
4.1.5. Ketenagakerjaan di Kabupaten Pelalawan	70
4.2. Gambaran Umum PT. Riau Andalan Pulp dan Paper (RAPP) ...	71
4.2.1. Sejarah PT. Riau Andalan Pulp dan Paper (RAPP)	71
4.2.2. Ruang Lingkup Bidang Usaha	75
4.2.3. Visi dan Misi Perusahaan.....	77
4.2.4. Daerah Pemasaran	79
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	80
5.1. Evaluasi Pelaksanaan Program <i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR) PT. RAPP Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan.....	86
5.1.1. Tanggung Jawab Ekonomi (<i>economic responsibilities</i>)....	88
5.1.2. Tanggung jawab hukum (<i>legal responsibilities</i>).....	93
5.1.3. Tanggung jawab etis (<i>etchical responsibilities</i>).....	97
5.1.4. Tanggung jawab diskresi (<i>discretionary responsibilities</i>)	102
5.2. Faktor-faktor Yang Menghambat Pelaksanaan Program <i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR) PT. RAPP Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan	109
BAB VIKESIMPULAN DAN SARAN	122
6.1. Kesimpulan	122
6.2. Saran	123
DAFTAR PUSTAKA	126

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel I.1. Jumlah Perusahaan Menurut Bentuk Badan Hukum di Kabupaten Pelalawan 2016-2018	7
Tabel I.2. Data Pelaksanaan Program CSR PT. RAPP tahun 2017 s/d 2020	9
Tabel II.1. Penelitian Terdahulu Evaluasi Pelaksanaan Program <i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR) PT. RAPP Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan.....	50
Tabel II.2. Konsep Operasional Evaluasi Pelaksanaan Program <i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR) PT. RAPP Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan.....	59
Tabel III.1. Informan Penelitian Evaluasi Pelaksanaan Program <i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR) PT. RAPP Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan.....	62
Tabel IV.1. Luas Wilayah Kecamatan di Kabupaten Pelalawan Tahun 2020	67
Tabel IV.2. Jumlah Desa dan Kelurahan di Kabupaten Pelalawan Tahun 2020	68
Tabel IV.3. Luas Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Pelalawan Tahun 2020	69
Tabel IV.4. Jenis Kelamin Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Pelalawan Tahun 2020.....	70
Tabel IV.5. Jumlah Jumlah Penduduk Usia 15 tahun ke atas yang Bekerja dan tidak bekerja di Kabupaten Pelalawan Tahun 2020.....	71
Tabel IV.6. Tabel IV.6. Sejarah Singkat PT. Riau Andalan Pulp dan Paper (RAPP).....	74
Tabel V.1. Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi Pembangunan Daerah Kabupaten Pelalawan 2016-2021	82
Tabel V.2. Pelaksanaan Program CSR PT. RAPP Berdasarkan Kategori Tahun 2017 s/d 2020.....	85

Tabel V.3.	Jumlah Pencari Kerja yang Mendaftar di Kantor Dinas Tenaga Kerja Menurut Tingkat Pendidikan dan Kecamatan di Kabupaten Pelalawan Tahun 2020	89
Tabel V.4.	Bantuan Ekonomi Langsung dan Tidak Langsung Tahun 2017-2019	91
Tabel V.5.	Pelaporan kegiatan Realiasi CSR Periode 2021	95
Tabel V.6.	Pelaporan Kegiatan Realiasi CSR Kearifan dan Adat Masyarakat Periode 2021.....	98
Tabel V.7.	Tanggung Jawab Diskresi Pendidikan PT RAPP Pelalawan Berdasarkan Sektor Pendidikan 2017-2020.....	103
Tabel V.8.	Tanggung Jawab Diskresi Kesehatan PT RAPP Pelalawan Berdasarkan Sektor Kesehatan 2017-2019	105
Tabel V.9.	Tanggung Jawab Diskresi Sosial PT RAPP Pelalawan Berdasarkan Sektor Sosial 2017-2020	107
Tabel V.10.	Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan dan Angkatan Kerja Tahun 2020	111
Tabel V.11.	Data Pelaksanaan Program CSR PT. RAPP tahun 2020	113
Tabel V.12.	Garis Kemiskinan, Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Pelalawan 2016-2020	116

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar II.1 Kerangka Pemikiran Evaluasi Pelaksanaan Program <i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR) PT. RAPP Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan.....	55
Gambar IV.1 Peta Wilayah Kabupaten Pelalawan.....	65



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. Daftar Wawancara
- Lampiran 2. Data Observasi
- Lampiran 3. Dokumentasi Penelitian



Dokumen ini adalah Arsip Miik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Corporate social responsibility (CSR) merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh perusahaan sebagai rasa tanggung jawab perusahaan terhadap sosial maupun lingkungan sekitar dimana perusahaan itu beroperasi. Secara umum pelaksanaan program CSR di Indonesia di atur dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Pasal 74 tentang Perseroan Terbatas (UUPT). Melalui undang-undang ini, industri atau korporasi didorong untuk memberikan kontribusi dalam upaya untuk mewujudkan kesejahteraan sosial dan pengelolaan kualitas hidup masyarakat. UUPT menyebutkan bahwa setiap perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Jika tidak dilakukan, maka perseroan tersebut akan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undang CSR sangat penting keberadaannya untuk menciptakan hubungan yang baik antara perusahaan dan masyarakat dimana perusahaan tersebut memproduksi.

Pelaksanaan program CSR diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yaitu tercantum didalam pasal 74 ayat (1) menyatakan perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya dibidang dan atau berkaitan dengan segala sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Hal inilah yang dimaksud dengan *corporate social responsibility* (CSR).

Dalam pasal tersebut diatur bahwa :

- a. Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas tersebut menyatakan perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya dibidang dan atau berkaitan dengan segala sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Inilah yang dimaksud dengan *Corporate Social Responsibility* (CSR).
- b. Pasal 74 ayat (2) berbunyi tanggung jawab sosial dan lingkungan itu merupakan kewajiban perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.
- c. Pasal 74 ayat (3) Undang-Undang Perseroan Terbatas menyatakan, bahwa perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana pasal 1 dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.
- d. Pasal 74 ayat (4) Undang-Undang Perseroan Terbatas menyatakan, bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan diatur dengan peraturan pemerintah.

Konsep CSR mengacu pada nilai dan standar yang berkaitan dengan beroperasinya sebuah perusahaan dalam suatu masyarakat, artinya CSR sebagai komitmen usaha untuk beroperasi secara legal dan etis yang berkontribusi pada peningkatan kualitas kehidupan pihak-pihak yang menjadi *stakeholder* antara lain karyawan dan keluarganya, komunitas local dan masyarakat luas dalam kerangka mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Dalam konsep ini perusahaan diharapkan memenuhi cakupan *Triple Bottom Line: People, Planet* dan *Profit*.

Artinya perusahaan tidak hanya melakukan kegiatan bisnis demi mencari keuntungan (*profit*), melainkan juga ikut memberikan kebaikan, kemajuan dan kesejahteraan masyarakat (*people*) dan lingkungan (*planet*) dengan ikut melakukan berbagai kegiatan sosial yang berguna bagi masyarakat.

Menurut Rudito dan Famiola (2013:3) meskipun sudah dibuat peraturan oleh pemerintah pusat, bahkan pemerintah daerah turut serta berinisiatif untuk membuat Perda pelaksanaan CSR, dalam praktiknya masih banyak perusahaan yang enggan untuk melakukan CSR. Hal tersebut dikarenakan CSR dianggap membuang-buang biaya dan merugikan perusahaan. Di sisi lain, banyak perusahaan yang melakukan kegiatan CSR seadanya untuk memenuhi kewajiban perusahaan dan terhindar dari sanksi. Di sinilah letak salah kaprah dalam pelaksanaan CSR di Indonesia. Banyak perusahaan yang melakukan CSR sebagai kegiatan sukarela atau *charity* dengan membagi-bagikan sembako, melakukan kegiatan CSR sebagai pencitraan untuk menaikkan eksistensi perusahaan di mata masyarakat, padahal menurut World Bank kegiatan CSR ditujukan sebagai komitmen bisnis untuk mengembangkan ekonomi berkelanjutan.

Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan dituntut untuk membantu pemerintah daerah untuk mendukung program pembangunan daerah. Pemerintah daerah sebagai tanggung jawab utama dalam mensejahterakan masyarakat dan melestarikan lingkungan tidak akan menanggung beban tersebut jika dilakukan sendiri melainkan membutuhkan partisipasi, salah satunya yang paling potensial adalah dari perusahaan, agar pembangunan dan peningkatan kesejahteraan yang direncanakan pemerintah daerah bisa dicapai. Adapun alasan penting mengapa

harus melakukan CSR yaitu untuk mendapatkan keuntungan sosial, mencegah konflik dan persaingan yang terjadi, kesinambungan usaha/bisnis, pengelolaan sumber daya alam serta pemberdayaan masyarakat.

Menurut Poerwanto (2010:74) *corporate social responsibility* (CSR) atau tanggung jawab sosial adalah “niat baik dan komitmen dari perusahaan untuk memberikan kontribusi terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat lokal” dan kegiatan ini berawal dengan membangun hubungan yang harmonis antara perusahaandengan lingkungannya. Menurut Pearce dan Robinson (2013:55) konsep utama dari *corporate social responsibility* terdiri dari empat konsep yang menjadi patokan bagi perusahaan dalam melaksanakan CSR;

- 1) Tanggung jawab ekonomi (*economic responsibilities*)
- 2) Tanggung jawab hukum (*legal responsibilities*)
- 3) Tanggung jawab etis (*ethical responsibilities*)
- 4) Tanggung jawab diskresi (*discretionary responsibilities*)

Menurut Wibisono (2007:41) dampak positif pada pelaksanaan CSR yaitu sebagai berikut:

- 1) Mempertahankan dan mendongkrak citra perusahaan yang sangat penting untuk menunjang keberhasilan perusahaan
- 2) Layak mendapatkan *social licence to operate* dari masyarakat sekitar, karena pada saat masyarakat mendapatkan keuntungan dari perusahaan, mereka merasa memiliki perusahaan, sehingga perusahaan dengan leluasa menjalankan roda bisnisnya di kawasan tersebut

- 3) Mereduksi resiko bisnis perusahaan yaitu mengelola resiko ditengah permasalahan perusahaan, jika terjadi permasalahan dalam perusahaan, maka biaya *recovery* akan jauh berlipat dibandingkan dengan pelaksanaan program CSR.
- 4) Melebarkan akses sumber daya manusia yang dibutuhkan perusahaan.
- 5) Memperluas akses pasar konsumen.
- 6) Mereduksi biaya dengan mendaur ulang limbah pabrik ke dalam proses produksi.
- 7) Peluang mendapatkan banyak penghargaan.
- 8) Menjaga hubungan baik dengan stakeholder demi kesejahteraan masyarakat.
- 9) Meningkatkan motivasi dan produktifitas karyawan karena perusahaan tempat bekerja sebagai pelaku CSR.

Menurut Rachman (2015:75) manfaat *corporate social responsibility* bagi masyarakat antara lain adalah sebagai berikut:

- 1) Mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat di sekitar perusahaan.
- 2) Membuka ruang kerja dan kesempatan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat
- 3) Turut membantu program pemerintah dalam pengentasan kemiskinan.
- 4) Penyelesaian masalah lingkungan
- 5) Akan lebih menguatkan dan memberdayakan kehidupan masyarakat baik secara ekonomi, kelembagaan sosial, dan memperkecil terjadinya konflik sosial.

Perkembangan pelaksanaan CSR di Indonesia dapat ditandai, dengan mulai semakin banyaknya perusahaan mengimplementasikan CSR. Perusahaan semakin banyak menerapkan CSR baik dalam bentuk amal (*charity*) maupun pemberdayaan (*empowerment*). Setidaknya bisa dilihat dari gencarnya publikasi berkaitan dengan implementasi CSR di media cetak dan elektronik. Perkembangan CSR di Indonesia dapat dilihat dari beragam upaya Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota untuk menerbitkan peraturan perundang-undangan terkait dengan pelaksanaan CSR di wilayah Propinsi, Kabupaten dan Kota bersangkutan.

Pentingnya pelaksanaan CSR di Provinsi Riau sendiri juga telah ditegaskan dalam Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 6 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Provinsi Riau pasal 9 ayat (1) menyebutkan setiap perusahaan di Provinsi Riau wajib sebagai pelaksana TJSP. Selanjutnya dalam pasal 25 huruf c bagi perusahaan Perseroan Terbatas yang menjalankan kegiatan usahanya dibidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan TJSP dengan biaya yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya operasional perusahaan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajiban berdasarkan ukuran usaha, cakupan pemangku kepentingan dan kinerja keuangannya. Dalam pasal 8 maka, perusahaan yang melaksanakan TJSP wajib:

- a. Menyusun rancangan penyelenggaraan program TJSP sesuai dengan prinsip-prinsip tanggung jawab sosial dunia usaha dengan memperhatikan kebijakan pemerintah daerah dan peraturan perundangan;
- b. Menumbuhkan, memantapkan dan mengembangkan sistem jejaring kerjasama dan kemitraan dengan pihak-pihak lain serta melaksanakan kajian, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan TJSP dengan memperhatikan kepentingan perusahaan, pemerintah daerah, masyarakat dan kelestarian lingkungan;

- c. Menetapkan komitmen bahwa program TJSP adalah bagian yang tidak terpisahkan dalam kebijakan manajemen maupun program pengembangan perusahaan di dalam peraturan perusahaan; dan
- d. Menerima usulan masyarakat baik perorangan maupun kelompok yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan. Bahwa perusahaan sebagaimana dimaksud huruf c, mempunyai tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sebagai wujud kepedulian dan peran serta dalam mempercepat tercapainya tujuan pembangunan daerah Kabupaten Pelalawan.

Di Kabupaten Pelalawan berdasarkan data Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Pelalawan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel I.1. Jumlah Perusahaan Menurut Bentuk Badan Hukum di Kabupaten Pelalawan 2016-2018

Jenis	Tahun		
	2016	2017	2018
Perseroan Terbatas (PT)	744	820	224
CV/ Firma	361	407	108
Koperasi	82	92	16
Perorangan	214	363	340
Lainnya	-	-	-

Sumber: BPS Kabupaten Pelalawan Dalam Angka 2020

Berdasarkan tabel di atas, tampak bahwa pertumbuhan Perseroan Terbatas (PT) menurun drastis, hal ini juga seiring dengan penurunan jumlah CV/ Firma dan Koperasi, sementara untuk Perorangan jumlahnya meskipun menurun namun tetap dalam jumlah yang tidak terlalu drastis penurunannya.

PT Riau Andalan Pulp & Paper (RAPP) sebagai salah satu perusahaan terbesar yang ada di Kabupaten Pelalawan merupakan mitra dari sebuah

perusahaan dari *Asia Pasifik Resources International Holding Limited (APRIL)* yang merupakan perusahaan penghasil bubur kertas (*pulp*) dan kertas sejak tahun 1994. Perusahaan seluas 1750 ha ini berlokasi di jalan Lintas Timur, Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau. Demi menjaga hubungan baik dengan pemerintahan terutama dengan masyarakat, PT Riau Andalan Pulp and Paper menjalankan *corporate social responsibility* yang telah ditetapkan oleh undang-undang nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas yakni : Tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL) adalah komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat.

Pada dasarnya, pelaksanaan CSR oleh PT RAPP ini diklasifikasikan berdasarkan 7 program utama sebagai berikut:

- 1) *Integrated farming system*, yaitu pemberian bantuan bibit kepada masyarakat yang berwirausaha di bidang pertanian, perkebunan, dan perikanan.
- 2) UMKM, yaitu pemberian bantuan dana kepada masyarakat yang berwirausaha *inline* dengan kegiatan perusahaan seperti menjual pupuk tanaman maupun *offline* dengan kegiatan perusahaan seperti menjual makanan khas daerahnya.
- 3) *Social infrastructure*, yaitu pembangunan dan renovasi infrastruktur publik seperti jalan, jembatan, rumah ibadah, dan bangunan lain.
- 4) *Education*, yaitu pemberian beasiswa pendidikan kepada pelajar berprestasi.
- 5) *Vocational training*, yaitu pemberian pelatihan teknis kepada generasi muda sebagai bekal dalam memasuki dunia kerja seperti pelatihan las, otomotif, dan menjahit.
- 6) *Employee volunteerism*, yaitu kesukarelaan karyawan dalam membantu masyarakat.
- 7) *Donation*, yaitu bantuan dana kepada organisasi ataupun kegiatan kelompok masyarakat yang mengajukan permohonan bantuan dana.

Dalam melaksanakan praktek *corperate social responbility* (CSR), pada tahun 2008 PT. RAPP pernah membentuk sebuah program yang bernama Program Pemberdayaan Masyarakat Riau (PPMR). PPMR adalah suatu mekanisme layanan sumber daya masyarakat untuk membantu masyarakat agar dapat meningkatkan kehidupan dirinya sendiri. PPMR mempunyai empat kegiatan yang terdiri dari; 1) *Integrated Farming System* (IFS), 2) *Small and Medium Enterprises* (SME), 3) *Vocational Training* (VT) dan 4) *Social Infrastructure Program* (SIP). *Integrated farming system* (IFS) adalah sebuah model pertanian yang mengintegrasikan 3 subsektor pertanian (peternakan, pertanian dan perikanan) dalam satu lahan. Oleh PPMR, program IFS dijadikan sebagai core program dan program-program yang lain merupakan program pendukung IFS.

Selama 4 tahun terakhir, pelaksanaan CSR oleh PT. RAPP Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel I.2. Data Pelaksanaan Program CSR PT. RAPP tahun 2017 s/d 2020

Tahun	Jenis Program	Kegiatan
(1)	(2)	(3)
2017	<i>Vocational Training</i> (VT)	- Pelatihan menjahit - Pelatihan mekanik
	<i>Education</i>	- Beasiswa perguruan tinggi - Beasiswa SMA
	<i>Social Infrastructure Program</i> (SIP)	- Paket makanan tambahan - Lomba balita sehat - Pembangunan tiang bendera - Bantuan alat komputer - Olahraga - Gotong royong - Pelatihan ustadz - Rehab jembatan
	<i>Integrated farming system</i> (IFS)	- Pelatihan budidaya sapi bali - Bantuan ternak sapi pola RF - Bantuan saprodi program FFV - Pelatihan budidaya padi sawah

Tahun	Jenis Program	Kegiatan
(1)	(2)	(3)
2018	<i>Integrated farming system (IFS)</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Bantuan mesin perontok jagung - Budidaya nenas - Bantuan jaring - Produksi batik
	<i>Education</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Beasiswa SMA - Bantuan genset dan alat sekolah
	<i>Social Infrastructure Program (SIP)</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Pengadaan PMT - Bantuan baju kader Posyandu - Lomba balita sehat - Bantuan sunatan massal - Bantuan pengadaan peralatan pencegah kebakaran - Pembiayaan event pertandingan - Bantuan peralatan olahraga
	<i>Employe volunteerism</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Gotong royong
2019	<i>Education</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Beasiswa SLTA - Beasiswa SLTP - Beasiswa SD
	<i>Social Infrastructure Program (SIP)</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Santunan anak yatim - Pemberian bantuan sembako korban kebakaran - Bantuan material bangunan - Bantuan masker dan obat kesehatan
	<i>Employe volunteerism</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Bantuan operasional sarana fasilitas alat pemadam kebakaran - Bantuan akomodasi petugas pemadaman - Bantuan alat berat untuk sekat bakar
	<i>Donation</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Bantuan dana tunai kepada para korban kebakaran hutan
2020	<i>Small and Medium Enterprises (SME)</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Pelatihan UMKM masyarakat terdampak covid19
	<i>Education</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Bantuan gaji guru honor - Beasiswa Perguruan Tinggi - Beasiswa SLTA - Pelatihan guru - Bantuan fasilitas sekolah

Sumber: Dokumentasi PT. RAPP, 2021

PT. RAPP beroperasi berdasarkan filosofi bisnis 5C: bahwa kegiatan operasionalnya harus baik untuk Masyarakat, Negara, Iklim, Pelanggan, dengan demikian akan baik pula bagi Perusahaan. Petani juga diberi dukungan melalui

Sistem Pertanian Terpadu, sebuah program yang mengajarkan mereka teknik hortikultura modern untuk meningkatkan hasil panen dan menanam tanaman baru. Para petani mengelola 2.400 hektar lahan dan menerima pelatihan di pusat pelatihan.

Pelestarian budaya Indonesia dilakukan melalui sejumlah program demi menghidupkan kembali kerajinan tradisional, seperti program yang mendorong wanita setempat meningkatkan pendapatan keluarga lewat membatik. Para wanita juga diberdayakan melalui program kerajinan kain tenun. Mereka diberikan pelatihan dan peralatan pendukung untuk memproduksi kain tersebut yang kemudian dapat dijual kembali. Dalam rangka membantu masyarakat dalam mendapatkan akses pendidikan, PT RAPP memberikan sejumlah program beasiswa mulai dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi, pelatihan guru, dan menyediakan fasilitas dan peralatan sekolah.

Hasil penelitian Hady dan Sugiana (2011) menunjukkan bahwa program *integrated farming system* (IFS) yang dilaksanakan PT.RAPP dari periode 2000 hingga 2004 dinilai tidak efektif. Ketidakefektifan program IFS ini dikarenakan; 1). berkurangnya jumlah sapi, tanaman dan ikan milik kelompok tani hingga tahun 2007 yang berasal dari bantuan PPMR, 2). berkurangnya jumlah produksi kompos milik kelompok tani hingga tahun 2007, 3). berkurangnya luas lahan pertanian milik kelompok tani hingga tahun 2007.

Berdasarkan hasil observasi pengamatan sementara, terdapat beberapa fenomena terkait pelaksanaan CSR oleh PT RAPP sebagai berikut:

- 1) Kurangnya respon dari tingkat pengetahuan masyarakat atas program CSR. Masih banyak masyarakat di Kecamatan Pelalawan yang tidak mengetahui pentingnya CSR yang dilakukan oleh PT RAPP harus dapat diterima langsung manfaatnya oleh masyarakat. Masih banyak kelompok masyarakat yang meragukan dapat meminta bantuan dana secara langsung kepada pihak perusahaan tanpa harus ada koneksi atau dengan istilah “orang dalam”.
- 2) Masalah internal perusahaan, khususnya sejak pandemi covid19 banyak kegiatan CSR yang tidak dijalankan karena alokasi dana yang diperketat.
- 3) Minimnya dukungan pemerintah, hal ini tercermin dari forum TJSP yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 26 Januari 2021. Banyak anggota DPRD yang meragukan dana 40 miliar yang disampaikan oleh pihak PT RAPP hanyalah sebagai bentuk pencitraan semata. Hal ini disebabkan karena audit penilaian atas kinerja TJSP yang dilakukan suatu perusahaan itu sendiri masih belum jelas akibat tidak jalannya Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 6 Tahun 2012 tentang Tanggung jawab Sosial Perusahaan di Provinsi Riau.
- 4) Kriteria penerapan sanksi perusahaan belum jelas. Hingga saat ini belum ada Peraturan Bupati Pelalawan yang secara khusus dan teknis membahas pelaksanaan TJSP untuk setiap perusahaan yang ada di daerah Kabupaten Pelalawan. Berbeda dengan Kabupaten lain yang memiliki Peraturan Bupati, untuk PT RAPP sendiri hanya berpedoman pada Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 6 Tahun 2012 tentang Tanggung jawab Sosial Perusahaan di Provinsi Riau.

Beberapa penelitian terdahulu terkait *Corporate Social Responsibility* diantaranya, penelitian Curran (2017) menemukan hasil perusahaan pertambangan umumnya menggunakan gagasan tentang izin sosial sebagai tindakan yang didorong oleh proses yang menjadikan keterlibatan masyarakat yang disyaratkan di bawah persyaratan izin hukumnya sebagian besar sebagai alat komunikatif untuk menginformasikan masyarakat yang terkena dampak tentang rencananya. Penelitian Dewi (2017) menemukan hasil *corporate social responsibility* memberikan dampak positif bagi lingkungan dan masyarakat dimana perusahaan berada, selain itu dalam melakukan kegiatan usaha, dalam rangka menyeimbangkan tanggung jawab perusahaan dalam menghasilkan keuntungan tetapi juga bermanfaat bagi masyarakat dan lingkungan.

Penelitian Karaman dan Akman (2018) menyimpulkan kebijakan CSR yang menjadi perhatian berpotensi mempengaruhi semua pihak. Dalam industri penerbangan, di mana konsumennya adalah jutaan orang biasa, nilai yang dibawa oleh CSR bisa menjadi sangat penting. Persepsi positif penumpang terhadap program CSR perusahaan penerbangan secara signifikan meningkatkan kepercayaan dan loyalitas. Penelitian Maon, Swaen, dan Lindgreen (2017) menyimpulkan dari seluruh pendekatan dan terminologi, gagasan umum CSR adalah bahwa perusahaan tidak dapat hanya peduli dengan keuntungan yang terus meningkat. Selain tugas ekonomi dan hukum, mereka memiliki tanggung jawab etis dan kebijaksanaan kepada masyarakat, yang mencerminkan persyaratan, harapan, dan keinginan dari berbagai pemangku kepentingan di lingkungan industri dan sosial tempat mereka beroperasi.

Masalah baru yang timbul saat ini adalah mengenai pemahaman *corporate social responsibility* bagi sebuah perusahaan diartikan hanya sekedar menjalankan sebuah kewajiban berdasarkan ketentuan dalam UU No. 40 tahun 2007. Sehingga perusahaan hanya tahu bahwa program yang dijalankan tersebut sebagai sebuah kewajiban saja, tanpa mengetahui dan memahami esensi dari apa yang disebut dengan *corporate social responsibility*. Berdasarkan landasan payung hukum dan fenomena yang telah dijelaskan di atas, maka peneliti tertarik untuk mengadakan sebuah penelitian berjudul **“Evaluasi Pelaksanaan Program Corporate Social Responsibility (CSR) PT. RAPP Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan”**.

1.2. Rumusan Masalah

Dalam penelitian ini penulis mengangkat permasalahan sebagai berikut:

- 1) Bagaimanakah evaluasi pelaksanaan program *Corporate Social Responsibility* (CSR) PT. RAPP Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan?
- 2) Apa faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan program *Corporate Social Responsibility* (CSR) PT. RAPP Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Untuk mengevaluasi pelaksanaan program *Corporate Social Responsibility* (CSR) PT. RAPP Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan.
- 2) Untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan program *Corporate Social Responsibility* (CSR) PT. RAPP Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan.

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1) Manfaat teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan sumbangan pemikiran dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dibidang ilmu administrasi publik dalam kajian *corporate social responsibility* atau tanggungjawab sosial perusahaan.
- 2) Manfaat praktis penelitian ini dapat memberikan masukan yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan pengambilan keputusan terutama dalam hal peningkatan pelaksanaan program *corporate social responsibility* (CSR) pada PT. RAPP Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan.
- 3) Manfaat akademis penelitian ini diharapkan dapat memberikan pertimbangan dan masukan kepada pihak-pihak yang terkait dengan penelitian dan bahan referensi bagi penulis yang ingin melanjutkan penelitian yang sama.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

2.1. Tinjauan Pustaka

2.1.1. Konsep Administrasi dan Administrasi Publik

Administrasi secara harfiah berasal dari “*ad*” dan “*ministrase*” yang artinya mengelola, mengurus, memelihara, mengendalikan, dan memerintah. Administrasi adalah cabang penelitian ilmu sosial yang mencakup seluruh proses banyak orang dalam suatu organisasi yang bekerja sama untuk mencapai satu atau lebih tujuan yang dicapai sebelumnya (Kartono, 2016:13). Menurut Siagian (2015:5) Administrasi adalah proses pelaksanaan suatu keputusan, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan.

Menurut Sinambela (2011:4) administrasi publik dapat diartikan sebagai proses pelaksanaan keputusan untuk membantu keperluan orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan. Menurut Syafiie (2010:15) administrasi dapat diartikan dalam arti luas dan sempit. Dalam arti luas yaitu kerjasama banyak orang untuk mencapai suatu tujuan bersama, sedangkan dalam arti sempit adalah administrasi sebagaimana yang sering kita dengar sehari-sehari yaitu kegiatan tata usaha.

Menurut Gie (dalam Susiani, 2019:1) administrasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok orang dalam bentuk kerjasama untuk mencapai tujuan tertentu. Sehingga dalam administrasi melibatkan proses, kegiatan dan dinamika

kerjasama manusia. Oleh sebab itu dalam administrasi melibatkan tiga unsur pokok yaitu kegiatan melibatkan dua orang atau lebih, kegiatan yang dilakukan secara bersamaan dan ada tujuan tertentu yang hendak dicapai.

2.1.2. Konsep Organisasi dan Organisasi Publik

Menurut Winardi (2003:2) mengatakan bahwa organisasi membantu manusia melakukan hal-hal atau kegiatan-kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan dengan baik oleh manusia secara individu. Dengan demikian didesain oleh manusia untuk mengatasi keterbatasan-keterbatasan yang melekat pada dirinya. Keterbatasan-keterbatasan itulah yang menjadi alasan mengapa manusia merupakan makhluk yang hidup berkelompok, yang mengandung makna bahwa manusia senantiasa menginginkan hubungan-hubungan dengan orang lain.

Selanjutnya Thoha (2013:17) memaknai organisasi sebagai kolektifitas orang-orang yang bekerjasama secara sadar dan sengaja untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam pencapaian tujuan efektifitas suatu organisasi, sumber daya manusia dan perilaku manusia muncul sebagai pusat perhatian dan usaha-usaha untuk meningkatkan efektifitas harus selalu mulai dengan meneliti perilaku ditempat kerja.

Menurut Duha (2018:2) organisasi adalah sebuah kesatuan yang terbentuk oleh beberapa orang yang mempunyai sedikit atau banyak kesamaan terkait latar belakang, identitas, harapan dan banyak hal lain yang bertujuan mencapai kesepakatan secara bersama. Selanjutnya William G. Scott (dalam Kartono 2016:13) memberikan uraian mengenai organisasi yaitu organisasi formal merupakan sistem kegiatan-kegiatan terkoordinasi dari sekelompok orang yang

bekerjasama secara bersama-sama menuju kearah tujuan bersama dibawah kewenangan dan kepemimpinan.

Fahmi (2013:1) memandang organisasi publik sebagai sebuah wadah yang memiliki multi peran dan didirikan dengan tujuan memberikan serta mewujudkan keinginan berbagai pihak, dan tidak terkecuali kepuasan bagi pemiliknya. Menurut Wibowo (2016:2) organisasi publik adalah tipe organisasi yang bertujuan menghasilkan pelayanan kepada masyarakat, tanpa membedakan status dan kedudukannya. Menurut Karyoto (2016:29) organisasi publik mencakup berbagai elemen yang terdiri dari tujuan yang ingin dicapai, pekerjaan, sumber daya dan lokasi yang memadai.

2.1.3. Konsep Kebijakan dan Kebijakan Publik

Menurut Nugroho (2014:126) kebijakan adalah serangkaian tindakan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu, dengan ancaman dan peluang yang ada, di mana kebijakan yang diusulkan tersebut ditujukan untuk memanfaatkan potensi sekaligus mengatasi hambatan yang ada dalam rangka mencapai tujuan tertentu.

Menurut Pasolong (2012:144) kebijakan publik sebagai hasil rumusan dari suatu pemerintahan. Dalam pandangan ini, kebijakan publik lebih dipahami sebagai apa yang dikerjakan oleh pemerintah dibandingkan daripada proses hasil yang dibuat. Dengan demikian, kebijakan dapat dinyatakan sebagai usaha untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu, sekaligus sebagai upaya pemecahan masalah dengan menggunakan sarana-sarana tertentu, dan dalam tahapan waktu tertentu. Kebijakan umumnya bersifat mendasar, karena kebijakan hanya menggariskan

pedoman umum sebagai landasan bertindak dalam usaha mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Mengenai kebijakan publik, lebih lanjut Wahab (2010) menyatakan bahwa:

- a) Kebijakan publik lebih merupakan tindakan sadar yang berorientasi pada pencapaian tujuan daripada sebagai perilaku/ tindakan yang dilakukan secara acak dan kebetulan;
- b) kebijakan publik pada hakekatnya terdiri dari tindakan-tindakan yang saling berkaitan dan memiliki pola tertentu yang mengarah pada pencapaian tujuan tertentu yang dilakukan oleh pemerintah, dan bukan merupakan keputusan yang berdiri sendiri;
- c) kebijakan publik berkenaan dengan aktivitas/ tindakan yang sengaja dilakukan secara sadar dan terukur oleh pemerintah dalam bidang tertentu;
- d) kebijakan publik dimungkinkan bersifat positif dalam arti merupakan pedoman tindakan pemerintah yang harus dilakukan dalam menghadapi suatu masalah tertentu, atau bersifat negatif dalam arti merupakan keputusan pejabat pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu.

2.1.4. Konsep Evaluasi

Evaluasi mempunyai definisi yang beragam, William N. Dunn (2015:608), memberikan arti pada istilah evaluasi bahwa: Secara umum istilah evaluasi dapat disamakan dengan penaksiran (*appraisal*), pemberian angka (*rating*) dan penilaian (*assessment*), kata-kata yang menyatakan usaha untuk menganalisis hasil kebijakan dalam arti satuan nilainya. Dalam arti yang lebih spesifik, evaluasi

berkenaan dengan produksi informasi mengenai nilai atau manfaat hasil kebijakan.

Adapun menurut Ndraha (2013:201), evaluasi merupakan proses perbandingan antara standar dengan fakta dan analisa hasilnya. Evaluasi kebijakan pemerintah dapat dikatakan sebagai dasar apakah kebijakan yang ada layak untuk dilanjutkan, direvisi atau bahkan dihentikan sama sekali.

Anderson (dalam Arikunto dan Abdul Jabar, 2008:1) memandang evaluasi sebagai sebuah proses menentukan hasil yang telah dicapai beberapa kegiatan yang direncanakan untuk mendukung tercapainya tujuan. Pengertian lebih khusus diberikan Winarno (2016:154), evaluasi biasanya ditujukan untuk menilai sejauhmana keefektifan kebijakan publik guna dipertanggungjawabkan kepada konstituennya. Evaluasi adalah proses penetapan secara sistematis tentang nilai, tujuan, efektifitas atau kecocokan sesuatu sesuai dengan kriteria dan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Proses penetapan keputusan itu didasarkan atas perbandingan secara hati-hati terhadap data yang diobservasi dengan menggunakan standar tertentu yang telah dibakukan.

Menurut William N Dunn (dalam Nugroho, 2016:155) pengukuran evaluasi harus melibatkan 6 kriteria utama yaitu:

- a. Efektivitas, hal ini berkaitan dengan hasil yang diharapkan dan hasil yang sesungguhnya dicapai. Efektivitas berkenaan dengan apakah suatu alternatif mencapai hasil (akibat) yang diharapkan, atau mencapai tujuan dari diadakannya tindakan yang secara dekat berhubungan dengan rasionalitas teknis, selalu diukur dari unit produk atau layanan atau nilai moneterinya.

- b. Efisiensi, hal ini berkaitan dengan usaha yang dilakukan untuk menghasilkan tingkat efektivitas tertentu dan sasaran tercapai dengan biaya yang sesuai. Efisiensi berkenaan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk menghasilkan tingkat efektivitas tertentu. Efisiensi yang merupakan sinonim dari rasionalitas ekonomi, adalah merupakan hubungan antara efektivitas dan usaha, yang terakhir umumnya diukur dari ongkos moneter. Efisiensi biasanya ditentukan melalui perhitungan biaya per unit produk atau layanan. Kebijakan yang mencapai efektivitas tertinggi dengan biaya terkecil dinamakan efisien.
- c. Kecukupan, hal ini berkaitan dengan memuaskan kebutuhan, memiliki nilai, dan menciptakan kesempatan. Kecukupan masih berhubungan dengan efektivitas dengan mengukur atau memprediksi seberapa jauh alternatif yang ada dapat memuaskan kebutuhan, nilai atau kesempatan dalam menyelesaikan masalah yang terjadi.
- d. Perataan, hal ini berkaitan dengan adil, memaksimalkan dan kesejahteraan individu. Kesamaan atau perataan erat berhubungan dengan rasionalitas legal dan sosial dan menunjuk pada distribusi akibat dan usaha antara kelompok-kelompok yang berbeda dalam masyarakat.
- e. Responsivitas, hal ini berkaitan dengan adanya dukungan masyarakat dan memuat nilai kelompok. Keberhasilan kebijakan dapat dilihat melalui tanggapan masyarakat atas pelaksanaannya setelah terlebih dahulu memprediksi pengaruh yang akan terjadi jika suatu kebijakan akan dilaksanakan. Tanggapan masyarakat setelah dampak kebijakan sudah mulai

dapat dirasakan dapat dalam bentuk yang positif berupa dukungan ataupun wujud yang negatif berupa penolakan. Dunn pun mengemukakan bahwa kriteria responsivitas adalah penting karena analisis yang dapat memuaskan semua kriteria lainnya.

- f. Ketepatan, hal ini berkaitan dengan hasil kebijakan yang bermanfaat. Kriteria yang dipakai untuk menseleksi sejumlah alternatif untuk dijadikan rekomendasi dengan menilai apakah hasil dari alternatif yang direkomendasikan tersebut merupakan pilihan tujuan yang layak. Kriteria kelayakan dihubungkan dengan rasionalitas substantif, karena kriteria ini menyangkut substansi tujuan bukan cara atau instrumen untuk merealisasikan tujuan tersebut

Evaluasi diperlukan untuk melihat kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Ada beberapa hal yang penting diperhatikan dalam definisi tersebut menurut Winarno (2016:155), yaitu:

- 1) Bahwa penilaian merupakan fungsi organik karena pelaksanaan fungsi tersebut turut menentukan mati hidupnya suatu organisasi.
- 2) Bahwa penilaian itu adalah suatu proses yang berarti bahwa penilaian adalah kegiatan yang terus menerus dilakukan oleh administrasi dan manajemen
- 3) Bahwa penilaian menunjukkan jurang pemisah antara hasil pelaksanaan yang sesungguhnya dengan hasil yang seharusnya dicapai. (Edi Suharto, 2008:14)

2.1.5. Konsep *Corporate Social Responsibility* (CSR)

1) Pengertian *Corporate Social Responsibility*

Menurut Pearce dan Robinson (2013:55) *corporate social responsibility* (CSR) atau tanggung jawab sosial adalah “niat baik dan komitmen dari perusahaan untuk memberikan kontribusi terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat lokal” dan kegiatan ini berawal dengan membangun hubungan yang harmonis antara perusahaan dengan lingkungannya.

Menurut Kast (2013:112) mendefinisikan tanggung jawab sosial perusahaan (*corporate social responsibility*) sebagai bentuk keterlibatan dari organisasi dalam upaya mengatasi kelaparan dan kemiskinan, mengurangi pengangguran dan tunjangan untuk pendidikan dan kesenian. Hal ini didasari pemikiran bahwa semua organisasi adalah sistem yang bergantung pada lingkungannya dan karena ketergantungan itulah maka suatu organisasi perlu memperhatikan pandangan dan harapan masyarakat.

Menurut Rudito dan Famiola (2013:103) *corporate social responsibility* merupakan peningkatan kualitas kehidupan mempunyai arti adanya kemampuan manusia sebagai individu anggota masyarakat untuk dapat menanggapi keadaan sosial yang ada, dan dapat menikmati serta memanfaatkan lingkungan hidup termasuk perubahan-perubahan yang ada sekaligus memelihara. Atau dengan kata lain merupakan cara perusahaan mengatur proses usaha untuk memproduksi dampak positif pada masyarakat. Atau dapat dikatakan sebagai proses penting dalam pengaturan biaya yang dikeluarkan dan keuntungan kegiatan bisnis dari *stakeholders* baik secara internal (pekerja, *shareholders* dan penanam modal)

maupun eksternal (kelembagaan pengaturan umum, anggota-anggota masyarakat, kelompok masyarakat sipil dan perusahaan lain).

Menurut Kotler & Nancy (2015:4) *corporate social responsibility* adalah komitmen perusahaan untuk meningkatkan kesejahteraan komunitas melalui praktik bisnis yang baik dan berkontribusi sebagian sumber daya perusahaan. Menurut Budimanta, Prasetyo & Rudito (2014:72) *corporate social responsibility* diartikan sebagai komitmen usaha untuk bertindak etis, beroperasi secara legal dan berkontribusi untuk peningkatan ekonomi bersamaan dengan peningkatan kualitas hidup dari karyawan dan keluarganya, komunitas lokal dan masyarakat secara lebih luas.

Menurut Fajar (2010:13) *corporate social responsibility* adalah niat baik dan komitmen dari perusahaan untuk memberikan kontribusi terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat, keberlanjutan pengembangan masyarakat, ekonomi lokal sehingga memberikan kontribusi juga terhadap keberlanjutan perusahaan. Kegiatan tersebut dilakukan bekerjasama antara perusahaan dengan karyawan, keluarga mereka, komunitas lokal (masyarakat) dan lingkungan secara luas dalam kegiatan tersebut harus dimulai dengan membangun hubungan yang harmonis antara perusahaan dan lingkungannya dalam arti yang luas.

Menurut Suharto (2009:105) *corporate social responsibility* adalah kepedulian perusahaan yang menyisihkan sebagian keuntungannya (*profit*) bagi kepentingan pembangunan manusia (*people*) dan lingkungan (*planet*) secara berkelanjutan berdasarkan prosedur (*procedure*) yang tepat dan profesional. Wibisono (2007:8) menambahkan, *corporate social responsibility* adalah sebagai

bisnis yang dilakukan secara transparan dan terbuka serta berdasarkan pada nilai-nilai moral dan menjunjung tinggi rasa hormat kepada karyawan, komunitas dan lingkungan.

Berdasarkan berbagai penjelasan ahli di atas, maka dapat disimpulkan yang dimaksud dengan *corporate social responsibility* adalah komitmen perusahaan untuk memberikan kontribusi jangka panjang terhadap satu isu tertentu di masyarakat atau lingkungan untuk dapat menciptakan lingkungan yang lebih baik. Kontribusi dari perusahaan ini bisa berupa banyak hal, misalnya bantuan dana, bantuan tenaga ahli dari perusahaan, bantuan berupa barang, dan lainnya.

2) Elemen Penting dalam *Corporate Social Responsibility*

Menurut Goodland (2002:2) terdapat elemen penting dalam *corporate social responsibility* yaitu:

1) *Social sustainability* (keberlanjutan sosial)

Keberlanjutan sosial berarti memelihara modal sosial. Modal sosial adalah investasi dan jasa yang menciptakan kerangka dasar bagi masyarakat. Hal ini menurunkan biaya bekerja bersama dan memfasilitasi kerjasama, menurunkan kepercayaan biaya transaksi. Hanya partisipasi sistematis komunitas dan masyarakat sipil yang kuat, termasuk pemerintah dapat mencapai hal ini. Kohesi komunitas untuk saling diuntungkan, keterhubungan antara kelompok masyarakat, timbal balik, toleransi, kasih sayang, kesabaran, persekutuan, cinta, standar yang diterima secara umum kejujuran, disiplin dan etika.

Berdirinya sebuah perusahaan di tengah-tengah masyarakat menimbulkan dampak terhadap masyarakat tersebut. Dengan adanya tanggung jawab sosial perusahaan/ CSR terhadap masyarakat, perusahaan akan mendapat rasa aman dan nyaman dalam menjalankan kegiatan usahanya. *Social sustainability* terkait upaya perusahaan untuk mengutamakan nilai-nilai yang tumbuh dalam masyarakat. *Sustainability* ini diupayakan dengan cara mendukung upaya-upaya kesehatan masyarakat, penegakan hak asasi manusia, pembangunan kawasan suatu negara, dan melakukan persaingan usaha yang sehat.

2) *Economic sustainability* (keberlanjutan ekonomi)

Keberlanjutan ekonomi adalah pemeliharaan modal, atau menjaga modal utuh. Jadi definisi pendapatan jumlah yang dapat dikonsumsi selama periode dan masih juga turun di akhir keberlanjutan ekonomi, karena mengkonsumsi nilai tambah (bunga), daripada modal. Keberlanjutan ekonomi ini menilai segala sesuatu dari segi keuangan, dan memiliki masalah besar pada tanggungjawab yang tidak berwujud, antar generasi, terutama sumber daya akses umum seperti udara. Hal ini dipertaruhkan untuk kebijakan ekonomi perusahaan dalam mengantisipasi ketidakpastian dan resiko yang muncul.

Tujuan dasar sebuah perusahaan didirikan adalah untuk mencari keuntungan. Tanggung jawab sosial perusahaan/ CSR tidak berarti menjalankan kegiatan sosial dan pelestarian lingkungan hingga mempengaruhi keuntungan perusahaan. *Sustainability* ekonomi perusahaan

merupakan dasar bagi perusahaan untuk menjaga *sustainability* sosial dan lingkungan. *Sustainability* ekonomi dicapai dengan cara memperoleh keuntungan, meminimalkan biaya dan memaksimalkan penjualan, membuat kebijakan-kebijakan bisnis yang strategis serta menjanjikan pengembalian yang menarik bagi para investor.

3) *Environment sustainability* (keberlanjutan lingkungan)

Keberlanjutan lingkungan hidup sendiri berusaha untuk meningkatkan kesejahteraan manusia dengan melindungi dan mengontrol keuangan. Hampir kontras dengan modal ekonomi, keberlanjutan lingkungan hidup terdiri dari air, tanah, udara, mineral dan kualitas ekosistem, maka banyak yang dikonversi menjadi modal diproduksi atau ekonomi. Lingkungan termasuk sumber bahan baku yang digunakan untuk kebutuhan manusia, dan memastikan bahwa kapasitas kebutuhan daur ulang dari limbah manusia tidak melewati batas, untuk mencegah kerusakan alam yang berakibat pada manusia.

Lingkungan yang baik, sehat, bersih, dan terpelihara merupakan harapan semua pihak. Isu mengenai kelestarian lingkungan merupakan isu besar dan menjadi isu global yang masih terus diserukan untuk diupayakan terwujudnya. Dalam setiap permasalahan lingkungan yang terjadi, salah satu pihak yang disalahkan adalah perusahaan. Aktivitas industri perusahaan dituding sebagai penyebab utama terjadinya berbagai permasalahan lingkungan. Selain dari aktifitas industri perusahaan, penyebab masalah lingkungan juga timbul dari produk yang dihasilkan oleh kegiatan usaha

suatu perusahaan. Banyaknya tuntutan dari masyarakat, lembaga swadaya masyarakat (LSM), pemerhati lingkungan, dan organisasi internasional lainnya agar perusahaan memperhatikan masalah lingkungan menguatkan argumen bahwa kelangsungan hidup sebuah perusahaan sangat tergantung pada sustainability lingkungan. Masalah pelestarian lingkungan ini penting khususnya perusahaan yang bergerak di bidang sumber daya alam. Sustainability lingkungan oleh perusahaan dijaga dengan beberapa cara antara lain dengan menggunakan teknologi yang ramah lingkungan demi mengurangi emisi gas buang, pengimplementasian sistem manajemen risiko lingkungan yang efektif, menerapkan prinsip-prinsip eco-labeling dan lain-lain.

3) **Bentuk *Corporate Social Responsibility***

Menurut Murdiyanto dan Kundarto (2012:71) kegiatan program yang dilakukan oleh perusahaan dalam konteks tanggung jawab sosialnya dapat dikategorisasikan dalam tiga bentuk, yaitu:

1) *Public relation*

Usaha untuk menanamkan persepsi positif kepada masyarakat tentang kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan. Biasanya berbentuk kampanye yang tidak terkait sama sekali dengan produk yang dihasilkan oleh perusahaan yang bersangkutan.

2) Strategi defensif

Usaha yang dilakukan perusahaan guna menangkis anggapan negatif masyarakat luas yang sudah tertanam terhadap kegiatan perusahaan terhadap

karyawannya, dan biasanya untuk melawan ‘serangan’ negatif dari anggapan komunitas atau masyarakat yang sudah terlanjur berkembang.

- 3) Keinginan tulus untuk melakukan kegiatan yang baik yang benar-benar berasal dari visi perusahaan itu.

Melakukan program untuk kebutuhan masyarakat atau komunitas sekitar perusahaan atau kegiatan perusahaan yang berbeda dari hasil dari perusahaan itu sendiri. Biasanya bentuk keinginan tulus suatu perusahaan dalam kegiatan tanggung jawab sosialnya adalah berkaitan erat dengan kebudayaan perusahaan yang berlaku (*corporate culture*).

Zadek et al. (dalam Glautier dan Underdown, 2001:367) membagi tanggung jawab sosial perusahaan menjadi enam bagian yaitu :

- 1) *Environmental protection*

Adalah upaya untuk melindungi lingkungan dari kerusakan yang meliputi aspek lingkungan dalam produksi, mencegah polusi selama proses produksi, mencegah atau memperbaiki kerusakan lingkungan akibat dari proses sumber daya alam dan peremajaan sumber daya alam yang digunakan. Tujuan sosial perusahaan dapat ditemukan dalam usaha menanggulangi efek sosial perusahaan yang berdampak negatif dan dalam mengadopsi teknologi yang lebih efisien untuk meminimalkan penggunaan sumber daya alam yang tidak bisa digantikan dan produksi limbah.

2) *Energy saving*

Meliputi efisiensi energi dalam hubungannya dengan operasi bisnis dan meningkatkan efisiensi konsumsi energi dari pemakaian produk yang dihasilkan perusahaan.

3) *Human resources*

Berhubungan dengan aktivitas-aktivitas para pihak yang ada dalam perusahaan dan menguntungkan pihak manajemen dalam perusahaan.

4) *Fair business practice*

Memusatkan perhatian pada hubungan antara perusahaan dengan kelompok kepentingan khusus tertentu. Berhubungan dengan hal pemberian kerja dan kemajuan pihak-pihak minoritas, penggunaan tata cara yang legal saat berhubungan dengan pemasok dan pelanggan, dan pemberian label yang jelas pada setiap produk.

5) *Community involvement*

Meliputi aktivitas yang melibatkan dan berhubungan dengan masyarakat serta menguntungkan masyarakat.

6) *Product*

Menyangkut aspek kualitatif dari produk yang dihasilkan, misalnya keamanan dan jangka waktu pemakaian, termasuk kepuasan pelanggan, pengemasan, dan pelabelan produk.

Menurut Anatan (2009:55) terdapat sembilan program kerja yang dapat dilakukan perusahaan dalam melaksanakan CSR, yaitu :

1) *Employee Programs*

Jaminan untuk karyawan perlu diperluas sehingga tidak hanya dari sisi jaminan kesehatan dan keselamatan kerja, tetapi perlu adanya perluasan program seperti *work life balance program* dan *decision making empowerment program*.

2) *Community and Broader Society*

Implementasi pemberdayaan masyarakat dapat dilaksanakan melalui proyek-proyek pembangunan yang memungkinkan anggota masyarakat memperoleh dukungan dalam memenuhi kebutuhan. Selanjutnya juga melalui kampanye dan aksi sosial yang memungkinkan kebutuhan-kebutuhan tersebut dapat dipenuhi oleh pihak-pihak lain yang bertanggungjawab.

3) *Environment Programs*

Program yang berkaitan dengan pemeliharaan lingkungan, misalnya dengan menghasilkan produk yang aman, tidak berbahaya bagi kesehatan, dan ramah lingkungan.

4) *Reporting and Communication*

Programs Perusahaan melaporkan hasil kegiatan CSRnya melalui annual CSR report, sehingga terdapat bukti riil partisipasi perusahaan dalam melaksanakan tanggungjawab sosialnya.

5) *Governance or Code of Conduct*

Programs Perusahaan menitikberatkan kegiatan sosial yang dilakukan berdasarkan sistem yang diatur oleh pemerintah. Hal utama yang harus

diperhatikan adalah bagaimana stakeholders, pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha dapat membuat ketentuan yang disepakati bersama untuk mengefektifkan program CSR.

6) *Stakeholder Engagement Programs*

Upaya menciptakan “*effective engagement program*” sebagai kunci utama untuk mencapai kesuksesan strategi CSR dan sustainability strategy.

7) *Supplier Programs*

Pembinaan hubungan yang baik atas dasar kepercayaan, komitmen, pembagian informasi antara perusahaan dengan mitra bisnisnya, misalnya melalui pengelolaan rantai pasokan atau jejaring bisnis.

8) *Customer/Product Stewardship*

Programs Perlunya perhatian perusahaan terhadap keluhan konsumen dan jaminan kualitas produk yang dihasilkan perusahaan.

9) *Shareholder Programs*

Program meningkatkan share value bagi shareholder, karena shareholder merupakan prioritas bagi perusahaan.

Kartini (2009:63-73) menyebutkan ada enam kategori aktivitas CSR, yaitu: *cause promotions, cause related marketing, corporate societal marketing, corporate philanthropy, community volunteering, dan socially responsible business practice.*

1) Promosi Kegiatan Sosial (*Cause Promotions*)

Dalam aktivitas CSR ini, perusahaan menyediakan dana atau sumber dana lainnya yang dimiliki perusahaan untuk meningkatkan kesadaran

masyarakat terhadap suatu kegiatan sosial atau untuk mendukung pengumpulan dana, partisipasi dari masyarakat atau perekerutan tenaga sukarela untuk suatu kegiatan tertentu. Keuntungan yang di peroleh perusahaan degan melaksanakan cause promotions ini adalah dapat memperkuat positioning merk perusahaan, menciptakan jalan bagi ekspresi loyalitas konsumen, memberikan peluang kepada karyawan untuk turut terlibat dalam kegiatan sosial, menciptakan kerjasama antar perusahaan, dan dapat meningkatkan citra perusahaan.

2) Pemasaran Terkait Kegiatan Sosial (*cause related marketing*)

Dalam aktivitas CSR ini, perusahaan memiliki komitmen untuk menyumbangkan presentase tertentu dari penghasilannya untuk suatu kegiatan social berdasarkan besarnya penjualan produk. Keuntungan dengan melaksanakan cause related marketing adalah dapat menarik pelanggan baru, menjangkau relung pasar, meningkatkan penjualan dan membangun identitas merk yang positif.

3) Pemasaran kemasyarakatan korporat (*Corporate Societal Marketing*)

Dalam aktivitas CSR ini, perusahaan mengembangkan dan melaksanakan kampanye untuk mengubah perilaku masyarakat dengan tujuan meningkatkan kesehatan dan keselamatan publik, menjaga kelestarian lingkungan hidup serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Keuntungan dari melaksanakan corporate societal marketing adalah menunjang positioning merk perusahaan, menciptakan preferensi merk, mendorong

peningkatan penjualan, menarik mitra dan memberikan dampak nyata terhadap perubahan sosial.

4) Kegiatan filantropi perusahaan (*corporate philanthropy*)

Dalam aktivitas CSR ini, perusahaan memberikan sumbangan langsung dalam bentuk derma untuk kalangan masyarakat tertentu. Baik dalam bentuk uang tunai, paket, ataupun pelayanan secara cuma-cuma. Kegiatan ini tentunya memberikan keuntungan bagi perusahaan, keuntungan tersebut diantaranya dapat meningkatkan reputasi perusahaan, memperkuat bisnis dimasa depan, memberi dampak penyelesaian masalah sosial dalam komunitas lokal.

5) Pekerja sosial kemasyarakatan secara sukarela (*community volunteering*)

Dalam aktivitas CSR ini, perusahaan mendukung serta mendorong para karyawan, rekan pedagang eceran atau para pemegang franchise agar menyisihkan waktu mereka secara sukarela guna membantu organisasi organisasi masyarakat lokal maupun masyarakat yang menjadi sasaran pogram. Kegiatan ini dapat membangun hubungan yang mulus antara perusahaan dan komunitas, memberikan kontribusi terhadap pencapaian tujuan perusahaan, serta meningkatkan kepuasan dan motivasi karyawan.

6) Praktik bisnis yang memiliki tanggung jawab sosial (*Socially responsible business practice*)

Dalam aktivitas CSR ini, perusahaan melaksanakan aktivitas bisnis melampaui aktivitas bisnis yang diwajibkan oleh hukum serta melaksanakan investasi yang mendukung kegiatan sosial dengan tujuan meningkatkan

kesejahteraan komunitas dan memelihara lingkungan hidup. Keuntungan yang diperoleh dengan melakukan *socially responsible business practice* adalah memberikan kontribusi untuk keberlanjutan lingkungan hidup, meningkatkan kesan baik terhadap perusahaan, dan meningkatkan kepuasan pelanggan.

4) **Tingkatan Corporate Social Responsibility**

Menurut Hasibuan (2011:25) membagi areal tanggung jawab perusahaan dalam tiga level yang digambarkan sebagai berikut:

1) *Basic Responsibility*

Level ini menghubungkan tanggungjawab awal dari suatu perusahaan yang muncul karena keberadaan perusahaan tersebut, seperti: membayar pajak, mematuhi hukum, memenuhi standar pekerjaan dan memuaskan pemegang saham. Bila pada level ini tanggung jawab tidak terpenuhi maka akan timbul dampak yang sangat serius.

2) *Organizational Responsibility*

Level ini menunjukkan tanggung jawab perusahaan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan stakeholder seperti pekerja, konsumen, pemegang saham dan masyarakat sekitar.

3) *Societal Responses*

Level ini menjelaskan tahap ketika interaksi antara bisnis dan kekuatan lain dalam masyarakat yang demikian kuat sehingga perusahaan dapat tumbuh dan berkembang secara berkesinambungan, terlibat dengan apa yang terjadi dalam lingkungannya secara keseluruhan.

Menurut Murdiyanto (2012:47-49) terdapat tiga tingkat kegiatan program CSR dalam usaha memperbaiki kesejahteraan masyarakat yakni :

1) Kegiatan program CSR yang bersifat *charity*

Bentuk kegiatan seperti ini ternyata dampaknya terhadap masyarakat hanyalah menyelesaikan masalah sesaat. Hampir tidak ada dampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, selain lebih mahal, dampak jangka panjang tidak optimal untuk membentuk citra perusahaan, dari sisi biaya, promosi kegiatan sama mahalannya dengan biaya publikasi kegiatan. Walaupun masih sangat relevan, tetapi untuk kepentingan perusahaan dan masyarakat dalam jangka panjang lebih dibutuhkan pendekatan CSR yang berorientasi pada peningkatan produktifitas dan mendorong kemandirian masyarakat.

2) Kegiatan program CSR yang membantu usaha kecil secara parsial

Saat ini makin banyak perusahaan yang menyadari pentingnya pendekatan CSR yang berorientasi pada peningkatan produktifitas dan mendorong kemandirian masyarakat, salah satu bentuk kegiatannya adalah membantu usaha kecil, tetapi bentuk kegiatan perkuatan tersebut masih parsial, memisahkan kegiatan program yang bersifat pendidikan, ekonomi, infrastruktur dan kesehatan. Walaupun lebih baik ternyata pada tingkat masyarakat kegiatan ini tidak dapat diharapkan berkelanjutan, bahkan cenderung meningkatkan kebergantungan masyarakat pada perusahaan, sehingga efek pada pembentukan citra ataupun usaha untuk menggalang kerjasama dengan masyarakat tidak didapat secara optimal.

- 3) Kegiatan program CSR yang berorientasi membangun daya saing masyarakat

Dari awal dirancang untuk meningkatkan produktifitas (sebagai ukuran data saing) guna meningkatkan daya beli sehingga meningkatkan akses pada pendidikan dan kesehatan jangka panjang, untuk itu perlu diberikan penekanan pada keberlanjutan penguatan ekonomi secara mandiri (berjangka waktu yang jelas/ mempunyai *exit policy* yang jelas). Untuk memberikan ungkitan besar pada pendapatan masyarakat maka kegiatan perkuatan dilakukan pada rumpun usaha spesifik yang saling terkait dalam rantai nilai, setiap pelaku pada mata rantai nilai pada dasarnya adalah organ ekonomi yang hidup, perkuatan dilakukan untuk meningkatkan metabolisme (aliran barang, jasa, uang, informasi dan pengetahuan) dalam sistem yang hidup tersebut yang pada gilirannya akan meningkatkan *performance* setiap organ. Pendekatan CSR yang cerdas (*smart*) adalah dengan mengambil peran sebagai fasilitatif-katalistik sehingga kegiatan CSR lebih efisien memberikan dampak pada rumpun usaha dalam satu rantai nilai.

- 5) ***Model Corporate Social Responsibility***

Menurut Saidi & Abidin (2014:48) ada empat model pola *corporate social responsibility* yaitu:

- 1) Keterlibatan langsung

Perusahaan menjalankan program TJSP secara langsung dengan menyelenggarakan sendiri kegiatan sosial atau menyerahkan sumbangan ke masyarakat tanpa perantara.

2) Melalui yayasan atau organisasi sosial perusahaan

Perusahaan mendirikan yayasan sendiri dibawah perusahaan atau grupnya.

3) Bermitra dengan pihak lain

Perusahaan menyelenggarakan TJSP melalui kerjasama dengan lembaga sosial atau organisasi pemerintah, Instansi, Universitas atau media masa.

4) Mendukung atau bergabung dalam suatu konsorsium

Perusahaan turut mendirikan menjadi anggota atau mendukung suatu lembaga sosial yang didirikan untuk tujuan sosial tertentu.

Susiloadi (dalam Tranggano, 2012:37) mengemukakan bahwa terdapat empat model pelaksanaan CSR yang paling umum dilakukan di Indonesia yaitu :

1) CSR yang dilaksanakan langsung oleh perusahaan/ organisasi perusahaan/ organisasi melaksanakan tanggung jawab sosialnya sendiri tanpa bantuan atau perantara dari pihak- pihak tertentu. Perusahaan memiliki satu divisi tersendiri atau bisa juga digabung dengan divisi lain yang bertanggungjawab pada pelaksanaan kegiatan sosial termasuk CSR. Perusahaan juga bisa menugaskan salah satu pejabat seniornya seperti dari divisi human resource development atau publik relation untuk pelaksanaan teknis.

2) Melalui yayasan atau organisasi sosial perusahaan Perusahaan memiliki yayasan sendiri yang bernaung dibawah perusahaan atau groupnya yang dibangun terpisah dari organisasi induk perusahaan namun harus tetap bertanggung jawab ke CEO atau dewan direksi perusahaan induk. Pendanaan dilakukan oleh perusahaan induk untuk diproses lebih lanjut oleh yayasan.

3) Mendukung atau bergabung dengan suatu konsorsium Perusahaan/ organisasi turut mendirikan, menjadi anggota dan mendukung lembaga sosial yang didirikan untuk tujuan sosial tertentu. Pihak konsorsium yang dipercaya perusahaan- perusahaan yang mendukungnya akan secara proaktif mencari kerjasama dari berbagai kalangan dan kemudian mengembangkan program yang telah disepakati.

4) Menjalankan CSR melalui kerjasama dan bermitra dengan pihak lain. Pelaksanaan CSR model ini terjadi ketika perusahaan/ organisasi menjalin kerjasama dengan pihak lain seperti perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, instansi pemerintah maupun organisasi-organisasi lainnya. Kerjasama dapat dilakukan dengan mengelola serta melaksanakan kegiatan sosial yang telah direncanakan oleh kedua belah pihak.

6) **Dampak Positif Pelaksanaan *Corporate Social Responsibility***

Menurut Wibisono (2007:41) dampak positif pada pelaksanaan CSR yaitu sebagai berikut:

- 1) Mempertahankan dan mendongkrak citra perusahaan yang sangat penting untuk menunjang keberhasilan perusahaan
- 2) Layak mendapatkan *social licence to operate* dari masyarakat sekitar, karena pada saat masyarakat mendapatkan keuntungan dari perusahaan, mereka merasa memiliki perusahaan, sehingga perusahaan dengan leluasa menjalankan roda bisnisnya di kawasan tersebut
- 3) Mereduksi resiko bisnis perusahaan yaitu mengelola resiko ditengah permasalahan perusahaan, jika terjadi permasalahan dalam perusahaan,

maka biaya *recovery* akan jauh berlipat dibandingkan dengan pelaksanaan program CSR.

- 4) Melebarkan akses sumber daya manusia yang dibutuhkan perusahaan.
 - 5) Memperluas akses pasar konsumen.
 - 6) Mereduksi biaya dengan mendaur ulang limbah pabrik ke dalam proses produksi.
 - 7) Peluang mendapatkan banyak penghargaan.
 - 8) Menjaga hubungan baik dengan stakeholder demi kesejahteraan masyarakat.
 - 9) Meningkatkan motivasi dan produktifitas karyawan karena perusahaan tempat bekerja sebagai pelaku CSR.
- 7) **Keuntungan *Corporate Social Responsibility* Bagi Perusahaan**

Menurut Molengraaff (2000:16), perusahaan adalah keseluruhan perbuatan yang dilakukan secara terus menerus, bertindak ke luar untuk memperoleh penghasilan, dengan cara memperdagangkan atau menyerahkan barang atau mengadakan perjanjian perdagangan. Rumusan tersebut hanya meliputi jenis usaha dan tidak meliputi perusahaan sebagai badan usaha. Perusahaan atau istilah Inggrisnya *eterprise* terdiri dari satu atau lebih unit-unit usaha yang disebut pabrik atau *bedriff* (dalam bahasa Belanda). Pengertian perusahaan disini maksudnya suatu lembaga yang diorganisasikan dan dijalankan untuk menyediakan barang atau jasa untuk masyarakat dengan motif atau insentif keuntungan. Selain sebagai suatu lembaga, perusahaan juga merupakan suatu wadah yang diorganisasikan, didirikan dan diterima dalam tata kehidupan masyarakat. Para

pengusaha harus berani menanggung risiko. Artinya, sebagai tujuan bersama dari setiap perusahaan adalah berusaha memperoleh laba berdasarkan rentabilitas.

Perusahaan dalam upayanya mencari laba tersebut harus berani menanggulangi risiko (artinya risiko rugi). Atas dasar itu perusahaan dapat memperoleh keuntungan dapat pula menderita kerugian. Hal ini tidak berlaku dalam lembaga-lembaga lain yang operasinya ditujukan untuk kepentingan umum dan bukan untuk memperoleh laba. Dalam ilmu Ekonomi, perusahaan dibedakan antara pengertian perusahaan dan unit usaha. Unit usaha adalah jenis usaha, tempat memproduksi atau membuat barang-barang yang disebut juga pabrik bertanggung jawab terhadap hasil barang-barang. Selain itu, perusahaan lebih menitikberatkan pada semua pengelolaan usaha, termasuk keuangan, produksi, dan pemasaran (Budimanta, Prasetijo & Rudito, 2014:11).

Terdapat tiga jenis perusahaan yang beroperasi untuk menghasilkan laba, yaitu perusahaan manufaktur (*manufacturing*), perusahaan dagang (*merchant-dising*), dan perusahaan jasa (*service*). Setiap jenis perusahaan ini mempunyai ciri-ciri masing-masing, yaitu:

- 1) Perusahaan manufaktur (*manufacturing business*): mengubah input dasar menjadi produk yang dijual kepada masing-masing pelanggan. Contoh perusahaan manufaktur: Honda, Intel, Nike, Sony, dan lainnya.
- 2) Perusahaan dagang (*merchandising business*): menjual produk ke pelanggan, namun produknya tidak diproduksi sendiri, melainkan membelinya dari perusahaan lain. Dengan kata lain, perusahaan dagang

mempertemukan produk dengan pembeli. Contoh perusahaan dagang: Electronic City, Amazon.com, dan lainnya.

- 3) Perusahaan jasa (*services business*): menghasilkan jasa dan bukan barang atau produk untuk pelanggan. Contoh perusahaan jasa: Garuda Indonesia, Telkomsel, dan lainnya.

Menurut Grigg (2014:19) bagi perusahaan yang dinilai mampu menerapkan *corporate social responsibility* secara optimal maka akan mendapatkan keuntungan sebagai berikut:

- 1) Layak mendapatkan *social licence to operate*

Masyarakat sekitar adalah komunitas utama perusahaan. Ketika mereka mendapatkan keuntungan dari perusahaan, maka dengan sendirinya mereka akan merasa memiliki perusahaan. Sehingga imbalan yang diberikan kepada perusahaan adalah keleluasaan untuk menjalankan roda bisnisnya di kawasan tersebut.

- 2) Mereduksi resiko bisnis perusahaan

Mengelola resiko di tengah kompleksnya permasalahan perusahaan merupakan hal yang esensial untuk suksesnya usaha. Disharmoni dengan stakeholders akan mengganggu kelancaran bisnis perusahaan. Bila sudah terjadi permasalahan, maka biaya untuk *recovery* akan jauh lebih berlipat bila dibandingkan dengan anggaran untuk melakukan program *corporate social responsibility*. Oleh karena itu, pelaksanaan CSR sebagai langkah preventif untuk mencegah memburuknya hubungan dengan stakeholders perlu mendapat perhatian.

3) Melebarkan akses sumber daya

Track records yang baik dalam pengelolaan CSR merupakan keunggulan bersaing bagi perusahaan yang dapat membantu memuluskan jalan menuju sumber daya yang diperlukan perusahaan.

4) Membentangkan akses menuju market

Investasi yang ditanamkan untuk program ini dapat menjadi tiket bagi perusahaan menuju peluang yang lebih besar. Termasuk di dalamnya memupuk loyalitas konsumen dan menembus pangsa pasar baru.

5) Mereduksi biaya

Banyak contoh penghematan biaya yang dapat dilakukan dengan melakukan CSR. Misalnya dengan mendaur ulang limbah pabrik ke dalam proses produksi. Selain dapat menghemat biaya produksi, juga membantu agar limbah buangan ini menjadi lebih aman bagi lingkungan.

6) Memperbaiki hubungan dengan stakeholder

Implementasi CSR akan membantu menambah frekuensi komunikasi dengan stakeholder, dimana komunikasi ini akan semakin menambah trust stakeholders kepada perusahaan.

7) Memperbaiki hubungan dengan regulator

Perusahaan yang melaksanakan CSR umumnya akan meringankan beban pemerintah sebagai regulator yang sebenarnya bertanggung jawab terhadap kesejahteraan lingkungan dan masyarakat.

- 8) Meningkatkan semangat dan produktivitas karyawan

Image perusahaan yang baik dimata stakeholders dan kontribusi positif yang diberikan perusahaan kepada masyarakat serta lingkungan, akan menimbulkan kebanggaan tersendiri bagi karyawan yang bekerja dalam perusahaan mereka sehingga meningkatkan motivasi kerja mereka.

- 9) Peluang mendapatkan penghargaan

Banyaknya penghargaan atau reward yang diberikan kepada pelaku CSR sekarang, akan menambah kans bagi perusahaan untuk mendapatkan *award*.

8) **Manfaat *Corporate Social Responsibility* Bagi Masyarakat**

Pelaksanaan CSR pada masyarakat sangatlah dibutuhkan karena dalam proses pembangunan masyarakat, untuk menanggulangi persoalan-persoalan sosial melibatkan 3 pilar ekonomi sebuah negara, yaitu pemerintah, masyarakat dan korporasi seperti yang diungkapkan oleh Budiono (dalam Mukti Fajar, 2009:228). Situasi ini karena pada faktanya, di era globalisasi dan ekonomi pasar saat ini, peran korporasi sangat dominan dalam masyarakat. Korporasi bersama-sama dengan pemerintah harus berusaha mengurangi kemiskinan, meningkatkan standar kehidupan, dan secara umum memajukan pembangunan masyarakat.

Menurut Rachman (2015:75) manfaat *corporate social responsibility* bagi masyarakat antara lain adalah sebagai berikut:

- 1) Mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat di sekitar perusahaan.
- 2) Membuka ruang kerja dan kesempatan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat
- 3) Turut membantu program pemerintah dalam pengentasan kemiskinan.

- 4) Penyelesaian masalah lingkungan
- 5) Akan lebih menguatkan dan memberdayakan kehidupan masyarakat baik secara ekonomi, kelembagaan sosial, dan memperkecil terjadinya konflik sosial.

9) **Indikator Pengukuran *Corporate Social Responsibility***

Menurut Pearce dan Robinson (2013:55) konsep utama dari *corporate social responsibility* terdiri dari empat konsep yang menjadi patokan bagi perusahaan dalam melaksanakan CSR:

1) Tanggung jawab ekonomi (*economic responsibilities*)

Merupakan tanggung jawab sosial perusahaan yang paling mendasar. Untuk memenuhi tanggung jawab ekonomi perusahaan, manajer harus memaksimalkan laba, jika memungkinkan. Tanggung jawab inti perusahaan adalah menyediakan barang dan jasa kepada masyarakat dengan biaya layak. Dalam menjalankan tanggung jawab ekonomi, perusahaan juga dapat bertanggung jawab secara sosial dengan menyediakan pekerjaan yang produktif bagi angkatan kerja, membayar pajak untuk pemerintah lokal, Negara bagian dan federal.

Jika suatu perusahaan sudah mencapai keuntungan secara ekonomis maka perusahaan sudah memenuhi tanggung jawab sosialnya. Dengan alasan bahwa jika perusahaan mempunyai keuntungan secara ekonomis maka perusahaan tersebut akan mempunyai aspek sosial terhadap pemerintah, tenaga kerja dan masyarakat.

Kelangsungan hidup perusahaan hanya dapat dipertahankan jika perusahaan memperoleh keuntungan dan disebut sebagai tanggung jawab ekonomis. Perusahaan selalu berusaha meningkatkan kinerja ekonomisnya sehingga tanggung jawab ekonomi diartikan sebagai profit maximization. Berdasarkan sudut pandang tersebut perusahaan yang tidak menghasilkan laba dianggap sebagai perusahaan yang tidak sehat, karena perusahaan didirikan dengan modal yang harus diperoleh kembali dalam jangka waktu tertentu bersama dengan laba yang diharapkan.

2) Tanggung jawab hukum (*legal responsibilities*)

Mencerminkan kewajiban perusahaan untuk mematuhi undang-undang yang mengatur aktivitas bisnis. Gerakan konsumen serta lingkungan hidup mengarahkan perhatian publik yang semakin besar pada tanggung jawab sosial perusahaan dengan melakukan lobi untuk diberlakukannya undang-undang yang mengatur bisnis dalam hal pengendalian populasi dan keselamatan konsumen.

Hukum dipahami sebagai suatu sistem norma yang mengatur kehidupan bersama dalam masyarakat yang mempunyai sanksi jika tidak dilaksanakan, juga sebagai sarana pemecahan konflik yang rasional karena didasari fakta-fakta. Dalam hubungannya dengan perusahaan, proses terbentuknya undang-undang dan peraturan (aktualisasi hukum) memerlukan waktu yang lama tidak akan pernah bisa sempurna, sehingga perusahaan yang kurang tanggung jawab sosialnya bisa memanfaatkan celah-celah dalam hukum (*the loopholes of the law*).

3) Tanggung jawab etis (*ethical responsibilities*)

Mencerminkan gagasan perusahaan mengenai perilaku bisnis yang benar dan layak. Tanggung jawab etis merupakan kewajiban yang melampaui kewajiban hukum. Perusahaan diharapkan, namun tidak diwajibkan untuk berperilaku secara tidak etis. Beberapa tindakan hukum dapat dianggap tidak etis.

Perusahaan memiliki kewajiban untuk menjalankan praktek bisnis yang baik, benar, adil dan fair. Norma-norma masyarakat perlu menjadi rujukan bagi perilaku organisasi perusahaan. Termasuk dalam tanggung jawab etis adalah kepekaan korporat dalam menjunjung kearifan dan adat lokal. Pengenalan terhadap kebiasaan, *opinion leader*, kebudayaan, bahasa daerah, kepercayaan dan tradisi menjadi sebuah keharusan dalam menjalankan tanggung jawab etis tersebut.

4) Tanggung jawab diskresi (*discretionary responsibilities*)

Merupakan tanggung jawab yang secara sukarela dilakukan oleh suatu organisasi bisnis. Tanggung jawab ini mencakup aktivitas hubungan masyarakat, kewargaan yang baik, dan tanggung jawab sosial perusahaan secara penuh. Melalui aktivitas hubungan masyarakat, manajer berusaha memperkuat citra perusahaan, produk serta jasa mereka dengan mendukung gerakan yang bermanfaat.

Selain perusahaan harus memperoleh laba, taat hukum dan berperilaku etis, perusahaan dituntut agar dapat memberi kontribusi yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Tujuannya adalah untuk meningkatkan

kualitas kehidupan semua. Para pemilik dan pegawai yang bekerja di perusahaan memiliki tanggung jawab ganda, yaitu kepada perusahaan dan kepada publik, tetapi diharapkan agar perusahaan dapat memupuk kemandirian komunitas. Tanggung jawab ini didasari itikad perusahaan untuk berkontribusi pada perbaikan komunitas secara mikro maupun makro.

2.1.6. Konsep Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan berasal dari kata “daya” yang mendapat awalan ber yang menjadi kata “berdaya” artinya memiliki kekuatan. Pemberdayaan artinya kekuatan, berdaya atau mempunyai daya atau mempunyai kekuatan. Pemberdayaan dalam Bahasa Indonesia merupakan terjemahan dari *empowerment* dalam Bahasa Inggris (Suharto, 2015:57).

Pemberdayaan masyarakat pada hakikatnya merupakan upaya untuk menjadikan masyarakat lebih berdaya dan berkemampuan sehingga mereka dapat mewujudkan potensi kemampuan yang mereka miliki. Dalam proses pemberdayaan biasanya ada yang disebut subjek dan objek. Subjek adalah orang/ kelompok yang memberdayakan, sedangkan objek adalah orang/ kelompok yang diberdayakan (Suhendra, 2006:74-75).

Menurut (Sumaryadi, 2005:11) pemberdayaan Masyarakat adalah sebuah konsep ekonomi yang merangkum nilai-nilai sosial. Konsep ini mencerminkan paradigma baru pembangunan, yakni bersifat “*people centered, participatory, empowering and sustainable*”. Konsep ini lebih luas daripada hanya semata-mata memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs*) atau menyediakan mekanisme untuk mencegah proses kemiskinan lebih lanjut (*safety net*).

Menurut Aziz dkk (2005:136) pemberdayaan masyarakat merupakan proses di mana masyarakat, terutama mereka yang kekurangan sumber daya pembangunan, didorong untuk meningkatkan kemandiriannya dalam hidup. Memberdayakan masyarakat juga merupakan proses siklus yang berkelanjutan, di mana anggota masyarakat bekerja sama dalam kelompok formal dan informal untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman serta berjuang untuk mencapai tujuan bersama.

Menurut Widjaja (2015:169) pemberdayaan masyarakat merupakan upaya yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan potensi masyarakat sehingga masyarakat dapat mewujudkan jati diri, harkat dan keseimbangan taraf kehidupan yang maksimal untuk dapat bertahan hidup dan berkembang secara mandiri di bidang ekonomi, sosial, agama, dan budaya. Selain itu, pemberdayaan masyarakat khususnya di pedesaan tidak hanya meningkatkan produktivitas, tetapi memberikan peluang usaha yang hanya memberikan modal saja tidak cukup, juga harus mengubah tatanan sosial dan ekonomi masyarakat, serta mendukung pengembangan potensi masyarakat melalui produktivitas dan efisiensi serta meningkatkan:

- a. Akses terhadap sumber daya alam.
- b. Akses terhadap teknologi.
- c. Akses terhadap pasar.
- d. Akses terhadap sumber pembiayaan.

Dari defenisi di atas dapat diambil kesimpulan bahwa pemberdayaan masyarakat atau komunitas adalah upaya menjadikan masyarakat mampu atau

berdaya. Artinya pemberdayaan masyarakat merupakan upaya menjadikan masyarakat mandiri dari lembaga-lembaga seperti pemerintah dan lembaga swadaya masyarakat. Kepedulian terhadap pemberdayaan masyarakat harus dianggap sebagai pendorong untuk memajukan kegiatan ekonomi masyarakat.

2.2. Penelitian Terdahulu

Pada dasarnya beberapa penelitian terdahulu terkait pelaksanaan CSR peneliti rangkum dalam tabel sebagai berikut:

Tabel II.1. Penelitian Terdahulu Evaluasi Pelaksanaan Program *Corporate Social Responsibility* (CSR) PT. RAPP Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan

No (1)	Penulis (2)	Temuan Hasil (3)
1	Abbas, Jawad (2020)	Enam praktik TQM diambil dari “Malcolm Baldrige National Quality Award” Amerika; CGP mencakup strategi manajemen hijau, proses hijau dan kinerja produk ramah lingkungan; dan CSR terdiri dari dimensi sosial, karyawan dan pelanggan. Peneliti mengumpulkan data dari para manajer perusahaan manufaktur ukuran sedang dan besar yang berlokasi di Pakistan. Analisis struktural menunjukkan dampak yang signifikan dan positif dari TQM pada CGP dengan nilai b dan p masing-masing 0,259 dan 0,003. Ini menunjukkan TQM secara signifikan meningkatkan kapabilitas organisasi untuk mencapai tujuan kinerja hijau. TQM juga menunjukkan dampak yang signifikan dan positif pada CSR dengan nilai-b 0,271 dan nilai-p 0,002; Selain itu, dampak CSR yang serupa ditemukan pada CGP dengan nilai b dan p masing-masing 0,189 dan 0,018.
2	Carnahan, Seth; Agarwal, Rajshree; Campbell, Benjamin (2010)	Secara khusus, dengan mempelajari hubungan antara investasi CSR perusahaan dan perilaku merugikan karyawan, kami menggemakan seruan baru-baru ini untuk mempelajari CSR di bidang manajemen sumber daya manusia dan perilaku organisasi (Morgeson et al., 2013), dan menambahkan beberapa tetapi studi penting yang meneliti bagaimana praktik ramah karyawan meningkatkan kinerja keuangan perusahaan (misalnya, Bloom, Kretschmer, dan Van Reenen, 2010; Edmans, 2011, 2012). Terkait, penelitian kami menambah literatur tentang CSR. Sementara banyak literatur menunjukkan hubungan positif antara CSR dan kinerja keuangan, sulit untuk mendokumentasikan manfaat nyata yang terkait dengan program CSR (untuk tinjauan, lihat Margolis, Elfenbein, dan Walsh, 2007). Sebagai gantinya, literatur yang muncul mencoba memahami penggerak internal dan eksternal dari kegiatan CSR. Secara khusus, literatur ini mengkaji peran berbagai pemangku kepentingan

No	Penulis	Temuan Hasil
(1)	(2)	(3)
		dalam membentuk investasi CSR perusahaan, termasuk lembaga pengatur (misalnya, Fabrizio, 2012; Toffel, Short, dan Ouellet, 2013), masyarakat (misalnya, Tilcsik dan Marquis, 2013), aktivis (misalnya, Baron, 2009; Baron dan Diermeier, 2007; McDonnell dan King, 2013; Luo, 2013)
3	Curran, Giorel (2017)	<p>Penelitian ini berfokus pada bagaimana izin sosial semakin digunakan sebagai prisma yang melaluinya pembelaan dan kontestasi proyek-proyek pertambangan terjadi. Secara khusus, ini mengkaji bagaimana pemangku kepentingan eksternal seperti masyarakat yang terkena dampak yang menentang proyek pertambangan di wilayah mereka, memanfaatkan izin sosial sebagai (tandingan) strategi untuk membentuk politik kontestasi mereka. Perusahaan pertambangan umumnya menggunakan gagasan tentang izin sosial sebagai tindakan yang didorong oleh proses yang menjadikan keterlibatan masyarakat yang disyaratkan di bawah persyaratan izin hukumnya sebagian besar sebagai alat komunikatif untuk menginformasikan masyarakat yang terkena dampak tentang rencananya. Mereka menekankan gagasan fundamental politik karakter dengan langsung menghubungkannya dengan norma-norma demokrasi yang dipegang teguh oleh sebagian besar komunitas, dan yang secara langsung melibatkan pemerintah dalam prosesnya. Dipahami dengan cara ini, daripada menahan kontestasi industri, seperti yang sering menjadi maksud CSR dari izin sosial, ia malah bisa merusaknya. Makalah ini dimulai dengan tinjauan singkat perkembangan gas non-konvensional secara global dan di Australia sebelum beralih ke diskusi tentang konsep izin sosial, terutama yang berfungsi di sektor pertambangan. Kemudian menyajikan studi kasus proyek gas non-konvensional yang diusulkan, terutama gas lapisan batubara (CSG), di daerah Northern Rivers di utara New South Wales, Australia, menyoroti kontes antara industri dan masyarakat mengenai arti izin sosial, bagaimana izin dimenangkan dan implikasi politik dari tidak adanya izin sosial. Analisis ini memberi tahu kita banyak hal tentang gagasan izin sosial itu sendiri, konteks CSR yang ada, dan dinamika politik dan kebijakan menyeluruh yang dapat dihasilkannya. Selain itu, melalui penggunaan lensa pembingkai untuk membantu menganalisis dinamika politik dalam studi kasus.</p>
4	Dewi, I Gusti Ayu Agung Omika; Dewi, I Gusti Ayu Agung Pradnya (2017)	<p>CSR juga dapat diartikan sebagai pendekatan dimana perusahaan mengintegrasikan kepedulian sosial dalam operasi bisnis mereka dan dalam interaksi dengan pemangku kepentingan berdasarkan prinsip kemitraan dan sukarela.²¹ Bagi perusahaan yang dikategorikan sebagai Perseroan Terbatas (PT) di Indonesia tidak ada Kecuali sektor perbankan, pengungkapan Corporate Social Responsibility (Pengungkapan CSR) merupakan kewajiban yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. Pengungkapan CSR dilakukan sebagai upaya mewujudkan dan lingkungan secara umum.³³ Corporate Social Responsibility adalah a komitmen keberlanjutan untuk memberikan dampak positif bagi lingkungan dan masyarakat dimana perusahaan berada, selain itu dalam melakukan kegiatan usaha, dalam rangka menyeimbangkan tanggung jawab perusahaan dalam menghasilkan keuntungan tetapi juga bermanfaat</p>

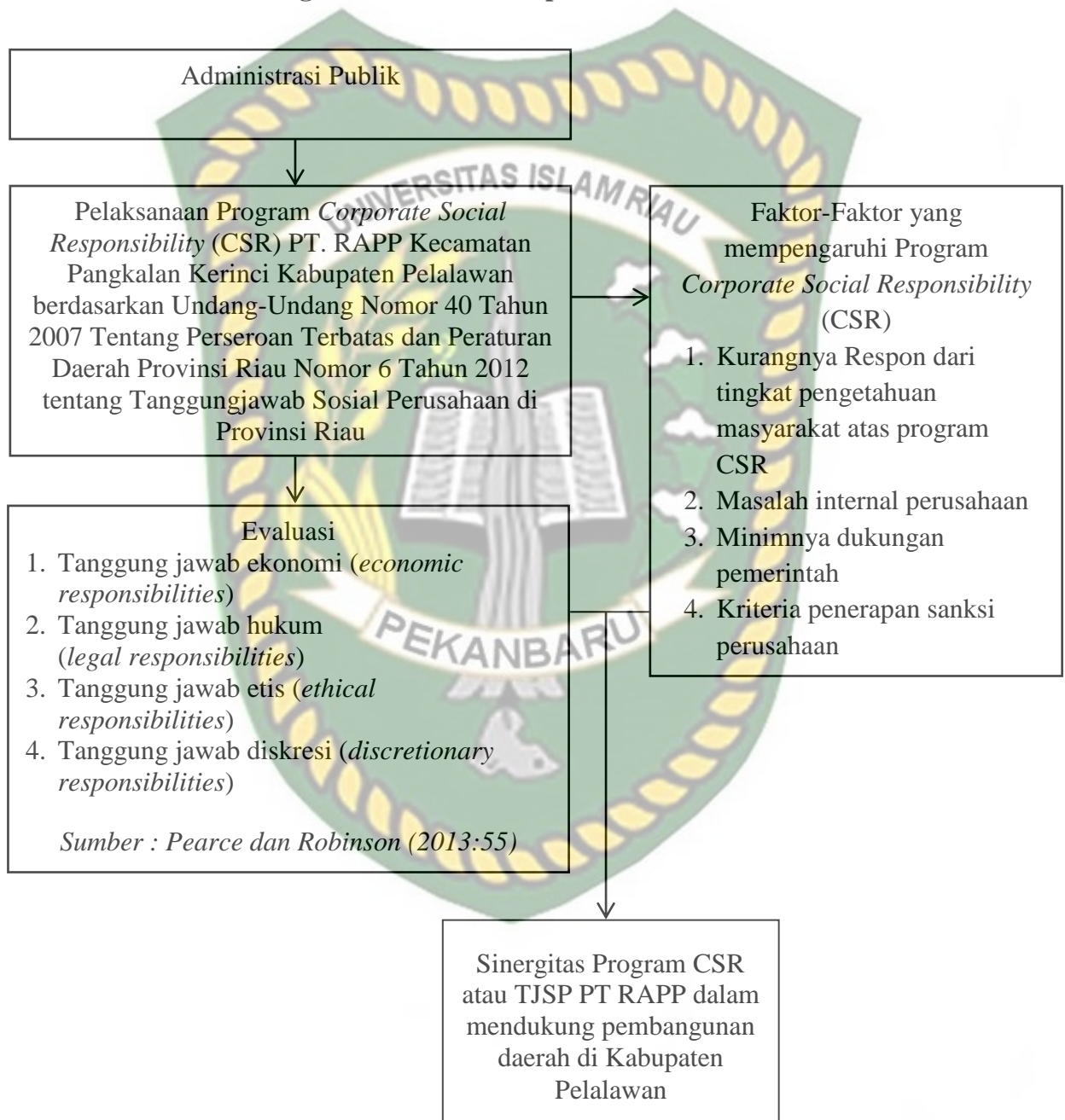
No	Penulis	Temuan Hasil
(1)	(2)	(3)
		bagi masyarakat dan lingkungan. ³⁴ Pelaksanaan CSR oleh perusahaan dilaporkan melalui mekanisme akuntansi pengungkapan CSR yang diterbitkan melalui laporan tahunan atau laporan sosial tersendiri dalam bentuk laporan keberlanjutan.
5	Etika, Bisnis (2020)	Secara khusus, secara empiris ditetapkan dengan baik bahwa tingkat hutang memiliki dampak negatif yang kuat pada kebijakan investasi perusahaan (pengeluaran modal, pekerjaan, penelitian dan pengembangan, inisiatif yang bertanggung jawab secara sosial). Dalam literatur, kesepakatan umum untuk menjelaskan efek ini adalah bahwa hutang secara optimal mencegah manajer dari investasi berlebihan (Lang et al. 1996; Peyer dan Shivdasani 2001; Ahn et al. 2006; Chava dan Roberts 2008; Bamea dan Rubin 2010). Agensi ini perspektif berputar di sekitar gagasan bahwa manajer dapat meraup keuntungan pribadi (kompensasi, tunjangan, entrenchment, hubungan negatif dari leverage dan kepemilikan orang dalam dengan peringkat sosial perusahaan, sehingga mendukung hipotesis bahwa 'orang dalam mendorong perusahaan untuk berinvestasi berlebihan dalam CSR ketika mereka menanggung sedikit biaya untuk melakukannya. Surroca dan Tribo (2008) juga menyarankan kemungkinan ini dengan mengamati bahwa 'kombinasi dari strategi entrenchment manajerial dan implementasi tindakan yang bertanggung jawab secara sosial memiliki efek negatif terutama pada kinerja keuangan.' Dengan pelindung pajak bunga, efek disipliner adalah manfaat utama hutang lainnya dalam literatur keuangan.
6	Halkos, George; Skouloudis, Antonis (2017)	Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi hubungan antara tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) di tingkat makro dan dimensi budaya nasional yang ditawarkan oleh kerangka kerja Hofstede. Desain / metodologi / pendekatan: Kami menggunakan indeks gabungan untuk mengukur perkembangan CSR dan menyajikan temuan baru tentang peran kekhususan budaya - yang diprosikan oleh dimensi Hofstede - pada dukungan CSR di antara sektor bisnis nasional. Temuan: Hasil menunjukkan bahwa perspektif budaya yang berkaitan dengan 'orientasi jangka panjang versus jangka pendek' serta 'kesenangan versus pengekanan' mempengaruhi secara positif indeks CSR gabungan, sementara 'penghindaran ketidakpastian' memiliki dampak negatif. Sebaliknya, efek 'jarak kekuasaan', 'individualisme', dan 'maskulinitas' ditemukan tidak signifikan.
7	Handayani, Rini; Wahyudi, Sugeng; Suharnomo, Suharnomo (2017)	(1) jumlah pekerja lebih dari 100 orang. (2) Perusahaan memiliki penjualan tahunan lebih dari Rp 2,5 miliar. (3) Perusahaan telah menghasilkan laba dalam 3 tahun terakhir. (4) Perusahaan aktif dalam kegiatan CSR minimal 3 tahun. Kuesioner survei digunakan dalam penelitian di mana manajer puncak perusahaan adalah unit analisis dan menerima kuesioner yang dikirim melalui surat. Respon dari para manajer puncak merupakan persepsi dari variabel penelitian, dan merupakan data yang akan diolah dalam penelitian ini. Tingkat tanggapan responden adalah 47%.

No	Penulis	Temuan Hasil
(1)	(2)	(3)
8	Jamali, Dima; Karam, Charlotte (2018)	Literatur tentang tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) berkembang dan menjadi lebih kompleks dan beragam. Berbagai tinjauan beasiswa CSR telah diterbitkan selama dekade terakhir, termasuk tinjauan umum (misalnya Aguinis dan Glavas 2012) dan ulasan yang lebih sempit dari bidang spesialis seperti yang diterbitkan dalam jurnal ini (misalnya Secchi (2007) tentang teori CSR; Carroll dan Shabana (2010) tentang kasus bisnis untuk CSR; Frynas dan Stephens (2015) tentang CSR politik). Wawasan dan kesimpulan yang diambil dari artikel-artikel ini telah banyak membantu dalam memetakan 'apa yang kita ketahui dan tidak ketahui tentang CSR' (Aguinis dan Glavas 2012, hlm. 932), tetapi gagal dalam hal yang lebih bernuansa analisis tentang bagaimana CSR memanifestasikan dirinya di pasar di luar Pada tingkat kelembagaan, kami fokus untuk mengidentifikasi kekuatan tingkat makro yang ada di lingkungan eksternal perusahaan, baik internal maupun eksternal ke NBS. Literatur mengeksplorasi anteseden tingkat makro, nasional dan / atau supranasional, yang paling menonjol dari yang termasuk ke dalam salah satu dari lima kategori: lanskap geopolitik masa lalu dan sekarang; sistem politik dan pemerintahan; sistem keuangan, ekonomi dan operasi bisnis; sistem budaya, nilai-nilai dan adat istiadat masyarakat; dan ekosistem lokal. Sehubungan dengan konsekuensi CSR, dampak dipandang dapat terwujud di tingkat bangsa dan dalam hal mendorong atau menghambat pembangunan lingkungan, sosial, ekonomi dan manusia, serta mempengaruhi dinamika pemerintahan nasional, yang kami cirikan sebagai 'dampak pembangunan positif dari CSR' atau, sebaliknya, 'dampak perkembangan yang merugikan dari CSR
9	Karaman, Abdullah S. ; Akman, Engin (2018)	Kebijakan CSR yang menjadi perhatian berpotensi mempengaruhi semua pihak. Dalam industri penerbangan, di mana pemirsanya adalah jutaan orang biasa, nilai yang dibawa oleh CSR bisa menjadi sangat penting. Persepsi dan pendapat klien tentang CSR adalah hal yang menarik bagi manajer maskapai, terutama dampak potensial dari aktivitas tersebut dan bagaimana hal itu berdampak pada interaksi antara pelanggan dan maskapai penerbangan (Chen et al., 2012). CSR merupakan konsep yang tidak dapat dilepaskan dari loyalitas pelanggan. Lynes dan Andrachuk (2008) membahas antara lain motivasi utama inisiatif CSR dalam penerbangan seperti keuntungan finansial, keunggulan kompetitif, pemupukan citra, tekanan pemangku kepentingan, dan penanganan masalah regulasi. Hasil menyimpulkan bahwa elemen pengarah dalam implementasi CSR industri penerbangan adalah tata kelola perusahaan, manajemen risiko dan krisis, manajemen merek, dan keamanan produk. Namun, tidak semua elemen yang termasuk dalam program CSR menghasilkan dampak yang disukai pada kinerja organisasi perusahaan penerbangan. Inoue dan Lee (2011) dan Moon et al. (2016) mengemukakan bahwa di antara dimensi komunitas, keberagaman, lingkungan, ketenagakerjaan, dan produk yang diasumsikan berdampak pada kinerja keuangan suatu maskapai penerbangan, faktor karyawan dan produk adalah signifikan, sementara faktor lain menghasilkan dampak

No	Penulis	Temuan Hasil
(1)	(2)	(3)
		negatif atau tidak signifikan.
10	Latapí Agudelo, Mauricio Andrés; Jóhannsdóttir, Lára; Davídsdóttir, Brynhildur (2019)	Ada sejarah panjang dan beragam terkait dengan evolusi konsep Corporate Social Responsibility (CSR). Namun, tinjauan sejarah hilang dalam literatur akademis yang menggambarkan evolusi pemahaman akademis dari konsep tersebut bersamaan dengan peristiwa publik dan internasional yang mempengaruhi ekspektasi sosial berkaitan dengan perilaku perusahaan. Tujuan dari makalah ini adalah untuk memberikan perspektif sejarah yang berbeda tentang evolusi CSR sebagai paradigma konseptual dengan meninjau faktor-faktor paling relevan yang telah membentuk pemahaman dan definisi, seperti kontribusi akademis, kebijakan internasional dan peristiwa sosial dan politik yang signifikan. Untuk melakukannya, Metode yang digunakan adalah tinjauan pustaka komprehensif yang mengeksplorasi kontribusi akademis yang paling relevan dan acara publik yang telah memengaruhi proses evolusi CSR dan bagaimana mereka melakukannya. Temuan menunjukkan bahwa pemahaman tentang tanggung jawab perusahaan telah berkembang dari yang terbatas pada perolehan laba menjadi mencakup serangkaian tanggung jawab yang lebih luas menjadi keyakinan terbaru bahwa tanggung jawab utama perusahaan haruslah menghasilkan nilai bersama. Temuan juga menunjukkan bahwa ekspektasi sosial dari perilaku perusahaan berubah, begitu pula konsep TJSP.

2.3. Kerangka Pemikiran

Gambar II.1. Kerangka Pemikiran Evaluasi Pelaksanaan Program *Corporate Social Responsibility* (CSR) PT. RAPP Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan



Sumber: Modifikasi Peneliti, 2021

2.4. Konsep Operasional

Dalam penelitian ini terdapat beberapa poin penting yang perlu dijelaskan secara konsep operasional sebagai berikut:

- 1) Administasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok orang dalam bentuk kerjasama untuk mencapai tujuan tertentu.
- 2) Organisasi adalah sebuah kesatuan yang terbentuk oleh beberapa orang yang mempunyai sedikit atau banyak kesamaan terkait latar belakang, identitas, harapan dan banyak hal lain yang bertujuan mencapai kesepakatan secara bersama.
- 3) Evaluasi kebijakan adalah serangkaian tindakan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu, dengan ancaman dan peluang yang ada, di mana kebijakan yang diusulkan tersebut ditujukan untuk memanfaatkan potensi sekaligus mengatasi hambatan yang ada dalam rangka mencapai tujuan tertentu.
- 4) *Corporate Social Responsibility* (CSR) atau tanggungjawab sosial perusahaan (TJSP), adalah niat baik dan komitmen dari perusahaan untuk memberikan kontribusi terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat lokal dan kegiatan ini berawal dengan membangun hubungan yang harmonis antara perusahaan dengan lingkungannya.
- 5) Tanggung jawab ekonomi (*economic responsibilities*)

Merupakan tanggung jawab sosial perusahaan yang paling mendasar. Untuk memenuhi tanggung jawab ekonomi perusahaan, manajer harus memaksimalkan laba, jika memungkinkan. Tanggung jawab inti perusahaan

adalah menyediakan barang dan jasa kepada masyarakat dengan biaya layak. Dalam menjalankan tanggung jawab ekonomi, perusahaan juga dapat bertanggungjawab secara sosial dengan menyediakan pekerjaan yang produktif bagi angkatan kerja, membayar pajak untuk pemerintah lokal, Negara bagian dan federal (Pearce dan Robinson, 2013:55).

Jika PT. RAPP Kecamatan Pangkalan Kerinci sudah mencapai keuntungan secara ekonomis maka perusahaan sudah memenuhi tanggung jawab sosialnya. Dengan alasan bahwa jika perusahaan mempunyai keuntungan secara ekonomis maka perusahaan tersebut akan mempunyai aspek sosial terhadap pemerintah, tenaga kerja dan masyarakat.

6) Tanggung jawab hukum (*legal responsibilities*)

Mencerminkan kewajiban perusahaan untuk mematuhi undang-undang yang mengatur aktivitas bisnis. Gerakan konsumen serta lingkungan hidup mengarahkan perhatian publik yang semakin besar pada tanggung jawab sosial perusahaan dengan melakukan lobi untuk diberlakukannya undang-undang yang mengatur bisnis dalam hal pengendalian populasi dan keselamatan konsumen (Pearce dan Robinson, 2013:57).

Dalam hubungan PT. RAPP dengan Pemerintah di Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan, proses terbentuknya undang-undang dan peraturan (aktualisasi hukum) memerlukan waktu yang lama dan tidak akan pernah bisa sempurna sehingga perusahaan yang kurang tanggung jawab sosialnya bisa memanfaatkan celah-celah dalam yang diberlakukan pihak Kabupaten Pelalawan.

7) Tanggung jawab etis (*ethical responsibilities*)

Mencerminkan gagasan perusahaan mengenai perilaku bisnis yang benar dan layak. Tanggung jawab etis merupakan kewajiban yang melampaui kewajiban hukum. Perusahaan diharapkan, namun tidak diwajibkan untuk berperilaku secara tidak etis. Beberapa tindakan hukum dapat dianggap tidak etis (Pearce dan Robinson, 2013:58).

PT. RAPP Kecamatan Pangkalan Kerinci memiliki kewajiban untuk menjalankan praktek bisnis yang baik, benar, adil dan fair. Norma-norma masyarakat perlu menjadi rujukan bagi perilaku organisasi perusahaan. Termasuk dalam tanggung jawab etis adalah kepekaan korporat dalam menjunjung kearifan dan adat lokal di lingkungan masyarakat Kecamatan Pangkalan Kerinci.

8) Tanggung jawab diskresi (*discretionary responsibilities*)

Merupakan tanggung jawab yang secara sukarela dilakukan oleh suatu organisasi bisnis. Tanggung jawab ini mencakup aktivitas hubungan masyarakat, kewargaan yang baik, dan tanggung jawab sosial perusahaan secara penuh. Melalui aktivitas hubungan masyarakat, manajer berusaha memperkuat citra perusahaan, produk serta jasa mereka dengan mendukung gerakan yang bermanfaat (Pearce dan Robinson, 2013:58).

Selain PT. RAPP harus memperoleh laba, taat hukum dan berperilaku etis, perusahaan dituntut agar dapat memberi kontribusi yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat Kecamatan Pangkalan Kerinci. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas kehidupan seluruh aspek,

baik pemilik dan para karyawan yang bekerja di perusahaan memiliki tanggung jawab ganda, yaitu kepada perusahaan dan kepada publik, tetapi diharapkan agar perusahaan dapat memupuk kemandirian komunitas.

2.5. Operasionalisasi Variabel

Dalam penelitian ini disusun pengukuran variabel yang dioperasionalkan ke dalam tabel sebagai berikut:

Tabel II.2 Konsep Operasional Evaluasi Pelaksanaan Program *Corporate Social Responsibility* (CSR) PT. RAPP Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan

Konsep (1)	Variabel (2)	Indikator (3)	Sub Indikator (4)
Evaluasi CSR atau TJSP adalah pengukuran niat baik dan komitmen dari suatu perusahaan untuk memberikan kontribusi terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat lokal dan kegiatan ini berawal dengan membangun hubungan yang harmonis antara perusahaan dengan lingkungannya (Pearce dan Robinson (2013:55))	<i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR)	1. Tanggung jawab ekonomi	1. Penyerapan tenaga kerja setempat 2. Bantuan ekonomi langsung dan tidak langsung
		2. Tanggung jawab hukum	1. Kepatuhan terhadap undang-undang dan peraturan daerah 2. Pelaporan kegiatan CSR
		3. Tanggung jawab etis	1. Menjunjung tinggi kearifan dan adat masyarakat setempat 2. Komitmen terhadap SOP 3. Dukungan terhadap program pemerintah
		4. Tanggung jawab diskresi	1. Pendidikan 2. Kesehatan 3. Sosial

Sumber : Modifikasi Penulis, 2021

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini adalah kualitatif yang dispesifikkan pada penelitian sosial. Menurut Creswell (2016:245) penelitian kualitatif sosial merupakan metode-metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang oleh sejumlah individu atau sekelompok orang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan. Secara holistik, dengan dideskripsikan dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan berlandaskan pada fenomena tertentu. Dalam penelitian ini digunakan jenis studi fenomenologis, yaitu penelitian sosial yang berorientasi berdasarkan realitas serta pemahaman dari evaluasi pelaksanaan program *Corporate Social Responsibility* (CSR) PT. RAPP Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan.

3.2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di PT. Riau Andalan Pulp & Paper (RAPP) yang terletak di Jalan Lintas Timur, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau. Dipilihnya lokasi ini adalah karena sesuai Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 6 Tahun 2012 tentang Tanggung jawab Sosial Perusahaan di Provinsi Riau pasal 8, maka PT RAPP berkewajiban untuk menyusun rancangan penyelenggaraan program TJSP sesuai dengan prinsip-prinsip tanggung jawab sosial dunia usaha dengan memperhatikan kebijakan pemerintah daerah dan peraturan perundangan.

3.3. Jenis dan Sumber Data

Data yang dikumpulkan terdiri atas data primer dan data sekunder dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Data primer adalah data utama atau data inti yang didapatkan peneliti melalui hasil wawancara kepada para informan terpilih.
2. Data sekunder adalah data penunjang yang berbentuk dokumen atau catatan yang berasal dari perusahaan terkait, hasil penelitian sejenis maupun publikasi yang menunjang pembahasan penelitian.

3.4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam rangka pengumpulan data dan informasi yang berhubungan dengan masalah penelitian, maka digunakan beberapa teknik pengumpulan data, yaitu:

1. Observasi

Observasi atau biasa dikenal dengan pengamatan adalah salah satu metode untuk melihat bagaimana suatu peristiwa, kejadian, hal-hal tertentu terjadi. Sugiyono (2016:145) mendefinisikan observasi sebagai menyajikan gambaran rinci tentang aktivitas program, proses dan peserta. Dalam penelitian ini menggunakan observasi partisipasi pasif yaitu peneliti datang di tempat kegiatan orang yang diamati, tetapi tidak ikut terlibat dalam kegiatan tersebut.

2. Wawancara

Wawancara ialah teknik pengumpulan data melalui tanya jawab kepada informan dengan berpedoman pada daftar wawancara. Teknik wawancara dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode

semi terstruktur. Sugiyono (2016:317) mendefinisikan wawancara semi terstruktur adalah proses wawancara yang menggunakan panduan wawancara yang berasal dari pengembangan topik dan mengajukan pertanyaan dan penggunaan lebih fleksibel daripada wawancara terstruktur.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengumpulan data yang bersumber dari arsip dan dokumen, baik yang berada di tempat penelitian ataupun yang berada di luar tempat penelitian dan yang ada hubungannya dengan penelitian tersebut.

3.5. Informan Penelitian

Informan penelitian adalah instrumen kunci yang berpartisipasi dalam memberikan informasi terkait situasi dan kondisi yang mampu menjelaskan informasi terhadap hal yang diteliti (Creswell, 2016:248). Adapun informan dalam penelitian ini adalah yang peneliti anggap dapat memberikan informasi paling relevan sesuai masalah pokok penelitian, yaitu:

Tabel III.1. Informan Penelitian Evaluasi Pelaksanaan Program *Corporate Social Responsibility* (CSR) PT. RAPP Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan

No	Jabatan	Jumlah
1	Camat Pangkalan Kerinci	1
2	Manajer CSR PT RAPP	1
3	Humas PT RAPP	1
4	Kepala Bidang Ekonomi dan Kerjasama Bappeda Pelalawan	1
5	Tokoh masyarakat Kecamatan Pangkalan Kerinci	2
6	Masyarakat Penerima Program CSR	2
Total		8

Sumber: Modifikasi Penulis, 2021

Adapun Camat Pangkalan Kerinci dijadikan sebagai key informan, sedangkan sisanya adalah informan pendukung. Key informan adalah informan kunci yang dianggap memiliki informasi paling relevan atas permasalahan yang diangkat, sedangkan informan pendukung adalah informan yang sifatnya mendukung ataupun sebagai validasi dari hasil jawaban wawancara yang didapat.

Teknik penetapan informan dalam penelitian ini yang digunakan dalam penelitian ini adalah *snowball sampling* dimana menurut Sugiyono (2016:300) adalah suatu metode untuk mengidentifikasi, memilih dan mengambil sampel dalam suatu jaringan atau rantai hubungan yang menerus. Peneliti menyajikan suatu jaringan melalui gambaran atau kaitan antara satu informan dengan informan yang lain.

3.6. Teknik Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis induktif. Menurut Creswell (2010:248) analisis data induktif merupakan membangun pola, kategori dan temanya dari bawah ke atas, dengan mengolah data kedalam unit-unit informasi yang lebih abstrak. Triangulasi merupakan salah satu pendekatan yang dilakukan peneliti untuk menggali dan melakukan teknik pengolahan data kualitatif. Selain peneliti mengumpulkan data yang akan digunakan dalam penelitian, juga sekaligus menguji kredibilitas suatu data melalui berbagai teknik pengumpulan data dan berbagai sumber data. Proses ini menjabarkan usaha peneliti dalam mengolah secara berulang-ulang tema dan *database* penelitian hingga peneliti berhasil membangun serangkaian tema yang utuh.

BAB IV

GAMBARAN UMUM PENELITIAN

4.1. Gambaran Umum Kabupaten Pelalawan

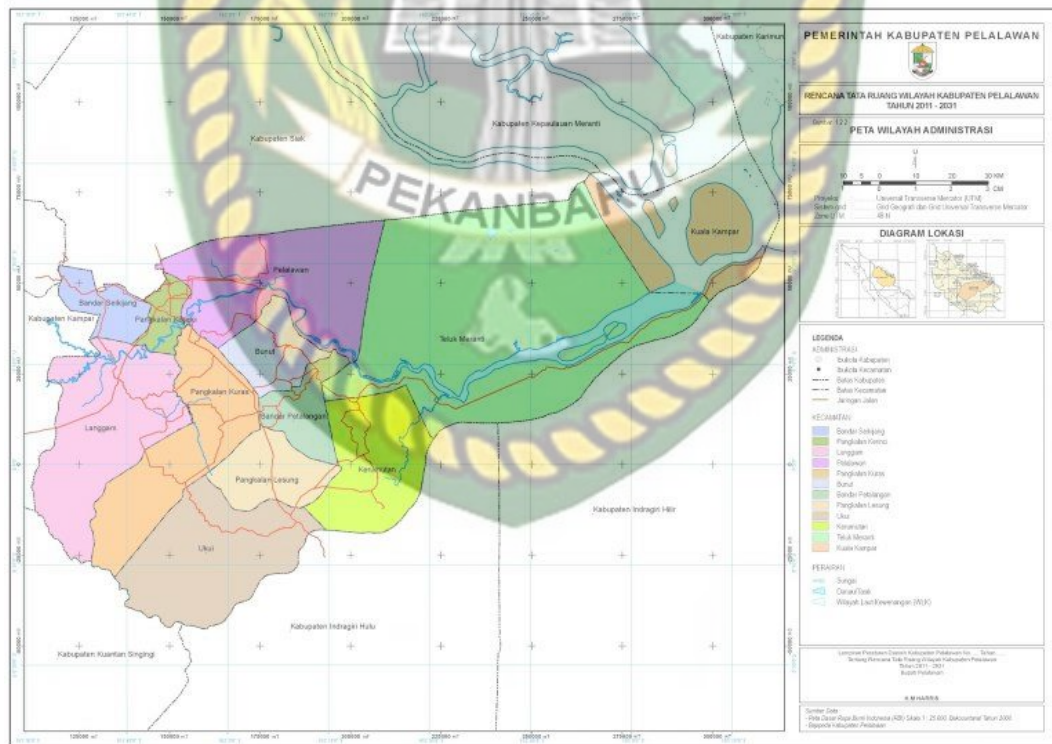
4.1.1. Sejarah Kabupaten Pelalawan

Sejarah Singkat Nama Kabupaten Pelalawan berawal dari nama sebuah kerajaan Pelalawan yang pusat kerajaannya berada di pinggir sungai Kampar. Kerajaan ini berdiri tahun 1761, dan mulai terkenal pada masa pemerintahan Sultan Syed Abdurrahman Fachrudin (1811-1822). Raja terakhir kerajaan Pelalawan adalah Tengku Besar Kerajaan Pelalawan yang memerintah pada tahun 1940 -1945. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang pembentukan 8 (delapan) Kabupaten/Kota di Propinsi Riau yang diresmikan oleh Menteri Dalam Negeri tanggal 12 Oktober 1999 di Jakarta dan Operasional Pemerintah Daerah tanggal 5 Desember 1999, salah satu diantaranya adalah Kabupaten Pelalawan. Kabupaten ini memiliki luas 13.924,94 Km² dan pada awal terbentuknya terdiri atas 4 kecamatan, yaitu kecamatan: Langgam, Pangkalan Kuras, Bunut, dan Kuala Kampar.

Dalam perkembangannya, Kabupaten Pelalawan secara administratif terdiri atas 12 wilayah kecamatan, yang meliputi 106 Desa dan 12 Kelurahan. Kecamatan yang belum memiliki kelurahan, yaitu Kecamatan Bandar Seikijang dan Bandar Petalangan. Pada tahun 2001 kepala daerah Kabupaten Pelalawan ditunjuk oleh DPRD dengan pasangan H.T Azmun Jaafar dan H. Anas Badrun. Kemudian bulan Februari 2006, dilakukan pemilihan kepala daerah langsung

pertama dengan pasangan terpilih H.T Azmun Jaafar dan Drs H Rustam Efendi sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pelalawan periode 2006-2011. Pemilukada tahap kedua di Kabupaten Pelalawan dilaksanakan pada tanggal 16 Februari 2011. Dalam Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pelalawan tanggal 20 Februari 2011 ditetapkan pasangan HM Harris dan Marwan Ibrahim sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pelalawan. Perkembangan pembangunan Kabupaten Pelalawan saat ini sangat pesat juga ditunjang oleh perkembangan sektor industri terutama dengan berdirinya perusahaan *pulp & paper*.

Gambar IV.1. Peta Wilayah Kabupaten Pelalawan



4.1.2. Geografis Kabupaten Pelalawan

Letak dan Luas Wilayah Kabupaten Pelalawan terletak di Pesisir Pantai Timur pulau Sumatera antara 1,25' Lintang Utara sampai 0,20' Bujur Timur sampai 103,28° Bujur Timur dengan batas wilayah :

1) Sebelah Utara

Kabupaten Siak (Kecamatan Sungai Apit dan Kecamatan Siak);
Kabupaten Bengkalis (Kecamatan Tebing Tinggi);

2) Sebelah Selatan

Kabupaten Indragiri Hilir (Kecamatan Kateman, Kecamatan andah, dan Kecamatan Gaung); Kabupaten Indragiri Hulu (Kecamatan Rengat, Kecamatan Pasir Penyu, Kecamatan Peranap, dan Kecamatan Kuala Cenayu); Kabupaten Kuantan Singingi (Kecamatan Kuantan Hilir, dan Kecamatan Singingi);

3) Sebelah Barat

Kabupaten Kampar (Kecamatan Kampar Kiri, Kecamatan Siak Hulu);
Kota Pekanbaru (Kecamatan Rumbai dan Tenayan Raya);

4) Sebelah Timur

Propinsi Kepulauan Riau.

Luas wilayah Kabupaten Pelalawan kurang lebih 13.067,29 km² atau 14,73% dari luas wilayah Propinsi Riau (9.456.160 Ha). Dilihat dari ketinggian beberapa daerah atau kota di Kabupaten Pelalawan dan permukaan laut berkisar antara 2-40 m. Daerah atau kota yang tertinggi adalah Langgam (Langgam), P. Kerinci (P.Kerinci), Sorek I (Pangkalan Kuras), P. Lesung (P. Lesung), Ukui

dan Bandar Seikijang dengan tinggi masing-masing diatas 30 m dan yang terendah adalah Teluk Dalam (Kuala Kampar) 2m.

4.1.3. Pemerintahan Kabupaten Pelalawan

Adapun jumlah kecamatan, ibu kota, luas wilayah serta persentase total terhadap Kabupaten Pelalawan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel IV.1. Luas Wilayah Kecamatan di Kabupaten Pelalawan Tahun 2020

No	Kecamatan	Ibu Kota Kecamatan	Luas Wilayah (km ²)	Persentase (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Langgam	Langgam	1476,29	11,30
2	Pangkalan Kerinci	Pangkalan Kerinci	217,26	1,66
3	Bandar Sei Sekijang	Sekijang	325,03	2,49
4	Pangkalan Kuras	Sorek Satu	1224,55	9,37
5	Ukui	Ukui Satu	1337,47	10,24
6	Pangkalan Lesung	Pangkalan Lesung	438,08	3,35
7	Bunut	Pangkalan Bunut	444,65	3,40
8	Pelalawan	Pelalawan	1469,38	11,24
9	Bandar Petalangan	Rawang Empat	361,85	2,77
10	Kuala Kampar	Teluk Dalam	683,39	5,23
11	Kerumutan	Kerumutan	976,31	7,47
12	Teluk Meranti	Teluk Meranti	4113,03	31,48
	Total		13.067,29	100

Sumber: BPS Kabupaten Pelalawan, 2021

Berdasarkan tabel di atas, tampak bahwa Kabupaten Pelalawan terdiri dari 12 kecamatan dengan kecamatan terluas adalah Kecamatan Teluk Meranti yaitu 4.113,03 km² atau 31,48% dan yang paling kecil adalah Kecamatan Pangkalan Kerinci dengan luas 217,26 km² atau 1,66% dari luas Kabupaten Pelalawan. Jarak Lurus Ibukota Kecamatan dengan Ibukota Kabupaten Jarak lurus ibukota kecamatan yang terdekat dengan ibukota kabupaten adalah ibukota Kecamatan Pangkalan Kerinci ± 0 km. Sedangkan jarak yang terjauh adalah ibukota Kecamatan Kuala Kampar (Teluk Dalam) sejauh 159,2 km.

Tabel IV.2. Jumlah Desa dan Kelurahan di Kabupaten Pelalawan Tahun 2020

No	Kecamatan	Desa	Kelurahan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Langgam	8	1	9
2	Pangkalan Kerinci	7	3	10
3	Bandar Sei Sekijang	5	1	6
4	Pangkalan Kuras	17	1	18
5	Ukui	12	1	13
6	Pangkalan Lesung	10	1	11
7	Bunut	10	1	11
8	Pelalawan	9	1	10
9	Bandar Petalangan	11	1	12
10	Kuala Kampar	10	1	11
11	Kerumutan	10	1	11
12	Teluk Meranti	9	1	10
	Total	118	14	132

Sumber: BPS Kabupaten Pelalawan, 2021

Berdasarkan tabel di atas, tampak bahwa di Kabupaten Pelalawan dari total 132 Desa/ Kelurahan, tertinggi yaitu Kecamatan Pangkalan Kuras memiliki 17 desa dan 1 kelurahan, sementara Kecamatan Bandar Sei Sekijang hanya memiliki 5 desa dan 1 kelurahan.

4.1.4. Kependudukan Kabupaten Pelalawan

Penduduk merupakan komponen utama dalam pembangunan nasional suatu bangsa. Penduduk merupakan sumber daya manusia yang melakukan dan melaksanakan pembangunan sekaligus merupakan objek atau sasaran pembangunan itu sendiri. Dengan kata lain, penduduk berfungsi sebagai komponen output dalam pembangunan. Oleh karena itu, pengelolaan penduduk perlu diarahkan kepada pengendalian kuantitas, peningkatan kualitas, dan pengarahan mobilitas sehingga mempunyai ciri-ciri dan karakteristik yang menunjang kegiatan pembangunan. Permasalahan. Kependudukan seperti jumlah,

komposisi, dan distribusi penduduk menurut umur dan jenis kelamin harus selalu dipantau perkembangannya.

Penduduk Kabupaten Pelalawan berdasarkan hasil Sensus Penduduk tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel IV.3. Luas Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Pelalawan Tahun 2020

No	Kecamatan	Penduduk (ribu)	Kepadatan (jiwa/km ²)	Persentase (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Langgam	33,00	8,46	22
2	Pangkalan Kerinci	94,59	24,25	435
3	Bandar Sei Sekijang	21,48	5,51	66
4	Pangkalan Kuras	61,12	15,67	50
5	Ukui	40,30	10,33	30
6	Pangkalan Lesung	29,83	7,65	68
7	Bunut	15,47	3,96	35
8	Pelalawan	19,12	4,90	13
9	Bandar Petalangan	16,45	4,22	45
10	Kuala Kampar	17,84	4,57	26
11	Kerumutan	24,42	6,26	25
12	Teluk Meranti	16,44	4,22	4
	Total	390,05	100	100

Sumber: BPS Kabupaten Pelalawan, 2021

Berdasarkan hasil Sensus Penduduk 2020 (September), jumlah penduduk Kabupaten Pelalawan tahun 2020 adalah 390.046 jiwa. Sex Ratio Kabupaten Pelalawan di tahun 2020 adalah 107. Ini menandakan jumlah penduduk laki-laki lebih dominan dibandingkan perempuan. Kepadatan penduduk menunjukkan perbandingan jumlah penduduk dengan luas wilayah. Tingkat kepadatan penduduk di Kabupaten Pelalawan 30 jiwa per km². Kecamatan dengan tingkat kepadatan tertinggi adalah Kecamatan Pangkalan Kerinci 435 jiwa per km². Sedangkan kepadatan terendah di Kecamatan Teluk Meranti, 4 jiwa per km².

Tabel IV.4. Jenis Kelamin Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Pelalawan Tahun 2020

No	Kecamatan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Langgam	17.189	15.808	32.997
2	Pangkalan Kerinci	48.673	45.912	94.585
3	Bandar Sei Sekijang	11.180	10.301	21.481
4	Pangkalan Kuras	31.538	29.585	61.123
5	Ukui	20.848	19.450	40.298
6	Pangkalan Lesung	15.459	14.373	29.832
7	Bunut	7.942	7.523	15.465
8	Pelalawan	10.115	9.005	19.120
9	Bandar Petalangan	8.458	7.989	16.447
10	Kuala Kampar	9.240	8.597	17.837
11	Kerumutan	12.561	11.859	24.420
12	Teluk Meranti	8.482	7.959	16.441
	Total	201.685	188.361	390.046

Sumber: BPS Kabupaten Pelalawan, 2021

Berdasarkan tabel di atas, tampak bahwa di Kabupaten Pelalawan terdiri dari penduduk laki-laki sebanyak 201.685 jiwa dan perempuan 188.361 jiwa yang tersebar di 12 kecamatan dengan penduduk terbanyak ada di Pangkalan Kerinci yaitu 94.585 jiwa dan terendah di Bunut 15.465 jiwa.

4.1.5. Ketenagakerjaan di Kabupaten Pelalawan

Angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang bekerja, punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja, dan pengangguran. Bekerja adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh seseorang dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh pendapatan atau keuntungan dan lamanya bekerja paling sedikit 1 jam secara terus menerus dalam seminggu yang lalu (termasuk pekerja keluarga tanpa upah yang membantu dalam suatu usaha/kegiatan ekonomi).

Tabel IV.5. Jumlah Penduduk Usia 15 tahun ke atas yang Bekerja dan tidak bekerja di Kabupaten Pelalawan Tahun 2020

No	Kegiatan utama	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Angkatan kerja	158.103	79.160	237.263
	1. Bekerja	147.786	75.254	223.040
	2. Pengangguran terbuka	10.317	3.906	14.223
2	Bukan angkatan kerja	21.839	88.764	110.603
	1. Sekolah	13.727	13.418	27.145
	2. Mengurus rumah tangga	1.101	71.774	72.875
	3. lainnya	7.011	3.572	10.583
	Total	179.942	167.924	347.866

Sumber: BPS Kabupaten Pelalawan, 2021

Berdasarkan tabel di atas, tampak bahwa terdapat 237.263 jiwa angkatan kerja, sementara hanya terdapat 14.223 jiwa pengangguran terbuka. Untuk angkatan bukan kerja yaitu sebanyak 110.603 jiwa dengan kriteria sekolah, mengurus rumah tangga, dan lainnya.

4.2. Gambaran Umum PT. Riau Andalan Pulp dan Paper (RAPP)

4.2.1. Sejarah PT. Riau Andalan Pulp dan Paper (RAPP)

PT. Riau Andalan *Pulp* dan *Paper* (RAPP) merupakan salah satu perusahaan terbesar di Asia Pasifik yang bergerak di bidang industri *pulp* dan kertas. Perusahaan seluas 1750 ha ini berlokasi di Jalan Lintas Timur, Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau. PT. Riau Andalan *Pulp & Paper* dikenal sebagai integrated mill yang memproduksi *pulp* sebanyak 2.000.000 ton/tahun dengan kapasitas produksi 2.500.000 ton/tahun dan kertas sebesar 800.000 ton/tahun dengan kapasitas produksi 800.000

ton/tahun. Selain itu, PT. Riau Andalan *Pulp & Paper* merupakan suatu perusahaan yang bergerak dibidang pulp dan kertas yang berada di bawah naungan PT. Raja Garuda Mas (RGM). Saat ini RGM berubah nama menjadi PT. *Royal Golden Eagle* (RGE). PT. RGE yang berpusat di Jakarta merupakan merupakan suatu grup industri yang unggul di Asia Pasifik dan asetnya melebihi USD 4,6 Milyar.

CEO dan juga pendiri perusahaan ini adalah Sukanto Tanoto, beliau yang lahir pada 29 Desember 1949 merupakan anak tertua dari tujuh bersaudara. Beliau telah banyak berkiprah di dunia bisnis. Pada Tahun 1967 beliau bergabung dalam perusahaan milik keluarga sebagai penyuplai suku cadang kendaraan bermotor dari Jepang. Pada tahun 1973 beliau mendirikan industri kayu lapis yang diberi nama RGM (saat ini menjadi RGE) pada saat itu menjadi era keemasan kayu lapis Indonesia. Beliau mendirikan perusahaan minyak kelapa sawit yang diberi nama Asian Agri pada tahun 1979. Pada tahun 1983 dibangun pabrik *dissolving pulp* di daerah Porsea, Sumatra Utara yang diberi nama Indorayon (saat ini menjadi Toba *Pulp* Lestari) yang mulai dioperasikan tahun 1988.

Royal Golden Eagle (RGE) *Group* mengelola perusahaan manufacture yang bergerak di bidang sumber daya alam seperti industri minyak kelapa sawit, industri kertas, dan industri konstruksi dan energi yang bersumber dari bahan alam. RGE *Group* didirikan oleh Sukanto Tanoto pada tahun 1967 yang menaungi perusahaan di berbagai negara. Salah satu anak perusahaan

dari RGE Group ini adalah *Asia Pasific Resources International Holding Limited* (APRIL) yang bergerak dibidang industri kertas.

APRIL *Group* merupakan anggota dari RGE *Group* yang didirikan oleh Sukanto Tanoto pada tahun 1973. Perusahaan ini bergerak dibidang produksi *pulp* dan kertas dengan bahan kayu, sehingga diwajibkan bagi setiap pabrik untuk menanami hutan guna memenuhi bahan bakunya dan tidak mengganggu hutan-hutan milik negara yang sebagian besar merupakan kayu dari pohon alam.

PT.RAPP merupakan anak perusahaan dari APRIL *Group*. RAPP adalah singkatan dari Riau Andalan *Pulp and Paper* yang merupakan perusahaan penghasil bubur kertas (*pulp*) dan kertas terkemuka di dunia dengan produksi *Bleached Hardwood Kraft Wood* (BHKP) dengan teknologi *Elemental Chlorine Free* (ECF) dan kertas *Uncoated Wood Free* (UWF). APRIL *Group* mulai mengembangkan perkebunan di Provinsi Riau, Sumatera dan membangun pabrik di Pelalawan Kerinci dari 1993.

Pabrik APRIL menerapkan teknologi terkini, menghasilkan energi pembangkit listrik secara mandiri, dan telah memiliki sistem manajemen yang telah tersertifikasi dari segi kualitas, lingkungan, kesehatan dan keselamatan kerja baik secara nasional maupun internasional seperti ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001. APRIL *Group* juga memperoleh sertifikasi dari Lembaga Ekolabel Indonesia (LEI) untuk pengelolaan hutan tanaman lestari, serta sertifikat PROPER dalam menilai kinerja pengelolaan lingkungan. APRIL *Group* juga menerapkan kebijakan pengelolaan hutan berkelanjutan

(SFMP 2,0). Produk kertasnya memperoleh sertifikasi dari *Singapore Green Label*.

PT. Riau Andalan *Pulp and Paper* melakukan distribusi pemasaran *pulp* keluar negeri sekitar 85% dan sisanya 15 % dijual pada perusahaan di dalam negeri.110 Hasil produksi diekspor ke berbagai negara seperti Amerika, China, Korea, India, Taiwan, Japan, Australia, negara-negara di Eropa, dan Asia Tenggara.

Tabel IV.6. Sejarah Singkat PT. Riau Andalan Pulp dan Paper (RAPP)

Tahun	Sejarah Singkat
1973	Didirikan industri kayu lapis (RGMI/RGE)
1991	Dimulai pembangunan pabrik PT. RAPP
1993	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pabrik PT. RAPP selesai dibangun ▪ Pengembangan perkebunan skala besar dimulai
1994	<ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>Running test</i> pabrik PT. RAPP ▪ Produksi <i>pulp</i> pertama kali ▪ APRIL dibentuk
1995	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembangunan pabrik secara komersial mulai didirikan ▪ Produksi <i>pulp</i> secara komersial dimulai
1996	Survei pabrik kertas
1997	Pabrik kertas mulai beroperasi
1998	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Produksi kertas secara komersial dimula ▪ Kapasitas produksi kertas mencapai 350 ribu ton pertahun
1999	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Penyelesaian <i>pulp line 2</i>, fasa I & III ▪ Ekspansi kapasitas produksi <i>pulp</i> mencapai 850 ribu ton
2000	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Beralih ke sistem tanam tebang ▪ Meraih sertifikat ISO 9001 untuk sistem manajemen mutu
2001	Semua <i>fiber</i> perkebunan milik APRIL telah memperoleh ISO 14001 dari SGS <i>Yarsely International Certification Services</i>

2002	Meraih sertifikat ISO 14001 untuk sistem manajemen Lingkungan
2005	<i>Launching PAPEROne™</i>
2006	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Meraih sertifikat OHSAS 18001 untuk K3 operasi pabrik ▪ Mendapat penghargaan sertifikasi dari Lembaga Ekolabel Indonesia (LEI) untuk pemenuhan standar Pengelolaan Hutan Tanaman Lestari (PHTL)
2007	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kerjasama pabrik Asia pertama dengan <i>ColorLok Technology</i>
2008	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pengenalan improvisasi pada <i>packaging PAPEROne™</i>
2009	Menerima CSR Recognition Award dari <i>Singapore Compost and United Nations Global Compost</i>
2011	Produksi <i>pulp</i> mencapai 2,45 juta ton
2013	Meraih sertifikat SNI Marking untuk percetakan kertas dari
2016	PAPICs Tidak menggunakan MHW lagi, <i>running full acacia</i>

4.2.2. Ruang Lingkup Bidang Usaha

PT. Riau Andalan *Pulp and Paper* (RAPP) terletak di Pangkalan Kerinci, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan yang berjarak sekitar 75 km dari Pekanbaru, ibukota Provinsi Riau, sedangkan kantor pusat dan urusan administrasi serta kerjasama terletak di Jl. Teluk Betung No. 31 Jakarta Pusat 10230. PT. Riau Andalan Pulp & Paper merupakan perusahaan yang bergerak dalam industri *pulp* (bubur kertas) dan kertas.

Lokasi produksi PT. RAPP yang terletak di Pangkalan Kerinci merupakan lokasi yang strategis karena dekat dengan sumber bahan baku (kawasan HTI) dengan iklim yang sesuai untuk pertumbuhan pohon yang menjadi bahan

baku pulp dan kertas. Bahan baku pendukung produksi berupa air juga mudah diperoleh karena kawasan ini dekat dengan Sungai Kampar.

Bahan baku diperoleh dari lahan konsesi pabrik seluas 280.500 ha, dimana rencana tata ruang HTI (Hutan Tanaman Industri) diperkirakan seluas 189.000 ha dan areal efektif tanam seluas 136.000 ha. Areal kehutanan tersebut terdiri dari 8 sektor : Logas (Utara dan Selatan), Teso Barat, Teso Timur, Langgam, Baserah, Cerenti, Ukui, dan Mandau. Pada tahun 2000 bahan baku yang berasal dari kayu alam *Mix Hard Wood* (MHW) mulai digantikan dengan kayu hasil tanam yaitu jenis Akasia. Akasia yang ditanam yaitu Akasia Mangium, Akasia Crassicarpa dan Eucaliptus.

PT. RAPP memiliki beberapa unit bisnis, yaitu :

1. PT. Riau Andalan *Pulp* atau Riau *Pulp*, merupakan unit bisnis yang bergerak di bidang produksi *pulp*, yang lebih dikenal dengan unit *fiber line*.
2. PT. Riau Andalan Kertas atau Riau *Paper*, merupakan unit bisnis yang memproduksi kertas.
3. PT. Riau Prima Energi atau Riau Energi, unit bisnis yang bergerak di bagian penyuplai energi. Berfungsi sebagai penghasil energi yang digunakan untuk proses produksi, termasuk didalamnya mengelola unit *Evaporator* dan *Recovery Boiler*
4. *Forestry* atau Riau *Fiber*, unit bisnis yang bergerak di bagian *forestry* untuk *supply* bahan baku kayu.

5. *Recaust and Kiln* (RK), unit yang berfungsi untuk memproduksi bahan kimia pemasak *white liquor* yang digunakan untuk proses *cooking* di digester dan memproduksi CaO.

Disamping itu terdapat juga *Pec-Tech* yang bergerak dibidang konstruktor pembangunan perusahaan, jalan, dan prasarana lainnya, serta PT. Kawasan Industri Kampar (KIK) sebagai pemilik dan pengelola seluruh kawasan industri di PT. RAPP.

PT. Riau Andalan kertas (PT. RAK) atau yang lebih dikenal dengan Riau *Paper* merupakan pabrik pembuatan kertas, yang memproduksi kertas *photocopy* dan *uncoated wood free* bergramatur 50 gsm sampai 120 gsm dengan menggunakan 2 unit mesin kertas berteknologi terkini dan berkecepatan tinggi. Kertas yang dihasilkan oleh Riau *paper* dipasarkan dalam bentuk *Cut Size*, *Folio Sheeter* maupun gulungan (Roll), dengan merek dagang yang telah dikeluarkan seperti: *PaperOne*, *Copy Paper* dan Dunia Mas. Adapun wilayah pemasaran produk Riau *paper* adalah Eropa, Asia, dan pasar dalam negeri. Disamping memproduksi kertas untuk dipasarkan dengan merek dagang sendiri, Riau Paper juga memproduksi kertas untuk merek dagang pelanggan diluar negeri seperti *Xerox business*, *Imperial* dan *Galaxy*.

4.2.3. Visi dan Misi Perusahaan

PT. Riau Andalan *Pulp & Paper* memiliki visi dan misi yang selama ini selalu dipegang teguh dan dijalankan

1. Visi Perusahaan

Visi perusahaan adalah menjadi salah satu perusahaan pulp dan kertas terbesar di dunia dengan manajemen terbaik, paling menguntungkan, berkesinambungan serta merupakan perusahaan pilihan bagi para pelanggan dan karyawan. Selain visi diatas terdapat juga visi yang lain yaitu sebagai berikut:

- a. Mengimplementasikan dan mempertahankan sistem manajemen mutu yang berdasarkan standar internasional.
- b. Menyusun dan menentukan tujuan mutu yang realistis dengan uraian sasaran dan tanggungjawab memantau pelaksanaan guna menjamin peningkatan mutu yang berkesinambungan.
- c. Secara aktif mencari dan menampung informasi baik dari pelanggan kita tentang produk dan pelayanan yang kita berikan
- d. Memastikan kebijakan ini dimengerti dan dilaksanakan oleh setiap karyawan dalam ruang lingkup pekerjaannya masing-masing.
- e. Selalu melakukan sesuatu dengan benar pada awal dan seterusnya

2. Misi Perusahaan

Misi perusahaan adalah sebagai berikut:

- a. Membangun dan mengembangkan suatu kelompok usaha regional yang dikelola suatu usaha internasional yang terdiri dari profesional yang bermotivasi tinggi dan memiliki komitmen.
- b. Pertumbuhan yang berkesinambungan dan selalu menjadi yang terbaik di bidang industri maupun segmen pasar yang dimasuki.

- c. Memaksimalkan hasil perusahaan yang membawa manfaat bagi pihak terkait, dengan ikut berpartisipasi dan berkontribusi pada pembangunan sosial ekonomi nasional regional.

4.2.4. Daerah Pemasaran

Pulp yang dihasilkan adalah jenis *Fully Bleached Kraft Pulp* dan serat pendek (*hard wood*). Hasil produksi berupa *pulp* kering dalam bentuk lembaran-lembaran dengan kualitas tinggi. Hasil akhir pulp 63 % digunakan untuk kertas printer, 21 % untuk kemasan kertas (*coated paper*), 8% untuk kertas tissue, dan 5% untuk kertas buku.

Produksi kertas dimulai sejak April tahun 1998 dan peluncuran pertamanya dilakukan pada bulan Mei di Singapura. Tahun 2001, produksi kertas mencapai 0.3 juta ton/tahun. Produk kertas yang diproduksi ada tiga jenis, yaitu *customer roll*, *cut size*, dan *folio*. Produk kertas yang berupa gulungan (*customer rolls*) lebarnya 480-2200 mm dengan berat 60,70,75,80,90,100,120 gr/m². Lembaran-lembaran kertas yang berbentuk folio sesuai ukuran standar dan *cut size* memiliki berat 60,70,80,90,100,dan 120 gr/m.

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Evaluasi CSR adalah pengukuran niat baik dan komitmen dari suatu perusahaan untuk memberikan kontribusi terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat lokal dan kegiatan ini berawal dengan membangun hubungan yang harmonis antara perusahaan dengan lingkungannya. Dalam hal ini berkaitan dengan tanggung jawab ekonomi, tanggung jawab hukum, tanggung jawab etis, tanggung jawab diskresi yang dilakukan PT. RAPP Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan dalam memberikan dampak positif bagi masyarakat dan lingkungan sekitar termasuk pembangunan Kabupaten Pelalawan itu sendiri.

CSR ini dilaksanakan karena berkaitan dengan etika bisnis. Etika bisnis ini timbul dari adanya interaksi bisnis antara manusia yang saling melengkapi pemenuhan kebutuhan antara yang satu dengan yang lain sebagai akibat dari kompleksitas kebutuhan manusia yang kian berkembang dan tidak terbatas. Etika bisnis dapat menjembatani kepentingan antara kebutuhan PT. RAPP dengan masyarakat khususnya di Kabupaten Pelalawan, baik yang terkena dampak langsung maupun tidak langsung dari operasional perusahaan ini.

CSR ini wajib dilakukan, karena lahirnya Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 6 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Provinsi Riau semakin memperkokoh landasan hukum pelaksanaan Corporate Social Responsibility bagi perusahaan-perusahaan yang beroperasi di wilayah Provinsi Riau, termasuk perusahaan kehutanan seperti PT Riau Andalan Pulp and Paper.

Pada Pasal 9 Ayat (1) ditegaskan bahwa setiap perusahaan di Provinsi Riau wajib sebagai pelaksana Program TJSP. Artinya, ketentuan ini merupakan pelengkap dari ketentuan sebelumnya yang hanya mewajibkan kepada perusahaan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam untuk melaksanakan *Corporate Social Responsibility*.

Apabila ada perusahaan di Provinsi Riau yang tidak melaksanakan *Corporate Social Responsibility* kepada masyarakat yang bertempat tinggal di sekitar lokasi perusahaan, maka berdasarkan Pasal 32 Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 6 Tahun 2012, perusahaan tersebut akan dikenakan sanksi administratif oleh Pemerintah Provinsi Riau berupa teguran tertulis dan bentuk-bentuk sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Sebagai bagian dari Program TJSP, Pemerintah Provinsi Riau membentuk Forum TJSP yang dipimpin langsung oleh Gubernur Riau. Forum TJSP bertugas mengawasi pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* perusahaan-perusahaan yang ada di Provinsi Riau, termasuk PT Riau Andalan Pulp and Paper. Pada Pasal 28 Ayat (1) Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 6 Tahun 2012 tentang Tanggungjawab Sosial Perusahaan di Provinsi Riau ditegaskan bahwa setiap perusahaan harus memberikan laporan pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun kepada pemerintah daerah melalui Forum TJSP.

Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun 2016 – 2021 menyebutkan strategi, arah kebijakan, dan program pembangunan daerah.

Tabel V.1. Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi Pembangunan Daerah Kabupaten Pelalawan 2016-2021

Tujuan	Sasaran	Strategi
Misi I : Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia Unggul, Beriman, Bertaqwa dan Berbudaya Melayu		
Meningkatkan kualitas Pendidikan (Pelalawan CERDAS)	Meningkatkatnya kualitas dan aksesibilitas pendidikan	Peningkatan pelayanan pendidikan anak usia dini bermutu, merata, dan terjangkau.
		Peningkatan pelayanan pendidikan dasar bermutu, merata, dan terjangkau.
		Menyelenggarakan pendidikan masyarakat di Luar Sekolah dan pemberian dukungan beasiswa serta pendidikan tinggi
Meningkatkan kualitas dan kompetensi tenaga kerja	Meningkatnya keterampilan tenaga kerja	Meningkatkan pelayanan pendidikan dan pelatihan tenaga kerja
Meningkatkan tatanan sosial kemasyarakatan yang berbudaya melayu, beriman dan bertaqwa	Meningkatnya Pemahaman dan Penerapan Nilai Budaya Melayu	Peningkatan Pemahaman Nilai-nilai Budaya
	Terjaminnya kebebasan, Kenyamanan dan Motivasi dalam Beribadah	Peningkatan Pemahaman Keagamaan, Keimanan dan Ketaqwaan
Misi II : Meningkatkan Kualitas Kesehatan Masyarakat dan Lingkungan		
Meningkatkan Jangkauan dan Kualitas Pelayanan Kesehatan Masyarakat dan Kesehatan Lingkungan (Pelalawan SEHAT)	Meningkatnya Jangkauan dan Pelayanan Kesehatan Masyarakat	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan
		Peningkatan Keikutsertaan Masyarakat dalam Mewujudkan Pelalawan Sehat
	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Lingkungan	Pencegahan Pencemaran Air, Udara dan Tanah
		Peningkatan Pelayan Air Bersih dan Persampahan
		Melaksanakan Konservasi Lingkungan
	Pelibatan Masyarakat dalam Menjaga Kelestarian Lingkungan	

Tabel V.1. Lanjutan

Tujuan	Sasaran	Strategi
Misi III : Meningkatkan Penguatan Sistem Inovasi untuk Mendukung Perekonomian Daerah yang Kuat dan Berdaya Saing Tinggi		
Mewujudkan Inovasi Daerah dalam Pembangunan (Pelalawan INOVATIF)	Meningkatnya ekosistem dan Budaya Inovasi, daya dukung penyediaan dan pemanfaatan teknologi/ inovasi, jaringan inovasi dan keselarasan perkembangan global	Peningkatan Budaya Inovasi Pemerintah dan Masyarakat
		Peningkatan Penguasaan Teknologi dan Inovasi
		Desiminasi Teknologi dan Pembangunan Pusat Keunggulan
Misi IV : Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur		
Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Infrastuktur Perhubungan (Pelalawan LANCAR)	Meningkatnya kualitas dan kuantitas Infrastruktur jalan	Peningkatan pembangunan jalan dan jembatan
	Meningkatnya keselamatan dan kelancaran transportasi	Peningkatan rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan
Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Infrastuktur Kelistrikan (Pelalawan TERANG)	Meningkatnya Pembangunan Jaringan Listrik Pedesaan	Peningkatan kualitas pelayanan angkutan darat
Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur lainnya dan kawasan strategis	Meningkatnya pembangunan infrastruktur publik lainnya dan penataan ruang	Meningkatkan penyediaan listrik pedesaan
		Peningkatan penyediaan gedung pemerintah dan prasarana publik
	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Kawasan Strategis Daerah	Peningkatan penataan lingkungan pemukiman
		Peningkatan penyelenggaraan penataan ruang
Misi V : Meningkatkan Kinerja Birokrasi dan Otonomi Desa		
Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih dan Profesional	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, transparan, dan akuntabel serta kinerja pelayanan yang optimum	Percepatan pembangunan infrastruktur utama kawasan teknopolitan
		Peningkatan pembangunan infrastruktur kawasan objek wisata unggulan
		Penegakan disiplin ASN
		Pencegahan KKN
		Perumusan dan Penyerbarluasan informasi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah
		Pengendalian dan evaluasi kegiatan pembangunan daerah secara berkala
		Peningkatan kualitas pelayanan publik
Mewujudkan Kemandirian Desa	Meningkatnya jumlah desa maju dan mandiri	Peningkatan pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan
		Peningkatan pelayanan pengelolaan keuangan
		Peningkatan kualitas pelayanan pemerintahan desa

Tabel V.1. Lanjutan

Tujuan	Sasaran	Strategi	
		Penguatan kelembagaan ekonomi masyarakat desa	
		Penguatan kelembagaan masyarakat desa	
Misi VI : Meningkatkan Investasi dan Pengelolaan Sumberdaya Unggulan Daerah Berbasis Kerakyatan dan Partisipasi Masyarakat yang Berkelanjutan			
Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi Daerah yang Berkelanjutan (Pelalawan MAKMUR)	Meningkatnya kemandirian ekonomi dan terkendalinya kesenjangan pendapatan	Peningkatan pengelolaan potensi sumberdaya pertanian, perikanan, peternakan dan perkebunan	
	Meningkatnya investasi daerah	Peningkatan daya saing industri usaha kecil menengah	
	Meningkatnya ketahanan pangan daerah dan pendapatan masyarakat		Peningkatan promosi investasi
			Pemberian kemudahan dan insentif investasi
		Peningkatan ketersediaan pangan	
		Pembentukan (Penguatan) cadangan pangan	
		Peningkatan upaya perbaikan kualitas konsumsi pangan dan gizi masyarakat	
		Pelibatan perempuan dalam penyediaan pangan dan peningkatan ekonomi keluarga	
Mewujudkan Pengelolaan Sumberdaya Pariwisata Berbasis Masyarakat (Pelalawan EKSOTIS)	Meningkatnya Destinasi Wisata Unggulan Daerah	Peningkatan daya tarik destinasi wisata	
Misi VII : Meningkatkan Ketertiban dan Keamanan			
Terwujudnya Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	Menurunnya tingkat kriminalitas	Peningkatan upaya pencegahan tindak kriminalitas	
		Peningkatan upaya penindakan tindak kriminalitas	
		Peningkatan pencegahan dan penanggulangan konflik sosial	
		peningkatan kesiapsiagaan bencana	
		Peningkatan jaminan kesejahteraan sosial	

Sumber: RPJMD Kabupaten Pelalawan Tahun 2016-2021

PT Riau Andalan Pulp and Paper setiap tahunnya rutin melaksanakan *Corporate Social Responsibility* kepada masyarakat yang bertempat tinggal di sekitar lokasi perusahaan dengan alokasi anggaran yang cenderung menurun khususnya selama pandemi covid-19 ini. CSR PT. RAPP Pangkalan Kerinci

dilaksanakan secara berkesinambungan, setiap pertriwulan (3 bulan sekali). Adapun untuk setiap program yang dilakukan dalam upaya pemenuhan tanggungjawab sosial dari perusahaan pengolahan dan produksi kertas terkemuka di Provinsi Riau.

Tabel V.2. Pelaksanaan Program CSR PT. RAPP Berdasarkan Kategori Tahun 2017 s/d 2020

No	Kategori	Kegiatan
(1)	(2)	(3)
1	Pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> - Bea siswa Perguruan Tinggi - Bea siswa SMA - Bea siswa SMP - Bea siswa SD - Bantuan gaji guru honor - Beasiswa Perguruan Tinggi - Beasiswa SMA - Pelatihan guru - Bantuan fasilitas sekolah - Bantuan genset sekolah
2	Kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> - Paket makanan tambahan - Lomba balita sehat - Pengadaan PMT - Bantuan baju kader Posyandu - Lomba balita sehat - Bantuan sunatan massal - Bantuan pengadaan peralatan pencegah kebakaran - Bantuan material bangunan posyandu - Bantuan masker dan obat kesehatan - Bantuan operasional sarana fasilitas alat pemadam kebakaran - Bantuan akomodasi petugas pemadaman - Bantuan dana tunai kepada para korban kebakaran hutan
3	Sosial	<ul style="list-style-type: none"> - Pelatihan budidaya sapi bali - Bantuan ternak sapi pola RF - Bantuan saprodi program FFV - Pelatihan budidaya padi sawah - Gotong royong - Santunan anak yatim - Pemberian bantuan sembako korban kebakaran - Pembangunan tiang bendera

No	Kategori	Kegiatan
(1)	(2)	(3)
4	Infrastruktur	<ul style="list-style-type: none"> - Bantuan material bangunan posyandu - Pembangunan proyek sumber air bersih - Perbaikan jalan kebun masyarakat - Bantuan material bangunan
5	Lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> - Bantuan sarana dan prasarana fasilitas olahraga masyarakat - Penyiraman jalan Desa - Penghijauan taman desa
6	Pemberdayaan masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> - Kursus pelatihan mekanik dan menjahit - Bantuan mesin perontok jagung - Budidaya nenas - Bantuan jaring - Produksi batik - Pelatihan UMKM masyarakat terdampak covid19

Sumber: Dokumentasi RAPP, 2021

Selain melaksanakan *Corporate Social Responsibility* sesuai dengan program-program yang telah dijelaskan di atas, PT Riau Andalan Pulp and Paper juga memiliki program bernama 'donation', yaitu program *Corporate Social Responsibility* berupa pemberian dana kepada organisasi maupun kelompok masyarakat yang mengajukan proposal permohonan bantuan dana melalui Kantor Humas PT Riau Andalan Pulp and Paper. Akan tetapi, anggaran yang disediakan untuk program ini jumlahnya terbatas.

5.1. Evaluasi Pelaksanaan Program *Corporate Social Responsibility* (CSR)

PT. RAPP Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan

Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 6 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Provinsi Riau pasal 9 ayat (1) menegaskan bahwa setiap perusahaan di Provinsi Riau wajib sebagai pelaksana TJSP. Selanjutnya dalam pasal 25 huruf c bagi perusahaan Perseroan Terbatas yang menjalankan

kegiatan usahanya dibidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan TJSP dengan biaya yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya operasional perusahaan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran berdasarkan ukuran usaha, cakupan pemangku kepentingan dan kinerja keuangannya. Dalam pasal 8 maka, perusahaan yang melaksanakan TJSP wajib:

- a. Menyusun rancangan penyelenggaraan program TJSP sesuai dengan prinsip-prinsip tanggung jawab sosial dunia usaha dengan memperhatikan kebijakan pemerintah daerah dan peraturan perundangan;
- b. Menumbuhkan, memantapkan dan mengembangkan sistem jejaring kerjasama dan kemitraan dengan pihak-pihak lain serta melaksanakan kajian, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan TJSP dengan memperhatikan kepentingan perusahaan, pemerintah daerah, masyarakat dan kelestarian lingkungan;
- c. Menetapkan komitmen bahwa program TJSP adalah bagian yang tidak terpisahkan dalam kebijakan manajemen maupun program pengembangan perusahaan di dalam peraturan perusahaan; dan
- d. Menerima usulan masyarakat baik perorangan maupun kelompok yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

PT Riau Andalan Pulp & Paper (RAPP) sebagai salah satu perusahaan terbesar yang ada di Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau harus melaksanakan CSR. Demi menjaga hubungan baik dengan pemerintahan terutama dengan masyarakat, PT Riau Andalan Pulp and Paper menjalankan *corporate social responsibility* yang telah ditetapkan oleh undang-undang nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas yakni : Tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL) adalah komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat. Oleh sebab itu sesuai dengan peraturan, PT. RAPP Pelalawan harus melaksanakan *corporate social responsibility*.

Menurut Pearce dan Robinson (55:2013) konsep utama dari *corporate social responsibility* terdiri dari empat konsep yang menjadi patokan bagi perusahaan dalam melaksanakan CSR yaitu tanggung jawab ekonomi (*economic responsibilities*), tanggung jawab hukum (*legal responsibilities*), tanggung jawab etis (*ethical responsibilities*), dan tanggung jawab diskresi (*discretionary responsibilities*).

Adapun hasil evaluasi terhadap pelaksanaan program *corporate social responsibility* (CSR) PT. RAPP Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan, berdasarkan 4 konsep evaluasi CSR di atas dijabarkan sebagai berikut:

5.1.1. Tanggung Jawab Ekonomi (*economic responsibilities*)

Tanggung jawab ekonomi merupakan tanggung jawab sosial perusahaan yang paling mendasar. Untuk memenuhi tanggung jawab ekonomi perusahaan, manajer harus memaksimalkan laba, jika memungkinkan. Tanggung jawab inti perusahaan adalah menyediakan barang dan jasa kepada masyarakat dengan biaya layak. Dalam menjalankan tanggung jawab ekonomi, perusahaan juga dapat bertanggungjawab secara sosial dengan menyediakan pekerjaan yang produktif bagi angkatan kerja, membayar pajak untuk pemerintah lokal, Negara bagian dan federal.

5.1.1.1. Penyerapan tenaga kerja setempat

Penyerapan tenaga kerja adalah banyaknya lapangan kerja yang sudah terisi yang tercermin dari banyaknya jumlah penduduk bekerja. Penduduk yang bekerja terserap dan tersebar di berbagai sektor perekonomian. Terserapnya penduduk

bekerja disebabkan oleh adanya permintaan dan ketersediaan tenaga kerja pada sebuah perusahaan di suatu daerah tertentu.

Tabel V.3. Jumlah Pencari Kerja yang Mendaftar di Kantor Dinas Tenaga Kerja Menurut Tingkat Pendidikan dan Kecamatan di Kabupaten Pelalawan Tahun 2020

No	Kecamatan	SD	SMP	SMA	Diploma	Sarjana
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Langgam	5	-	46	-	4
2	Pangkalan Kerinci	1	4	68	5	26
3	Bandar Sei Sekijang	-	-	19	-	3
4	Pangkalan Kuras	-	-	33	5	12
5	Ukui	-	-	17	-	4
6	Pangkalan Lesung	2	-	11	2	6
7	Bunut	-	-	6	-	1
8	Pelalawan	-	1	5	-	4
9	Bandar Petalangan	-	-	8	-	1
10	Kuala Kampar	-	-	2	-	1
11	Kerumutan	2	-	25	1	1
12	Teluk Meranti	-	-	8	1	1
	Total	10	5	248	14	64

Sumber: BPS Kabupaten Pelalawan, 2021

Berdasarkan tabel di atas, tampak bahwa di Kecamatan Pangkalan Kerinci terdapat jumlah pencari kerja paling banyak dibandingkan kecamatan lainnya. Terdapat total 104 orang yang mendaftar di Dinas Tenaga Kerja Pelalawan pada tahun 2020, padahal lokasi Perusahaan PT RAPP terletak di Kecamatan Pangkalan Kerinci namun adanya perusahaan ini dinilai masih diragukan dapat menyerap tenaga kerja setempat secara konsisten.

Berdasarkan hasil wawancara terhadap penyerapan tenaga kerja setempat didapatkan hasil sebagai berikut:

“Penyerapan tenaga kerja adalah salah satu prioritas CSR kami, dari awal berdiri dengan target penyerapan itu mencapai 5.000 orang tenaga kerja lalu 90 ribu orang tenaga kerja tidak langsung ini total keseluruhan ya. Untuk tenaga kerja setempat, kita targetkan 600 orang karna ditahun 2022 besok akan ada penambahan kapasitas produksi jadi pasti butuh sdm orang sekitar sini bisa

diandalkan agar saling menguntungkan antara kami, dengan masyarakat sekitar” (Wawancara Manajer CSR PT RAPP, tanggal 04 Oktober 2021).

Berdasarkan wawancara di atas, tampak bahwa tanggung jawab ekonomi terbentuk dengan adanya timbal balik untuk saling diuntungkan, keterhubungan antara kelompok masyarakat dengan perusahaan, sehingga bermanfaat bagi masyarakat untuk mempercepat peningkatan kesejahteraan, membuka ruang kerja dan kesempatan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, dan memberdayakan kehidupan masyarakat baik secara ekonomi, kelembagaan sosial, dan memperkecil terjadinya konflik sosial.

Berdasarkan hasil wawancara terhadap penyerapan tenaga kerja setempat didapatkan hasil sebagai berikut:

“Tahun 2018 kemarin, itu ada isu memang masalah tenaga kerja asing (TKA). Mereka masyarakat setempat komplain banyak katanya orang asing karyawan baru yang masuk. Padahal, kami sudah melaporkan itu ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Riau telah disetujui oleh Pemerintah RI melalui Kementerian Tenaga Kerja. Khusus pemasangan mesin hingga start up, memang sudah menjadi tanggungjawab perusahaan yang menyediakan mesin. Yang mana mesin itu dibeli dari Cina. Kontrak kerjanya seperti itu. Tapi untuk mesin sampai start up saja. Selebihnya tenaga kerja lokal dari kita yang bekerja saat pabrik beroperasi.” (Wawancara dengan Humas PT RAPP tanggal 04 Oktober 2021).

Berdasarkan penjelasan di atas, diketahui bahwa PT. RAPP Pelalawan telah melakukan tanggung jawab sosial ekonomi dengan cara menyerap tenaga kerja lokal setempat. Jika PT. RAPP Kecamatan Pangkalan Kerinci sudah mencapai keuntungan secara ekonomis maka perusahaan sudah memenuhi tanggung jawab sosialnya. Dengan alasan bahwa jika perusahaan mempunyai keuntungan secara ekonomis maka perusahaan tersebut akan mempunyai aspek sosial terhadap pemerintah, tenaga kerja dan masyarakat.

Dengan masih banyaknya jumlah pengangguran di Kabupaten Pelalawan yakni mencapai 14.223 jiwa serta di Kecamatan Pangkalan Kerinci terdapat jumlah pencari kerja paling banyak dibandingkan kecamatan lainnya. Terdapat total 104 orang yang mendaftar di Dinas Tenaga Kerja Pelalawan pada tahun 2020 mengindikasikan bahwa Penyerapan tenaga kerja setempat oleh PT RAPP masih belum optimal.

5.1.1.2. Bantuan ekonomi langsung dan tidak langsung

Bantuan ekonomi merupakan salah satu aspek penting, karena ekonomi masyarakat sekitar perlu mendapat perhatian oleh perusahaan sehingga diharapkan adanya perusahaan di suatu kawasan tertentu tidak semata-mata mengejar untung belaka, melainkan memberikan dampak peningkatan ekonomi oleh masyarakat.

Tabel V.4. Bantuan Ekonomi Langsung dan Tidak Langsung Tahun 2017-2019

No	Uraian	Jenis program (tahun pelaksanaan)	Anggaran
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Bantuan langsung	<i>Donation</i> (2019)	Rp.25.000.000,-
2	Bantuan tidak langsung	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Vocational Training</i> (2017) 2. <i>Education</i> (2017) 3. <i>Social Infrastructure Program</i> (2018) 4. <i>Integrated farming system</i> (2018) 5. <i>Employe volunteerism</i>(2019) 6. <i>Small and Medium Enterprises</i> (2019) 	<p>Rp.8.500.000,-</p> <p>Rp.12.470.000,-</p> <p>Rp.2.500.000,-</p> <p>Rp.10.000.000,-</p> <p>Rp.1.500.000,-</p> <p>Rp.4.650.000,-</p>

Sumber: Dokumentasi PT RAPP, 2021

Berdasarkan tabel di atas, tampak bahwa bantuan ekonomi langsung yang diberikan berbentuk program donation, sementara bantuan tidak langsung terdiri dari *Vocational Training (VT)*, *Education, Social Infrastructure Program (SIP)*, *Integrated farming system (IFS)*, *Employe volunteerism*, dan *Small and Medium Enterprises (SME)*.

Berdasarkan hasil wawancara terhadap bantuan ekonomi langsung dan tidak langsung didapatkan hasil sebagai berikut:

“Ada, salah satunya memang contoh untuk pembatik di pelalawan. Mereka diberikan bantuan modal 50 juta berupa bahan baku kayak kainnya, lilin lalu diberikan juga pelatihan di daerah Jogjakarta, Pekalongan, Solo, di Padang juga. Itu tergabung dalam Tonato Foundation, setahu saya mereka fokus pada aspek pengembangan Usaha Kecil Menengah (UKM), pengembangan petani kelapa sawit, memfasilitasi pembentukan koperasi atau kelompok petani, hingga melatih praktik pertanian yang baik dan ketrampilan lainnya.” (Wawancara Camat Pangkalan Kerinci, tanggal 04 Oktober 2021).

Hasil wawancara ini, juga didukung dengan pendapat masyarakat yang menyatakan bahwa;

“Iya benar, saya ada dikasih bantuan modal dan kain, jadi kami bisa bekerja membuat batik. para ibu rumah tangga ini mendapat upah dari tiap lembar yang dikerjakannya sebesar Rp 100-200 ribu sementara batik tulis dijual dengan harga antara Rp350-500 ribu dan semi tulis Rp200-300 ribu. Jadi sangat terbantu karena kita bisa ada penghasilan bersih. Kalau ditanya gaji saya dapat sekitar 2 juta an juga sebulan” (Wawancara Masyarakat Penerima Program CSR Kecamatan Pangkalan Kerinci, tanggal 9 Oktober 2021).

Berdasarkan penjelasan di atas, diketahui bahwa PT. RAPP Pelalawan telah memberikan bantuan ekonomi langsung dan tidak langsung yang berbentuk penambahan bantuan modal, pelatihan kompetensi UKM salah satunya pembatik bagi ibu-ibu rumah tangga di Pangkalan Kerinci. Hal ini turut meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat secara tidak langsung.

Menarik kesimpulan di atas, maka PT RAPP Pangkalan Kerinci telah melaksanakan kegiatan bantuan ekonomi langsung dan tidak langsung. Adapun baik bantuan tersebut ditujukan agar masyarakat penerima bisa mendapatkan manfaat jangka pendek dari program donation, dan juga manfaat jangka panjang dari program CSR lainnya.

5.1.2. Tanggung jawab hukum (*legal responsibilities*)

Mencerminkan kewajiban perusahaan untuk mematuhi undang-undang yang mengatur aktivitas bisnis. Gerakan konsumen serta lingkungan hidup mengarahkan perhatian publik yang semakin besar pada tanggung jawab sosial perusahaan dengan melakukan lobi untuk diberlakukannya undang-undang yang mengatur bisnis dalam hal pengendalian populasi dan keselamatan konsumen.

5.1.2.1. Kepatuhan terhadap undang-undang dan peraturan daerah

Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Pasal 74 tentang Perseroan Terbatas (UUPT). Melalui undang-undang ini, industri atau korporasi didorong untuk memberikan kontribusi dalam upaya untuk mewujudkan kesejahteraan sosial dan pengelolaan kualitas hidup masyarakat. UUPT menyebutkan bahwa setiap perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Jika tidak dilakukan, maka perseroan tersebut akan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undang CSR sangat penting keberadaannya untuk menciptakan hubungan yang baik antara perusahaan dan masyarakat dimana perusahaan tersebut berproduksi.

Dalam pasal 74 ayat (3) Undang-Undang Perseroan Terbatas menyatakan, bahwa perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana pasal 1 tentang TJSP ini akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan hasil wawancara terhadap kepatuhan terhadap undang-undang dan peraturan daerah didapatkan hasil sebagai berikut:

“RAPP itu harus patuh pertama pada UU nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, lalu untuk CSR nya sendiri di Perda Nomor 6 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Provinsi Riau, mereka saya pikir sudah melaksanakannya dan bisa kita lihat di banyak aspek, selain itu juga saya pikir masih banyak perusahaan lain yang memang belum melaksanakan CSR ini”. (Wawancara dengan Kepala Bidang Ekonomi dan Kerjasama Bappeda Pelalawan tanggal 07 Oktober 2021).

Pentingnya kepatuhan perusahaan atas pelaksanaan CSR di Provinsi Riau sendiri juga telah ditegaskan dalam Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 6 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Provinsi Riau pasal 9 ayat (1) menyebutkan setiap perusahaan di Provinsi Riau wajib sebagai pelaksana TJSP. Selanjutnya dalam pasal 25 huruf c bagi perusahaan Perseroan Terbatas yang menjalankan kegiatan usahanya dibidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan TJSP dengan biaya yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya operasional perusahaan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajiban berdasarkan ukuran usaha, cakupan pemangku kepentingan dan kinerja keuangannya.

Menarik kesimpulan penjelasan di atas, diketahui bahwa PT. RAPP Pelalawan telah melakukan tanggung jawab kepatuhan terhadap undang-undang dan peraturan daerah dalam aspek hukum. PT. RAPP Pelalawan melaksanakan

aktivitas bisnis melampaui kewajiban hukum serta melaksanakan investasi untuk kegiatan sosial dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan komunitas dan memelihara lingkungan hidup.

5.1.2.2. Pelaporan kegiatan CSR

CSR penting untuk dilaporkan, hal ini menjadi dasar bagi setiap pemerintah daerah untuk mewujudkan perusahaan yang peduli lingkungan baik kepada pihak pemerintah dan juga masyarakat.

Tabel V.5. Pelaporan kegiatan Realiasi CSR Periode 2017-2020

No	Program	Pelaporan Pelaksanaan	Anggaran
(1)	(2)	(3)	(4)
1	<i>Vocational Training (VT) 2017</i>	Triwulan I (Januari s/d Maret) Triwulan III (Juli s/d September)	Rp. 27.000.000,- Rp. 10.000.000,-
2	<i>Integrated farming system (IFS) 2017</i>	Triwulan I (Januari s/d Maret)	Rp. 83.000.000,-
3	<i>Small and Medium Enterprises (SME) 2017</i>	Triwulan I (Januari s/d Maret) Triwulan II (April s/d Juni)	Rp. 3.500.000,- Rp. 2.000.000,-
4	<i>Education 2019</i>	Triwulan III (Juli s/d September) Triwulan I (Januari s/d Maret)	Rp. 14.500.000,- Rp. 16.000.000,-
Total			Rp. 156.000.000,-

Sumber: Dokumentasi PT RAPP, 2021

Berdasarkan tabel di atas, tampak bahwa sistem pelaporan dilaksanakan pertigabulan, yaitu anggaran dana mencapai Rp.156.000.000,- dalam kondisi akhir bulan Oktober 2021. Selanjutnya didapatkan hasil wawancara terhadap pelaporan kegiatan CSR sebagai berikut:

“CSR itu sangat wajib dilaporkan, karena ada evaluasi atau auditnya oleh Pemerintah. Di bulan ini saja, kami akan diundang di Pekanbaru untuk menghadiri expose dukungan penganggulangan kemiskinan. Forum TJSP waktu itu terakhir pas bulan Januari 2021. Banyak anggota DPRD yang meragukan dana 40 miliar yang disampaikan oleh kami ini hanyalah sebagai bentuk pencitraan semata. Padahal itu ada laporannya loh, tapi dianggap bualan kalau

dilihat aslinya sudah banyak CSR yang dilakukan tetapi pandemi covid ini tentu kita fokus di sektor kesehatan dulu dan juga masalah internal perusahaan”(Wawancara dengan Humas PT RAPP tanggal 04 Oktober 2021).

Hasil wawancara ini juga sejalan dengan jawaban wawancara sebagai berikut:

“Orang RAPP sering kok datang ke desa, ngasih sosialisasi dan juga kunjungan lalu pernah juga ada ngasih bantuan untuk warga yang terdampak corona kemarin. Jadi saya pikir ada juga pelaporan mereka dalam bentuk kunjunganlah”(Wawancara dengan Tokoh Masyarakat Kecamatan Pangkalan Kerinci tanggal 12 Oktober 2021).

Berdasarkan penjelasan di atas, tampak bahwa PT. RAPP Pelalawan pada dasarnya sudah melaporkan kegiatan CSR nya. Akan tetapi hal ini masih belum mendapatkan dukungan dari pemerintah. Hal ini disebabkan karena audit penilaian atas kinerja TJSP yang dilakukan suatu perusahaan itu sendiri masih belum jelas akibat tidak jalannya Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 6 Tahun 2012 tentang Tanggung jawab Sosial Perusahaan di Provinsi Riau.

Sebagai bagian dari Program TJSP, Pemerintah Provinsi Riau membentuk Forum TJSP yang dipimpin langsung oleh Gubernur Riau. Forum TJSP bertugas mengawasi pelaksanaan Corporate Social Responsibility perusahaan-perusahaan yang ada di Provinsi Riau, termasuk PT Riau Andalan Pulp and Paper. Pada Pasal 28 Ayat (1) Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 6 Tahun 2012 ditegaskan bahwa setiap perusahaan harus memberikan laporan pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun kepada pemerintah daerah melalui Forum TJSP.

Menarik kesimpulan di atas, tampak bahwa laporan kegiatan CSR sudah berjalan dengan baik Hal ini disebabkan karena dalam setiap per tiga bulan sudah

ada rancangan maupun anggaran yang dipersiapkan untuk kegiatan pelaksanaan CSR yang akan dilaksanakan selanjutnya artinya laporan kegiatan CSR PT RAPP ini sudah sangat terintegrasi dengan cukup baik.

5.1.3. Tanggung jawab etis (*etchical responsibilities*)

Mencerminkan gagasan perusahaan mengenai perilaku bisnis yang benar dan layak. Tanggung jawab etis merupakan kewajiban yang melampaui kewajiban hukum. Perusahaan diharapkan, namun tidak diwajibkan untuk berperilaku secara tidak etis. Beberapa tindakan hukum dapat dianggap tidak etis. Tanggungjawab etis ini merujuk pada sikap perusahaan yang dianggap memenuhi harapan dan eskpektasi masyarakat meskipun tidak diwajibkan secara hukum.

5.1.3.1. Menjunjung tinggi kearifan dan adat masyarakat setempat

Menjunjung tinggi kearifan lokal oleh PT RAPP di Kabupaten Pelalawan merupakan suatu hal atau tindakan yang dianggap baik oleh masyarakat setempat. Makna kearifan lokal dalam hal ini budaya Melayu bisa terbentuk dan tercermin dari etika dan nilai-nilai luhur yang diyakini. Nilai yang tertanam dalam kearifan lokal bisa menjadi modal utama dalam membangun masyarakat tanpa merusak atau mengubah tatanan sosial yang berkaitan dengan lingkungan alam sekitar.

Wisata budaya menjadi salah satu unggulan sektor pariwisata di Pelalawan. Beberapa diantaranya adalah Istana Sayap di Kecamatan Pelalawan dan makam bersejarah yang tersebar di hampir seluruh kecamatan. Selain itu juga balai adat serta benda-benda bersejarah lainnya.

Tabel V.6. Pelaporan Kegiatan Realiasi CSR Kearifan dan Adat Masyarakat Periode 2021

No	Program	Pelaporan Pelaksanaan	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)
1	<i>Employee volunteerism</i>	Gotong royong (2017) Gotong royong (2018)	Rp. 500.000,- Rp. 500.000,-
Total			Rp. 1.000.000,-

Sumber: Dokumentasi PT RAPP, 2021

Berdasarkan tabel di atas, tampak bahwa kegiatan CSR PT RAPP kurang Menjunjung tinggi kearifan dan adat masyarakat setempat. Hal ini disebabkan karena bidang employee volunteerism hanya mengikuti kegiatan gotong royong di sekitar Kecamatan Pangkalan Kerinci saja.

Selanjutnya didapatkan hasil wawancara terhadap menjunjung tinggi kearifan dan adat masyarakat setempat kegiatan CSR sebagai berikut:

“Jarang mereka ikut acara budaya-budaya gitu. Kami sering minta dana bantuan pada pihak RAPP untuk acara-acara tertentu, dan memang kadang tembus kadang tidak. Itu sulitnya, kalau untuk budaya ya. Memang untuk urusan kesehatan, peternakan, perkebunan, pendidikan dan lain-lain mereka kencang tapi kalau untuk budaya saya pikir belum sesuai harapan kami”(Wawancara dengan Tokoh Masyarakat Kecamatan Pangkalan Kerinci tanggal 12 Oktober 2021).

Hasil wawancara ini juga sejalan dengan jawaban wawancara sebagai berikut:

“Untuk budaya dan kearifan lokal sendiri saya pikir mereka pihak RAPP sifatnya universal ya, mana yang harus digesa terlebih dahulu. Kalau mereka tidak ada mengusik budaya masyarakat sekitar ya pasti itu sudah termasuk menjaga sebenarnya. Kecuali mereka memasukkan budaya asing itu baru tidak boleh, saya pikir program CSR ini lebih dispeesifikkan pada hal-hal yang menjadi prioritas tertentu oleh kebijakan perusahaan itu sendiri kalau contoh RAPP ini produksi kertas tentu ya lingkungan yang jadi prioritas” (Wawancara Camat Pangkalan Kerinci, tanggal 04 Oktober 2021).

PT. RAPP Pelalawan pada dasarnya sudah berperilaku etis, dengan menjaga citra perusahaan dimata masyarakat dengan menjunjung tinggi nilai-nilai jalur

hukum dan kemanusiaan melalui kearifan lokal. Hasilnya dirasakan secara tidak langsung memberikan kontribusi yang dapat dirasakan oleh semua kalangan masyarakat, agar tujuannya dapat meningkatkan kualitas kehidupan antara RAPP dengan masyarakat sekitar.

Menarik kesimpulan penjelasan di atas, tampak bahwa CSR yang dilaksanakan PT RAPP belum memprioritaskan menjunjung tinggi kearifan dan adat masyarakat setempat. Meskipun secara mendasar kearifan lokal bersifat dinamis, yaitu bisa menyesuaikan dengan perubahan zaman. Jadi, meskipun kehidupan masyarakat telah masuk era modernisasi, nilai-nilai kearifan lokal tetap ada karena menyimpan nilai-nilai yang sudah mengakar di masyarakat luas. Dalam perkembangannya, kearifan lokal secara terus menerus menjadi pedoman dalam kehidupan agar masyarakat dapat bertahan hidup dengan aman, nyaman dan sejahtera.

5.1.3.2. Dukungan terhadap program pemerintah

Perusahaan diharapkan dapat mendukung berbagai program pemerintah, hal ini diwujudkan dalam partisipasi yang sesuai dengan visi dan misi daerah sehingga diharapkan baik pemerintah dan juga perusahaan dapat bersinergi dalam pembangunan daerah.

Tanggung jawab etis PT RAPP dalam mendukung program pemerintah juga tercermin dari laporan kegiatan sebagai berikut:

- 1) PT. Riau Andalan Pulp and Paper bersama Tanoto Foundation mengadakan Pelatihan Sistem Petani Terpadu (SPT). Pelatihan yang diikuti 31 peserta yang merupakan calon petani binaan di Kabupaten Pelalawan dan

Kabupaten Siak untuk meningkatkan kapasitas petani binaan melalui integrasi usaha pertanian dengan perikanan dan peternakan.

- 2) PT. Riau Andalan Pulp and Paper telah menyumbang sekitar 46,11% dari keseluruhan total pendapatan rumah tangga di area pusat usahanya yaitu Kabupaten Pelalawan. Hal itu berarti sumbangsih sekitar 10,73 triliun Rupiah.
- 3) Untuk jumlah keluaran nasional, PT. Riau Andalan Pulp and Paper memberi kontribusi cukup besar yaitu sekitar 196 triliun Rupiah. Harus dicatat bahwa dari jumlah tersebut, 175 triliun Rupiahnya berasal dari Propinsi Riau tempat RAPP berada.
- 4) PT. Riau Andalan Pulp and Paper menghibahkan setidaknya lima unit bangunan yang ada di kawasan balai pelatihan unggulan terpadu (BPUT) di Kebun Nenas desa Jake kecamatan Kuantan Tengah kepada Pemkab Kuansing.
- 5) PT. Riau Andalan Pulp and Paper telah berkontribusi terhadap peningkatan ekonomi daerah menyangkut kesempatan kerja bagi masyarakat lokal, dimana Kabupaten Pelalawan mengalami peningkatan 45% kesempatan kerja (dari 73% kesempatan kerja yang berasal dari RAPP di keseluruhan Riau).
- 6) Untuk saat ini, PT. Riau Andalan Pulp and Paper tengah berfokus pada program CSR mereka dengan membangun konsep eco-village terhadap desa di sekitar area konsesi. Dimana Ada sekitar 150 desa di sekitar areal di Pelalawan Riau yang nantinya akan mendorong terbangunnya eco-village,

menjadikan desa tersebut mampu mandiri dengan sumberdaya yang dimiliki.

- 7) Juga program-program rutin yang menyangkut CSR PT. Riau Andalan Pulp and Paper, seperti sumbangan hewan ternak, bimbingan dan ajakan kerjasama bagi pengusaha lokal dan sebagainya.

Selanjutnya didapatkan hasil wawancara terhadap dukungan terhadap program pemerintah sebagai berikut:

“Kami sering mendapat penghargaan perusahaan pelaksana CSR terbaik. Jujur saja CSR kami ini hampir dilakukan di seluruh sektor. Mulai dari kesehatan, ekonomi, pendidikan, peningkatan UKM, dan lain-lain. Jadi terakhir salah satu upaya yang diminta pemerintah daerah melalui Wakil Bupati pak Husni Merza yang juga dihadiri oleh pak Sihol Haritonang Direktur PT RAPP adalah pengentasan kemiskinan dan juga pelestarian lingkungan. Wabup juga berharap pemanfaat CSR PT. RAPP kedepannya dapat diarahkan selain untuk mengentaskan angka kemiskinan, juga pendampingan usah ekonomi kreatif terus mendorong peningkatan SDM para guru di Kabupaten Siak.” (Wawancara dengan Manajer CSR PT RAPP tanggal 04 Oktober 2021).

Hasil wawancara ini juga sejalan dengan jawaban wawancara sebagai berikut:

“Termasuk bagaimana setiap perusahaan yang ada di Kabupaten Siak mendukung program “Siak kabupaten Hijau” termasuk kami ini melalui program CSR-nya. Pemanfaatan lahan gambut untuk budi daya ikan gabus yang sesuai dengan visi Siak Hijau yakni untuk menerapkan prinsip kelestarian dan keberlanjutan dalam pemanfaatan sumber daya alam sebesar-besarnya bagi masyarakat.” (Wawancara dengan Humas PT RAPP tanggal 04 Oktober 2021).

Keberlanjutan lingkungan hidup sendiri berusaha untuk meningkatkan kesejahteraan manusia dengan melindungi dan mengontrol keuangan. Hampir kontras dengan modal ekonomi, keberlanjutan lingkungan hidup terdiri dari air, tanah, udara, mineral dan kualitas ekosistem, maka banyak yang dikonversi menjadi modal diproduksi atau ekonomi. Lingkungan termasuk sumber bahan

baku yang digunakan untuk kebutuhan manusia, dan memastikan bahwa kapasitas kebutuhan daur ulang dari limbah manusia tidak melewati batas, untuk mencegah kerusakan alam yang berakibat pada manusia.

Menarik kesimpulan penjelasan di atas, diketahui bahwa PT RAPP telah berupaya penuh mendukung program pemerintah. PT RAPP kedepannya bersama-sama dengan pemerintah diharapkan menginterfensi setiap desa atau kampung yang berada di wilayah operasional perusahaan agar mengembangkan budidaya ikan gabus di lahan gambut. Merambah lahan gambut dinilai lebih bermanfaat untuk diarahkan ternak ikan gabus, karena PT RAPP ini sangat meperhatikan rantai pasok bahan baku, tidak menerima ikan dari alam melainkan ikan budidaya, karena itu ikan gabus saat ini memiliki nilai jual yang cukup tinggi. Pengembangan konsep desa eco-village. Inilah salah satu bentuk kecil dari upaya PT RAPP dalam mendukung program pemerintah yang sedang berjalan.

5.1.4. Tanggung jawab diskresi (*discretionary responsibilities*)

Merupakan tanggung jawab yang secara sukarela dilakukan oleh suatu organisasi bisnis. Tanggung jawab ini mencakup aktivitas hubungan masyarakat, kewargaan yang baik, dan tanggung jawab sosial perusahaan secara penuh. Melalui aktivitas hubungan masyarakat, manajer berusaha memperkuat citra perusahaan, produk serta jasa mereka dengan mendukung gerakan yang bermanfaat. Pada usaha meningkatkan citra perusahaan di mata masyarakat, PT. RAPP Pelalawan melakukan dari berbagai aspek, diantaranya adalah sebagai berikut:

5.1.4.1. Pendidikan

Dalam pelaksanaan program CSR PT.RAPP pada bidang pendidikan. Bidang pendidikan menjadi salah satu yang menjadi perhatian khusus perusahaan karena mengingat masih rendahnya tingkat pendidikan masyarakat disekitar area operasional perusahaan. Pendidikan merupakan hal yang terpenting dalam kehidupan, setiap manusia berhak untuk mendapatkan pendidikan. Pendidikan memegang sebuah peranan penting dalam membangun peradaban suatu bangsa.

Bentuk tanggung jawab diskresi PT. RAPP Pelalawan dari sektor pendidikan adalah:

Tabel V.7 : Tanggung Jawab Diskresi Pendidikan PT RAPP Pelalawan Berdasarkan Sektor Pendidikan 2017-2020

Target kegiatan	Jenis program	Keterangan	Realisasi kegiatan
Bea siswa 2017	<i>Education</i>	Bea siswa perguruan tinggi Bea siswa SMA	Rp. 15.000.000,- Rp. 5.000.000,-
Bea siswa 2018	<i>Education</i>	Bea siswa SMA	Rp. 5.000.000,-
Bea siswa 2019	<i>Education</i>	Beasiswa SLTA Beasiswa SLTP Beasiswa SD	Rp. 5.000.000,- Rp. 5.000.000,- Rp. 5.000.000,-
Bantuan gaji guru honor 2020	<i>Education</i>	Bantuan gaji guru honor Beasiswa Perguruan Tinggi Beasiswa SMA Pelatihan guru Bantuan fasilitas sekolah Bantuan genset sekolah	Rp. 26.000.000,- Rp. 15.000.000,- Rp. 7.000.000,- Rp. 23.500.000,- Rp. 35.000.000,- Rp. 5.850.000,-

Sumber: Dokumentasi CSR PT. RAPP Pelalawan, 2017-2021

Selanjutnya didapatkan hasil wawancara terhadap bidang pendidikan sebagai berikut:

“Ada juga bantuan dari perusahaan, tapi kalau bentuk uang gak ada cuma sarana sekolah. Setahu saya kemaren MTs situ dapat juga tapi bentuknya spidol, meja kursi sama papan tulis gitu” (Wawancara dengan Masyarakat Pangkalan Kerinci, 5 Oktober 2021).

Pendidikan dijadikan tolak ukur dari maju tidaknya suatu bangsa, semakin tinggi kualitas pendidikan suatu bangsa maka semakin tinggi pula tingkat kesejahteraan rata-rata penduduk tersebut. Pelaksanaan program pendidikan dilakukan atau dilaksanakan dengan berbagai kegiatan seperti pemberian beasiswa kepada siswa-siswi yang kurang mampu dan siswa-siswi yang berprestasi, seminar pendidikan, pelatihan, dan bantuan perlengkapan sekolah.

Menarik penjelasan di atas, diketahui bahwa perusahaan telah mengeluarkan dana dan juga material untuk kebutuhan pendidikan melalui CSR program pendidikan yang dilakukan PT RAPP Pelalawan. CSR yang dilakukan PT RAPP sudah meliputi bidang sektor pendidikan hal ini dianggap penting karena elemen pendidikan merupakan salah satu faktor penting dalam upaya Citra perusahaan melalui peningkatan pendidikan dalam upaya membangun kerjasama antara perusahaan pemerintah dan juga masyarakat

5.1.4.2.Kesehatan

Pada bidang kesehatan, PT RAPP berusaha untuk melakukan kegiatan peningkatan kualitas kesehatan masyarakat khususnya diwilayah

operasional perusahaan. Dalam pelaksanaannya perusahaan bekerjasama dengan pemerintah dan puskesmas maupun posyandu.

Bentuk tanggung jawab sosial diskresi PT. RAPP Pelalawan dari sektor kesehatan adalah:

Tabel V.8 : Tanggung Jawab Diskresi Kesehatan PT RAPP Pelalawan Berdasarkan Sektor Kesehatan 2017-2019

Tahun (1)	Jenis Program (2)	Kegiatan (3)	Anggaran (4)
2017	<i>Social Infrastructure Program (SIP)</i>	- Paket makanan tambahan	Rp.2.000.000,-
		- Lomba balita sehat	Rp.4.277.000,-
2018	<i>Social Infrastructure Program (SIP)</i>	- Pengadaan PMT	Rp.5.000.000,-
		- Bantuan baju kader Posyandu	Rp.2.000.000,-
		- Lomba balita sehat	Rp.4.289.000,-
		- Bantuan sunatan massal	Rp.7.500.000,-
		- Bantuan pengadaan peralatan pencegah kebakaran	Rp.1.785.000,-
2019	<i>Social Infrastructure Program (SIP)</i>	- Bantuan material bangunan posyandu	Rp.15.000.000,-
		- Bantuan masker dan obat kesehatan	Rp.3.500.000,-
	<i>Employe volunteerism</i>	- Bantuan operasional sarana fasilitas alat pemadam kebakaran	Rp.5.000.000,-
		- Bantuan akomodasi petugas pemadaman	Rp.4.000.000,-
	<i>Donation</i>	- Bantuan dana tunai kepada para korban kebakaran hutan	Rp.25.000.000,-

Sumber: Dokumentasi CSR PT. RAPP Pelalawan, 2017-2021

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa perusahaan telah melakukan tanggung jawab diskresi dari sektor kesehatan secara menyeluruh terhadap sektor kesehatan di Kabupaten Pelalawan.

Selanjutnya didapatkan hasil wawancara terhadap bidang kesehatan sebagai berikut:

“Oh ya bagus lah, orang PT udah renovasi posyandu lama jadi bagus sekarang, orang ni memang ada jadwal tiap berapa bulan sekali pasti datang kadang ngasih bantuan makanan gizi balita, sama meja kursi lah. Waktu direnovasi kemaren dari putih polos catnya sekarang udah hijau jadi ibu-ibu yang punya anak disini nyaman lah“(Wawancara Camat Pangkalan Kerinci, tanggal 04 Oktober 2021).

Selain itu perusahaan juga memiliki target sektor kesehatan di berbagai posyandu sebagai berikut:

- a. Target posyandu pratama dan madya
- b. Target posyandu purnama
- c. Pembenahan fasilitas posyandu
- d. Pembenahan administrasi posyandu
- e. Kompetensi kader posyandu melalui training

Menarik penjelasan di atas, diketahui bahwa perusahaan telah mengeluarkan dana dan juga material untuk kebutuhan kesehatan melalui CSR program kesehatan yang dilakukan PT RAPP Pelalawan. CSR yang dilakukan PT RAPP sudah meliputi bidang sektor kesehatan hal ini dianggap penting karena elemen kesehatan merupakan salah satu faktor penting dalam upaya Citra perusahaan melalui peningkatan pendidikan dalam upaya membangun kerjasama antara perusahaan pemerintah dan juga masyarakat. Terlebih di era pandemi covid 19 sektor kesehatan menjadi sektor paling krusial yang harus dibantu serta mengikuti perkembangan yang terjadi di di era masyarakat dengan tetap mempertahankan dan membantu meningkatkan kesehatan masyarakat.

5.1.4.3.Sosial

Dalam program pada bidang sosial. Pada kegiatan ini perusahaan melakukan atau memberikan bantuan yang berkaitan dengan sosial kemasyarakatan seperti pengembangan kemasyarakatan, pelatihan pengembangan pengetahuan. Pengadaan peralatan dan seragam untuk mencegah kebakaran, pembiayaan event pertandingan, bantuan peralatan olahraga dan lainnya.

Bentuk tanggung jawab sosial diskresi PT. RAPP Pelalawan dari sektor sosial dengan masyarakat adalah:

Tabel V.9 : Tanggung Jawab Diskresi Sosial PT RAPP Pelalawan Berdasarkan Sektor Sosial 2017-2020

Kegiatan	Realisasi
Pembangunan proyek sumber air bersih	Rp. 18.000.000,-
Perbaikan jalan kebun masyarakat	Rp. 10.000.000,-
Bantuan sarana dan prasarana fasilitas olahraga masyarakat	Rp. 7.500.000,- Rp. 5.000.000,-
Kursus pelatihan mekanik dan menjahit	Rp. 10.000.000,-
Penyiraman jalan Desa	Rp. 790.000,-
- Pelatihan budidaya sapi bali - Bantuan ternak sapi pola RF - Bantuan saprodi program FFV - Pelatihan budidaya padi sawah	Rp. 65.000.000,-
- Bantuan mesin perontok jagung - Budidaya nenas - Bantuan jaring - Produksi batik	Rp. 3.150.000,- Rp. 4.000.000,- Rp. 2.800.000,- Rp. 10.250.000
Gotong royong	Rp. 500.000,-
- Santunan anak yatim - Pemberian bantuan sembako korban kebakaran - Bantuan material bangunan - Pembangunan tiang bendera - Pelatihan UMKM masyarakat terdampak covid19 - Bantuan dana tunai kepada para korban kebakaran hutan - Santunan anak yatim - Bantuan material bangunan - Bantuan masker dan obat kesehatan	Rp. 15.000.000,- Rp. 15.000.000,- Rp. 5.000.000,- Rp. 400.000,- Rp. 650.000,- Rp. 8.000.000,- Rp. 3.000.000,- Rp. 3.000.000,- Rp. 1.000.000,-

Sumber: Dokumentasi CSR PT. RAPP Pelalawan, 2017-2021

Selanjutnya didapatkan hasil wawancara terhadap bidang sosial sebagai berikut:

“Ooh sering, orang PT RAPP sering ikut gotong royong, mereka banyak jug perbaiki jembatan rusak, kalau pas kemarau mereka pasti kasih siram air biar jalanan gak berdebu. Bantuan pas covid juga aada bantuan uang dan sembako” (Wawancara dengan Tokoh Masyarakat, 12 Oktober 2021).

Berdasarkan penjelasan di atas, diketahui bahwa perusahaan telah melakukan tanggung jawab diskresi dari sektor sosial dengan kegiatan yang terhubung dengan program *Social Infrastructure Program (SIP)* sebagai salah satu dari sekian banyak program utama PT RAPP Pelalawan dalam menunjukkan upaya CSR nya.

Menarik kesimpulan dari Penjelasan diatas dapat diketahui bahwa PT RAPP sudah memprioritaskan CSR di bidang sosial Hal ini disebabkan karena tanggung jawab sosial perusahaan sangat penting dibangun untuk membangun kepercayaan dan juga Citra perusahaan di mata masyarakat pada khususnya Adapun dalam bidang sosial ini meliputi sangat banyak kegiatan dan juga meliputi hampir seluruh sektor pembangunan sosial agar keutuhan perusahaan dan hubungan dengan masyarakat tetap terjalin untuk jangka pendek maupun jangka panjang.

5.2. Faktor-faktor Yang Menghambat Pelaksanaan Program *Corporate Social Responsibility* (CSR) PT. RAPP Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan

Pada dasarnya pelaksanaan program *Corporate Social Responsibility* (CSR) PT. RAPP Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan memiliki beberapa faktor penghambat diantaranya akan diuraikan sebagai berikut:

1. Kurangnya respon positif dari masyarakat

Respon masyarakat atas program CSR salah satunya berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat itu sendiri karena memiliki keterkaitan erat dengan *sustainable development* dimana pemberdayaan masyarakat merupakan suatu prasyarat utama menuju suatu keberlanjutan secara ekonomi, sosial dan ekologi yang dinamis. Melalui upaya pemberdayaan, warga masyarakat didorong agar memiliki kemampuan untuk memanfaatkan sumber daya yang dimilikinya secara optimal serta terlibat secara penuh dalam mekanisme produksi, ekonomi, sosial dan ekologinya.

Dalam kaitannya dengan masyarakat secara langsung, kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Pelalawan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu *integrated farming system*, adalah pemberian bantuan bibit kepada masyarakat yang berwirausaha di bidang pertanian, perkebunan, dan perikanan; UMKM, adalah pemberian bantuan dana kepada masyarakat yang berwirausaha *inline* dengan kegiatan perusahaan seperti menjual pupuk tanaman maupun *offline* dengan kegiatan perusahaan seperti menjual makanan khas daerahnya; *social*

infrastructure, adalah pembangunan dan renovasi infrastruktur publik seperti jalan, jembatan, dan rumah ibadah; *education*, adalah pemberian beasiswa pendidikan kepada pelajar berprestasi melalui Yayasan Pendidikan *Tanoto Foundation*; *vocational training*, adalah pemberian pelatihan teknis kepada generasi muda sebagai bekal dalam memasuki dunia kerja seperti pelatihan las, otomotif, dan menjahit; serta *employee volunteerism*, adalah kesukarelaan karyawan dalam membantu masyarakat.

Respon masyarakat terhadap CSR ini hanya didasarkan pada bentuk materi saja, sementara pemberdayaan masyarakat seperti pelatihan, renovasi fasilitas umum, juga menjadi bagian dari CSR. Kurangnya pengetahuan masyarakat atas CSR ini tentu harus didasari sosialisasi yang baik terkait CSR itu mencakup banyak hal mulai dari tanggung jawab ekonomi, tanggung jawab hukum, tanggung jawab etis, tanggung jawab diskresi.

Berdasarkan hasil wawancara terkait rendahnya respon masyarakat, dapat dilihat pada hasil wawancara sebagai berikut:

“Masih banyak masyarakat yang menganggap RAPP ini kurang CSRnya karena mereka cuma taunya CSR itu bantuan berbentuk uang, material dan lain-lain. Mereka lebih suka bantuan berbentuk uang langsung. Jadi kalau bantuan program pendidikan dan lain-lain itu ibaratnya hanya untuk kriteria masyarakat tertentu saja” (Wawancara Masyarakat Penerima Program CSR Kecamatan Pangkalan Kerinci, tanggal 9 Oktober 2021).

Sejalan dengan hasil wawancara di atas, juga didukung dengan wawancara Camat sebagai berikut:

“Iya pendidikan masyarakat juga saya pikir ikut berpengaruh ya, karena itu juga sebagai salah satu indikasi pengetahuan masyarakat tentang program CSR itu.” (Wawancara Camat Pangkalan Kerinci, tanggal 04 Oktober 2021).

Hal ini sesuai dengan penelitian Retnaningsih (2015:180) yang menemukan hasil bahwa masyarakat semakin sadar akan haknya untuk meminta pertanggungjawaban perusahaan atas berbagai masalah sosial yang ditimbulkan oleh perusahaan. Kesadaran ini semakin menuntut akuntabilitas perusahaan bukan saja terkait dengan proses produksi, melainkan juga berbagai masalah sosial yang ditimbulkan salah satunya tingkat pendidikan masyarakat.

Tabel V.10 : Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan dan Angkatan Kerja Tahun 2020

Pendidikan Tertinggi yang ditamatkan	Angkatan Kerja			Persentase Bekerja Terhadap Angkatan Kerja
	Bekerja	Pengangguran	Jumlah Angkatan Kerja	
Sekolah Dasar	85.360	3.192	88.552	96,40
Sekolah Menengah Pertama	46.014	2.163	48.177	95,51
Sekolah Menengah Atas	71.758	8.081	79.839	89,88
Perguruan Tinggi	19.908	787	20.695	96,20
Total	223.040	14.223	237.263	94,01

Sumber: Kabupaten Pelalawan Dalam Angka, 2021

Berdasarkan tabel di atas, tampak bahwa tahun 2020 terdapat 14.223 penduduk berumur 15 tahun ke atas yang pengangguran. Hal ini juga menunjukkan bahwa mayoritas pengangguran tersebut berlatarbelakang pendidikan Sekolah Menengah Atas. Adapun kendala yang dihadapi PT. RAPP dalam program pemberdayaan pada masyarakat sekitar adalah antusias masyarakat itu sendiri. Sering kali pada pertengahan pelaksanaan program, masyarakat berhenti ditengah jalan begitu saja untuk mengikuti program yang dilakukan. Tentu saja dalam penerapan CSR RAPP ini dibutuhkan kerja sama

masyarakat setempat untuk mewujudkannya. Butuh kerja sama yang berkesinambungan antara yang diberdayakan dengan yang memberdayakan.

Humas PT RAPP dan Camat perlu memberikan sosialisasi atas CSR agar sesuai dan benar-benar memenuhi harapan masyarakat. Dari data jumlah penduduk berumur 15 tahun ke atas menurut pendidikan tertinggi yang ditamatkan dan angkatan kerja tahun 2020 di atas, tampak bahwa potensi program CSR ini agar dapat dirasakan langsung oleh masyarakat dapat digesa pada penyerapan tenaga kerja setempat, karena sudah ada realisasi rencana pengembangan kapasitas produksi perusahaan artinya juga dibutuhkan tambahan sumber daya manusia siap kerja. Penyerapan tenaga kerja ini, diharapkan dapat dipahami dan dimaknai oleh masyarakat sebagai bagian dari komitmen CSR PT RAPP sendiri dalam upaya mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat.

Pelaksanaan CSR mampu mempererat hubungan antara perusahaan dan masyarakat karena program CSR merupakan upaya yang nyata dari perusahaan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pelaksanaan CSR memberi pengaruh terhadap masyarakat dalam hal peningkatan kualitas kesejahteraannya, baik di bidang sosial, ekonomi, pendidikan, dan lingkungan, seperti akses transportasi dan lowongan pekerjaan. Oleh karena itu, dalam rangka percepatan pembangunan daerah, sebaiknya diwujudkan komitmen bersama antara program-program pemerintah dengan program CSR dari perusahaan, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

2. Masalah internal perusahaan

Saat ini PT RAPP sedang memfokuskan prioritas perusahaan pada penyelesaian kegiatan pengembangan kapasitas Riau Komplek PT RAPP sehingga pelaksanaan CSR lumayan terhambat. Hal ini dibuktikan dari data pelaksanaan CSR di tahun 2020 hanya sebatas dibidang sebagai berikut:

Tabel V.11. Data Pelaksanaan Program CSR PT. RAPP tahun 2020

Tahun (1)	Jenis Program (2)	Kegiatan (3)
2020	<i>Small and Medium Enterprises (SME)</i>	- Pelatihan UMKM masyarakat terdampak covid19
	<i>Education</i>	- Bantuan gaji guru honor - Beasiswa Perguruan Tinggi - Beasiswa SLTA - Pelatihan guru - Bantuan fasilitas sekolah

Sumber: Dokumentasi PT. RAPP, 2021

Tabel di atas, menunjukkan adanya pelatihan UMKM masyarakat terdampak covid-19 karena pada saat itu tingkat kemiskinan masyarakat meningkat, serta banyaknya masyarakat yang terkena PHK dari perusahaan-perusahaan di Kabupaten Pelalawan. Fokus dari pelatihan tersebut adalah masyarakat khususnya kepala keluarga yang terkena dampak pandemi covid-19. Selain itu, kegiatan pengembangan kapasitas Riau Komplek PT RAPP juga menjadi isu penting yang menghambat pelaksanaan CSR.

Adanya realisasi kegiatan pengembangan kapasitas Riau Komplek PT RAPP milik Asia Pacific Resources International Limited (APRIL) diprotes keras oleh Koalisi Eyes on the Forest (EoF). Hal ini didapatkan dari hasil wawancara sebagai berikut:

“Iya CSR kami di 2020 ini memang terhambat, karena sedang fokus di pengembangan kapasitas Riau Komplek untuk mengejar produksi maka kami melakukan penambahan kapasitas produksi pulp dan dissolving menjadi 5.800.000 ton/tahun, produksi board atau kertas karton sebesar 2.880.000 ton/tahun. Memang saat ini sedang prioritas disini dulu.” (Wawancara dengan Manajer CSR PT RAPP tanggal 04 Oktober 2021).

Dengan penambahan kapasitas baru yang fantastis, hingga 86%, dipastikan akan banyak menimbulkan persoalan baru. Mulai dari potensi penebangan hutan alam, rusaknya ekosistem, menimbulkan konflik lahan baru hingga ancaman kesehatan masyarakat, khususnya penduduk di sekitar Riau Komplek dan Pelalawan umumnya.

Bahkan di dalam dokumen ANDAL yang diserahkan DLHK Provinsi Riau pada 23 November 2020, menyebutkan pengembangan kegiatan APRIL akan menimbulkan dampak seperti, peningkatan kebisingan, terganggunya flora darat, penurunan kualitas air tanah, penurunan kualitas udara ambien akibat emisi gas buang dari cerobong dan kualitas air dan dampak turunannya terhadap biota air, gangguan kesehatan dan persepsi masyarakat. Dalam estimasi EoF, untuk memenuhi kenaikan 2.650.000 ton/tahun produksi *pulp* dan *dissolving (pulp larut)* akan ada potensi penebangan hutan alam baru seluas 120.000 hektar.

Selain itu, penerbitan izin lingkungan itu sendiri tidak mempertimbangkan masalah-masalah yang menyeruak. Dalam dokumen ANDAL (analisis dampak lingkungan hidup) dokumen yang berisi analisis secara cermat terhadap dampak penting dari suatu rencana proyek disebutkan, dengan produksi Riau kompleks PT RAPP sekarang saja ada 20,83% masyarakat terdampak penyakit dan terdapat 36% masyarakat menolak rencana peningkatan kapasitas produksi.

3. Minimnya dukungan pemerintah

Selain itu masih banyak regulasi atau peraturan pemerintah setempat, terkait hadiah atau penghargaan yang akan diterima, proses partisipasi masyarakat penerima program, dan manajemen program CSR yang mencakup sosialisasi program, pelaksanaan program, dan tahap evaluasi program. Karena selama ini perusahaan kurang mendapatkan *feedback* dari pemerintah setempat untuk menjadi perusahaan yang mengedepankan kesejahteraan masyarakat.

Dasar Hukum Pelaksanaan CSR yang sering di artikan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan adalah Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan. PP ini melaksanakan ketentuan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. Dalam PP ini, Perseroan yang kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam diwajibkan untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Kegiatan dalam memenuhi kewajiban tanggung jawab sosial dan lingkungan tersebut harus dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang dilaksanakan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.

Selanjutnya, Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Provinsi Riau di dalam Perda ini di jelaskan jenis-jenis program tanggung jawab sosial perusahaan yaitu program pemberdayaan masyarakat, program kemitraan, program bina lingkungan, donasi dan Promosi.

Hasil wawancara terkait minimnya dukungan pemerintah ini dapat dilihat sebagai berikut:

“Iya tujuan forum TJSP itu untuk menyadarkan perusahaan-perusahaan yang harus mentaati perda itu, meskipun rasa-rasanya tidak jalan. Selama ini kan yang melakukan CSR itu-itu saja, kalau sifatnya CSR saya pikir wajib dipublikasikan terus menerus, mengapa karena hal ini penting dalam mensosialisasikan serta sarana promosi perusahaan juga agar bukan hanya cari untung tapi juga ikut melaksanakan pembangunan di masyarakat” (Wawancara Camat Pangkalan Kerinci, tanggal 04 Oktober 2021).

Hubungan pemerintah dan swasta dalam penyusunan program CSR sebagai salah satu bentuk kerjasama antara pemerintah dan swasta yang biasa disebut sebagai *public private partnership* salah satu contohnya adanya Upaya melibatkan pihak swasta dalam berbagai proyek pemerintah. Upaya ini bukanlah hal yang tabu pada masa sekarang ini, terutama dalam pemenuhan kebutuhan akan infrastruktur mengingat pemenuhan infrastruktur publik memerlukan dana yang besar dan keterbatasan material yang dimiliki oleh pemerintah, Sementara kebutuhan yang lainnya semakin meningkat. Selain pembangunan dengan diadakan kerjasama antara pemerintah dan swasta hal ini juga memperkuat pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan.

Data garis kemiskinan, jumlah dan persentase penduduk miskin di Kabupaten Pelalawan 2016-2020 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel V.12 : Garis Kemiskinan, Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Pelalawan 2016-2020

Tahun	Garis Kemiskinan (rupiah/kapita/bulan)	Jumlah Penduduk miskin (ribu)	Persentase Penduduk Miskin
2016	473.240	45,35	11,00
2017	487.648	44,40	10,25
2018	515.581	44,29	9,73
2019	534.078	45,98	9,62
2020	585.728	45,88	9,16

Sumber: Kabupaten Pelalawan Dalam Angka, 2021

Berdasarkan tabel di atas, tampak bahwa dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Pelalawan cenderung berkurang. Dari tahun 2015 mencapai 11% saat ini di tahun 2020 mampu diturunkan menjadi 9,16%. Hal ini tentunya menjadi salah satu visi dan misi Kabupaten Pelalawan dalam mengentaskan kemiskinan dan adanya CSR PT RAPP ini baik secara langsung dan tidak langsung turut berkontribusi karena salah satu aspek program CSR yang diusung adalah tanggungjawab ekonomi.

Sebagaimana tertuang pada Pasal 14 ayat 1 Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP) disebutkan bahwa, “dalam rangka optimalisasi pelaksanaan program TJSLP, Bupati membentuk Forum TJSP.” Lebih lanjut lagi, defenisi dari Forum TJSLP yang terdapat pada Pasal 1 angka 10 adalah, “organisasi atau forum komunikasi yang dibentuk oleh Bupati untuk mengkoordinasikan program TJSLP dengan melibatkan pemangku kepentingan lainnya sebagai wadah komunikasi, konsultasi dan pengawasan penyelenggaraan TJSLP.

Didalam Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP) ini, sebagaimana dijelaskan bahwa urgensi adanya regulasi ini adalah mengenai tata cara dan keharusan setiap perusahaan untuk melaksanakan TJSLP yang sudah ditentukan. Pada perancangan Peraturan Daerah itu sendiri tentunya sangat diperlukan korelasi yang baik terkait tujuan dibentuknya peraturan tersebut. Lebih lanjut lagi, pada unsur substansi tujuan dibentuknya peraturan ini tidak luput dari

sorotan masyarakat terutama bagi kaum perempuan yang ada di Kabupaten Pelalawan.

Dalam pelaksanaan CSR PT. RAPP di Kabupaten Pelalawan, hubungan Pemerintah dan Swasta bisa kita lihat dalam penyusunan Program CSR yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta. Pada tahap perencanaan pihak pemerintah menyediakan forum diskusi untuk mempertemukan para *stakeholders* yang terkait dengan CSR. Forum diskusi ini diadakan untuk membahas perencanaan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan pada satu tahun kedepannya.

4. Penerapan sanksi administrasi yang masih belum jelas

Penerapan sanksi perusahaan terkait implementasi regulasi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 bab V pasal 74 ayat 3, selanjutnya implementasi Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 6 Tahun 2012 bab XII bagian sanksi administrasi pasal 32 yang masih belum jelas. Perusahaan yang belum memiliki dokumen dan tuntunan mentoring dan evaluasi program, masyarakat yang kurang peduli terhadap program, dan Perda yang tidak berjalan ini menyebabkan kesulitan atas monitoring terhadap program yang telah diberikan.

Berdasarkan hasil wawancara terhadap key informan, didapatkan hasil faktor yang menghambat pelaksanaan program *corporate social responsibility* (CSR) PT. RAPP Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan sebagai berikut:

“salah satu penghambat mungkin masih banyak perusahaan di luar maupun di dalam yang sebenarnya tidak pernah ikut CSR, tidak ada pelaporan tapi tidak ada tindakan tegas dari pemerintah” (Wawancara Camat Pangkalan Kerinci, tanggal 04 Oktober 2021).

Sejalan dengan hasil wawancara di atas, juga diperoleh jawaban sebagai berikut:

“Iya selama ini kan data sanksi kepada perusahaan yang tidak melaksanakan CSR itu sampai sekarang tidak ada buktinya. Komitmen pemerintah ini pun kami ragu gimana Perda mau jalan kalau sanksinya saja tidak tegas. Memang dibunyikan itu di forum TJSP, penarikan izin lah, pembatasan operasional lah, dan lain-lain. Saya tahu perusahaan mana yang tidak melaksanakan CSR, sampai detik ini mereka masih santai-santai saja kok.” (Wawancara dengan Manajer CSR PT RAPP tanggal 04 Oktober 2021).

Menarik kesimpulan dari hasil wawancara di atas, tampak bahwa kurangnya komitmen pemerintah dalam memberikan sanksi bagi perusahaan yang tidak melaksanakan CSR. Seharusnya ada dibentuk tim pengawasan CSR yang dilakukan perusahaan-perusahaan ini, selain sanksi administratif dan sanksi sesuai perundang-undangan yang berlaku perusahaan ini harus terpublikasikan sebagai efek jera agar perusahaan-perusahaan lain di luar sana semakin sadar akan ketegasan dan komitmen dari Pemerintah Provinsi Riau.

Program CSR yang dilaksanakan PT. RAPP mengacu pada konsep yang dapat merangkul 3 pilar pembangunan berkelanjutan seperti konsep 3P : *People* (sosial), *Profit* (ekonomi) dan *Planet* (lingkungan). Namun dalam prakteknya konsep planet masih dikesampingkan karena masih berfokus pada pemberdayaan manusianya.

Lahirnya Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 6 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Provinsi Riau semakin memperkokoh landasan hukum pelaksanaan Corporate Social Responsibility bagi perusahaan-perusahaan yang beroperasi di wilayah Provinsi Riau, termasuk perusahaan kehutanan seperti PT Riau Andalan Pulp and Paper. Pada Pasal 9 Ayat (1)

ditegaskan bahwa setiap perusahaan di Provinsi Riau wajib sebagai pelaksana Program TJSP. Artinya, ketentuan ini merupakan pelengkap dari ketentuan sebelumnya yang hanya mewajibkan kepada perusahaan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam untuk melaksanakan *Corporate Social Responsibility*.

Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan pasal 45 menyebutkan sanksi yang diberikan jika Perseroan Terbatas di Kabupaten Pelalawan tidak melaksanakan TJSP adalah:

- (1) Perusahaan yang tidak melaksanakan ketentuan TJSLP dapat dikenakan sanksi administratif berupa :
 - a. teguran tertulis;
 - b. pembatasan wilayah operasional;
- (2) Selain dikenakan sanksi administrasi, perusahaan dapat dikenakan sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Selanjutnya ketegasan ini apabila ada perusahaan di Provinsi Riau yang tidak melaksanakan *Corporate Social Responsibility* kepada masyarakat yang bertempat tinggal di sekitar lokasi perusahaan, maka berdasarkan Pasal 32 Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 6 Tahun 2012, perusahaan tersebut akan dikenakan sanksi administratif oleh Pemerintah Provinsi Riau berupa teguran tertulis dan bentuk-bentuk sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Namun hingga saat ini Perda tersebut seakan tidak berjalan karena masih banyak perusahaan perseroan terbatas yang tidak melakukan CSR. Artinya,

komitmen pemerintah dipandang sebagai hal penting untuk menegakkan aturan dalam isi Perda ini sehingga tercipta CSR yang kondusif dalam mendukung pembangunan di Kabupaten Pelalawan.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah diuraikan sebelumnya, maka kesimpulan penelitian ini adalah:

1. Evaluasi pelaksanaan program *Corporate Social Responsibility* (CSR) PT. RAPP Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan pada dasarnya sudah berjalan dengan baik dalam membangun sinergitas Program CSR atau TJSP dalam mendukung pembangunan daerah di Kabupaten Pelalawan.
 - a. Dari indikator tanggungjawab ekonomi sudah menyerap tenaga kerja setempat dan memberikan bantuan ekonomi secara langsung berbentuk donasi dan bantuan ekonomi tidak langsung seperti pemberdayaan masyarakat seperti pelatihan UMKM.
 - b. Dari indikator tanggungjawab hukum sudah sangat patuh dalam membayar pajak, mematuhi undang-undang dan peraturan daerah, serta patuh dalam melaporkan kegiatan CSR pada forum TJSP secara periodik sekurang-kurangnya sekali dalam setahun.
 - c. Dari indikator tanggungjawab etis perlu dioptimalkan lagi, karena kurang berpartisipasi dalam kegiatan adat masyarakat setempat. Selanjutnya sudah berkomitmen pada SOP pelaksanaan CSR sesuai peraturan, serta mendukung penuh program pembangunan Pemerintah Kabupaten Pelalawan.

d. Dari indikator tanggungjawab diskresi, sudah turut berpartisipasi dalam bidang pendidikan, kesehatan, sosial, lingkungan, infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat.

2. Faktor penghambat pelaksanaan Program *Corporate Social Responsibility* (CSR) PT. RAPP Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan terdiri dari kurangnya respon positif dari masyarakat, masalah internal perusahaan, minimnya dukungan pemerintah, dan penerapan sanksi perusahaan yang tidak melaksanakan CSR berdasarkan regulasi yang belum jelas.

6.2. Saran

Saran yang dapat diberikan demi peningkatan pelaksanaan program *Corporate Social Responsibility* (CSR) PT. RAPP Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan adalah:

1. Program CSR PT RAPP diharapkan lebih berorientasi pada program jangka panjang, seperti pelatihan UMKM, pelatihan budidaya ternak, dan sebagainya yang sesuai dengan potensi sumber daya alam di Kabupaten Pelalawan sehingga akan terbangun sinergi antara program CSR dengan potensi perekonomian masyarakat dengan memanfaatkan sumber daya alam yang ada.
2. Untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam kegiatan CSR, diperlukan sosialisasi kegiatan CSR yang telah ditetapkan supaya masyarakat mengetahui apa-apa saja kegiatan satu tahun kedepannya. Hal

ini diperlukan karena dengan masyarakat tahu, otomatis masyarakat bisa melihat perkembangan sebelum dan sesudah dilaksanakan kegiatan CSR.

3. Diperlukan pendekatan yang lebih harmonis kepada masyarakat demi keberlangsungan program CSR yang telah dilaksanakan, melalui kerjasama yang telah dijalin antara mitrabina dan perusahaan. Perusahaan RAPP terutama bagian hubungan masyarakat (Humas) perlu secara lebih intensif memberikan penerangan-penerangan tentang “Apa” dan “Bagaimana” sebenarnya program CSR tersebut, sehingga dengan demikian masyarakat mengetahui manfaat baginya dari program tersebut.
4. Dibutuhkan ide-ide yang kreatif dan inovatif dalam kegiatan program CSR, sehingga program-program CSR dapat lebih berkembang. Hal ini tentunya harus didukung oleh *corporate communication* dalam mempublikasi setiap program-program yang terlaksana agar lebih banyak dikenal oleh masyarakat yang lebih luas.
5. Untuk meningkat dampak positif dari pelaksanaan kegiatan CSR maka Pemerintah harus menetapkan standar pelaksanaan kegiatan CSR dan pemerintah mampu menjadi koordinator yang baik dalam pelaksanaan kegiatan CSR. Peningkatan peran Pemerintah harus lebih tegas dalam memberikan sanksi, serta dalam mengawasi pelaksanaan program CSR. Sehingga perusahaan lain dapat mengimplementasikan program CSR sebagaimana yang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 6 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Provinsi Riau.

6. Pemberian CSR hendaknya dapat diupayakan sebaik mungkin terorganisir dengan baik serta tepat sasaran. Dengan kata lain pemberian CSR betul-betul merupakan sebuah penghargaan bagi masyarakat sekitar, bukan hanya sekedar program perusahaan saja. Karena itu perusahaan terus diupayakan mencari pendekatan pemberian CSR yang sesuai dengan situasi dan kondisi yang dihadapi.
7. Peneliti selanjutnya disarankan meneliti CSR di perusahaan lain di Kabupaten Pelalawan, menggunakan pendekatan teori yang berbeda, menambahkan jumlah informan, dan mengobservasi dampak kesejahteraan masyarakat sebelum dan setelah menerima CSR.



DAFTAR PUSTAKA

- Aziz dkk (2005). *Pengaruh Pelaksanaan Good Governance Terhadap Pelayanan Publik*. Medan: DeePublisher.
- Badan Pusat Statistik. (2021). *Kabupaten Pelalawan Dalam Angka 2021*. Pelalawan: BPS Press.
- Badan Pusat Statistik. (2020). *Kecamatan Pangkalan Kerinci Dalam Angka 2020*. Pelalawan: BPS Press.
- Fajar, M. 2010. *Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Goodland, R. (2002). *Sustainability. Human, Social, Economic and Environmental*. Encyclopedia of Global Environment Change. John Wiley & Sons, Ltd.
- Hasibuan, M.S.P. 2011. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Kartini, Dwi. 2009. *Corporate Social Responsibility. Transformasi Konsep Sustainability Management dan Implementasi di Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Kast, F.E. 2013. *Organisasi dan Manajemen*. Jakarta: Bina Aksara.
- Murdiyanto, E., & Kundarto, M. 2012. *Membangun Kemitraan Agribisnis. Inovasi Program Corporate Social Responsibility (CSR)*. Semarang: Yayasan Bina Karta Lestari.
- Pasolong, H. 2007. *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Pearce, J.A., & Robinson Jr, R.B. 2013. *Manajemen Strategis, Formulasi, Implementasi dan Pengendalian*. Edisi 12. Jakarta: Salemba Humanika.
- Poerwanto, A. 2010. *Pengaruh Tipe Industri, Ukuran Perusahaan, Profitaabilitas, Terhadap Corporate Social Responsibility*. Vol. 8 No. 1, November 2011. 1-94.
- Rachman, A. 2005. *Corporate Social Responsibility Antara Teori dan Kenyataan*. Jakarta: Pustaka Yustisia.
- Rudito, B. 2004. *Corporate Social Responsibility, Jawaban bagi Model Pembangunan Indonesia Masa Kini*. Jakarta: ICSD.

- Rudito, B., dan Famiola, M. (2013). *CSR (Corporate Social Responsibility)*. Bandung: Rekayasa Sains.
- Saidi., & Abidin. 2014. *Corporate Social Responsibility Alternatif Bagi Pembangunan Indonesia*. Jakarta: ICSD.
- Sinambela, Lijan Poltak. (2016). *Reformasi Pelayanan Publik Teori, Kebijakan, dan Implementasi*. Jakarta : PT Bumi Aksara.
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Alfabeta.
- Suharto. (2015). *Manajemen Pemerintah: Plus Dua Belas Langkah Strategi*. Jakarta: CV. Media Brilian.
- Suhendra. 2006. *Analisis Kebijakan : Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijakan Negara Edisi Kedua*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Susiani, D. (2019). *Hukum Administrasi Negara*. Jember: CV Pustaka Abadi.
- Syafiie, Inu Kencana. (2010). *Sistem Administrasi Negara RI*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Tangkilisan, H.N.S. (2005). *Manajemen Publik*. Jakarta: Grasindo.
- Thoha, Miftah. 2013. *Kepemimpinan Dalam Manajemen*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Wibisono, Y. 2007. *Membedah Konsep dan Aplikasi Corporate Social Responsibility*. Gresik: Fascho Publishing.
- Widjaja, dkk. (2015). *Keadilan Untuk Pertumbuhan*. UNPAD Press.
- Winarno, Budi. (2007). *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Media Pressindo.
- Wirman. (2012). *Studi Tentang Administrasi Publik*. Jakarta: Erlangga.

Jurnal :

- Abbas, Jawad. (2020). *Impact of Total Quality Management on Corporate Sustainability Through the Mediating Effect of Knowledge Management*. Journal of Cleaner Production, Vol.244, January 2020.
- Carnahan, Seth; Agarwal, Rajshree; Campbell, Benjamin. (2010). *The Effect of Firm Compensation Structures on Employee Mobility and Employee Entrepreneurship of Extreme Employers*. US Census Bureau Center for Economic Studies Paper No. CES-WP-10-06.

- Curran, Giorel. (2017). *Sustainability and Energy Politics: Ecological Modernisation and Corporate Social Responsibility (Energy, Climate and the Environment)*. International Journal of Griffith University, Vol. 2, No. 1, May 2017.
- Dewi, I Gusti Ayu Agung Omika; Dewi, I Gusti Ayu Agung Pradnya. (2017). *corporate Social Responsibility, Green Banking, And Going Concern On Banking Company In Indonesia Stock Exchange*. International journal of social sciences and humanities 1 (3), 118-134.
- Halkos, George; Skouloudis, Antonis. (2017). *Revisiting the relationship between corporate social responsibility and national culture : a quantitative assessment*. Journal of Management decision : MD. - Bingley : Emerald Publishing Limited, ISSN 0025-1747, ZDB-ID 411946-0. - Vol. 55.2017, 3, p. 595-613.
- Handayani, Rini; Wahyudi, Sugeng; Suharnomo, Suharnomo. (2017). *The effects of corporate social responsibility on manufacturing industry performance: the mediating role of social collaboration and green innovation*. DOI:10.3846/BTP.2017.016.
- Jamali, Dima; Karam, Charlotte. (2018). *Corporate Social Responsibility in Developing Countries as an Emerging Field of Study*. International Journal of Management Reviews, Vol. 20, Issue 1, pp. 32-61, 2018.
- Jamali, Dima; Karam, Charlotte. (2018). *Corporate Social Responsibility in Developing Countries as an Emerging Field of Study*. International Journal of Management Reviews, Vol. 20, Issue 1, pp. 32-61, 2018.
- Karaman, Abdullah S., and Akman, Engin (2018). *Taking-off corporate social responsibility programs: An AHP application in airline industry*. Journal of Sustainability, 2020, vol. 12, issue 2, 1-18.
- Latapí Agudelo, Mauricio Andrés; Jóhannsdóttir, Lára; Davídsdóttir, Brynhildur. (2019). *A literature review of the history and evolution of corporate social responsibility* International Journal of Corporate Social Responsibility. Springer, Vol. 4(1), pages 1-23, December.
- Maon, François; Swaen, Valérie; Lindgreen, Adam. (2017). *Designing and Implementing Corporate Social Responsibility: An Integrative Framework Grounded in Theory and Practice*. Journal of Business Ethics 87:71-89.

Dokumen dan Rujukan :

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas

Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 6 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Provinsi Riau.

Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan.

Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun 2016 – 2021